ULAMA DAN POLITIK

(STUDI RELASI POLITIK ULAMA DAN ELIT LOKAL DI KABUPATEN JOMBANG 2018-2023)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik

Oleh :

Anfathoni Alama Jidan

2006016027

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:
Yth.Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo
Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara/i:

Nama : Anfathoni Alama Jidan

NIM : 2006016027

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Ulama dan Politik (Studi Relasi Politik Ulama dan Elit Lokal Di Kabupaten Jombang 2018-2023)

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan pada seminar proposal.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desembert 2024

Pembimbing,

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. 19851118201601190

PENGESAHAN SKRIPSI

ULAMA DAN POLITIK

(STUDI RELASI POLITIK ULAMA DAN ELIT LOKAL DI KABUPATEN JOMBANG 2018-2023)

Disusun Oleh :

Anfathoni Alama Jidan

2006016027

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 20 Desember 2024 dan

Dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Muhammad Mahsun M.A

NIP. 198511182016011901

Sekretaris

Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si

NIP. 197303052023211007

Penguji

Prof. Imam Yahya, M.Ag

NIP. 197004101995031001

Pembimbing

Muhammad Mahsun M.A

NIP. 198511182016011901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul **"ULAMA DAN POLITIK (Studi relasi politik ulama dan elit loka di Kabupaten Jombang 2018-2023)"** merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumberreferensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang 28 November 2024

Yang Menyatakan,

Anfathoni Alama Jidan

NIM: 2006016027

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat dan rahmat karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ULAMA DAN POLITIK (STUDI RELASI POLITIK ULAMA DAN ELIT LOKAL KABUPATEN JOMBANG 2018-2023)". Sholawat serta salam penulis haturkan kepafa junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, dan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiyamah kelak aamiin.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya keterbatasan dan kekurangan penulis, dalam menyelesaikan studi di UIN Walisongo. Penulis mengetahui dan menyadari bahwa, tulisan ini jauh dari kata sempurna, dan mudah-mudahan nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang bersedia membacanya.

Perjalanan panjang yang penulis lalui dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini dibuat dengan ketulusan hati, rasa penasaran penulis dalam mengulik relasi ulama dan elit lokal yang membuat penulis berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Meskipun itu semua tidaklah mudah berbagai rintangan berhasil dilalui atas banyak dukungan, semangat bahkan do'a kedua orang tua senantiasa mengiringi setiap langkah usaha yang dilakukan penulis. Alhasil skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu izinkan penulis untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmatnya bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku penanggung jawa terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendukung penulis melakukan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Mahsun, M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya kepada penulis, dari mulai penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai dibuat. Terima kasih telah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan bapak dalam menyelesaikan Studi S3 nya di UGM.
6. Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag selaku Wali Dosen penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan penulis tentang berbagai pengetahuan baru yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Prodi Ilmu Politik.
8. Seluruh jajaran Staf Tenaga Pendidik dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membantu penulis dalam kebutuhan administrative penelitian skripsi.
9. Kepada para guru TK, MI, Mts, dan MAN, yang telah memberikan ilmu kepada penulis membimbing hingga membentuk karakter penulis.
10. Tak lupa para Kyai, ustad-ustad, yang telah mengajarkan ilmu agama kepada penulis, bagaimana kyai dan ustad membimbing tidak hanya ilmu agama tapi bagaimana kita hidup bermasyarakat mengedepankan adab.
11. Bupati Jombang, seluruh narasumber dan masyarakat Kabupaten Jombang yang telah bersedia menerima penulis, untuk melakukam penelitian guna memenuhi tugas akhir. Sehingga, penulis mendapatkan berbagai data-data yang dapat mendukung penelitian ini.
12. Tak lupa saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah memberikan dukungan baik secara materil maupun do'a. Penulis sadar saat menjalankan proses dari mulai masuk kuliah hingga selesai mengerjakan tugas akhir, yang berjuang tidak hanya penulis, tetapi juga orang tua yang ikut terlibat dalam semua proses penulis. Perjuangan yang luar biasa bagaimana membiayai keempat anaknya demi mendapatkan pendidikan yang layak. Karena do'a kedua

orang tua merupakan sebuah keistimewaan tiada tara dalam menguatkan penulis, memberikan solusi bahkan mendengarkan keluh kesah penulis pada proses penulisan skripsi.

13. Kedua kakak saya Alfin Masykur dan Alwy Arief, yang telah memberikan support terhadap penulis, menguatkan, dan mengajarkan bagaimana kita memahami keadan. Tak lupa untuk adik saya tercinta Ni'matul Maula yang selalu menanyakan kapan wisuda.
14. Sahabat-sahabat penulis Moh Erza, Gilang Sangsaka, Aqil Faiq RHS, Riyan Ardiansyah, Key A.S, dan Moh Fadli, M. Ilham Al-atas
15. Teman-teman HMJ Ilmu Politik periode 2023 yang telah membersamai proses saya, pengurus Dema Fisip 2023 yang juga telah membersamai dalam satu periode, tak lupa jajaran BPH dema, HMJ yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, pokoknya seuanya hebat dan sampai bertemu dilain hari dengan capaian kesuksesan kalian masing-masing.
16. Pengurus Sema UIN Walisongo periode 2024 yang telah berjalan bersama dengan berbagai macam rintangan yang ada terima kasih kalian semua orang-orang hebat.
17. Tak lupa kepada keluarga besar PMII Rayon Fisip dan kepengurusan rayon yang dinahkodai oleh yon Mia, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam berproses di organisasi. Tidak lupa teman-teman kaderisasi dan kepada seluruh Angkatan 2022 arakata yang ikut mewarnai berproses dalam PMII Rayon Fisip, semoga kalian dilancarkan segala keinginannya.
18. Rekan-rekan penulis, efa, faiz, Noviani Nazeria Hakim dan temen-temen ilmu politik yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan secara pemikiran terhadap penulis, dan menjadi bagian dalam perjalan penulis untuk menyelesaikan studi ini.
19. Tidak lupa kepada diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi
20. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada pemilik NIM 2206026057 yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata semourna dan bagaimanapun penulis berusaha memberikan yang terbaik. Penulis menerima kritik dan saran dengan kelapangan hati, demi tercapainya hal terbaik dari penelitian ini. Penulis menerima kritik dan saran dengan kelapangan hati, demi

tercapainya hak terbaik dari penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Dengan mengucapkan segala rasa syukur kepada Allah SWT.

Alhamdulillahirabil'alamin, saya persembahkan skripsi ini:

Untuk kedua orang hebat dalam hidup saya, ialah kedua orang tua saya dan kakak saya Alfin Masykur, Alwy Arief, serta adik saya Ni'matul Maula, yang selalu memberikan seluruh do'a dan dukungan yang berarti dalam setiap langkah kehidupan saya. Selalu mendukung saya, dan tidak pernah mengeluh dengan segala keterbatasan proses saya.

MOTTO

“Jangan sampai ahlul ‘ilmi itu merendahkan diri, dan hanya dengan Tawadlu’lah orang taqwa itu dapat diangkat derajatnya”

(KH. Abdussalam Shohib)

“Dengan berpolitik, kita bisa membuat kebijakan yang bermanfaat secara massive bagi masyarakat. Jadi, politik adalah alat perjuangan yang strategis”

(Hj. Munjidah Wahab)

“Jangan pernah merasa tertinggal setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing”

(Q.S Maryam: 4)

ABSTRAK

Ulama dan politik adalah salah satu topik penting dalam studi di Indonesia, ini disebabkan keterlibatan ulama di dalam politik praktis di Indonesia yang sudah ada era awal kemerdekaan sampai di era demokratisasi pasca orde baru. Kajian para sarjana sebelumnya tentang ulama dan politik lebih banyak memberikan pada konteks nasional. Sedangkan kajian tentang konteks lokas masih sangat sedikit. Kajian skripsi ini, ingin memperkaya studi tentang ulama dan politik di tingkat lokal Indonesia, yang mengangkat kasus studi peran ulama dalam politik praktis di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Studi ini difokuskan mengkaji keterlibatan ulama dari pesantren Tambakberas terhadap Munjidah Wahab dalam kontestasi pilkada 2018 dan mengkaji hubungan tersebut terhadap pemerintah lokal terhadap pendidikan keislaman. Untuk mengkaji studi ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana bentuk-bentuk dukungan yang diberikan oleh ulama (kyai Hasib) dalam memenangkan Munjidah pada pilkada 2018. Kedua, bagaimana dampak dukungan politik terhadap pola relasi antara ulama dan kepala daerah pasca pilkada 2018 di Kabupaten Jombang. Ketiga, dampak relasi ulama dan elit lokal dalam pembangunan di sektor pendidikan.

Untuk menjawa pertanyaan diatas, studi ini dilakukan menggunakan perspektif historical institusionalisme sebagai acuan metodologis dan klientelisme sebagai kerangka teoritik. Historical institusionalisme memberikan titik tekan pada pemaham institusi dalam bentuk praktek politik yang menekankan pada perkembangan institusi dalam perkembangan sejarah dan klientelisme untuk memahami hubungan antara ulama dan elit politik dalam praktek politik di Kabupaten Jombang. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif yang mengedepankan wawancara mendalam, interview dengan sejumlah informan yang memiliki keterlibatan pada topik kajian, observasi partisipan, dan kajian dokumentasi, yaitu merujuk pada analisis dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan pada kajian.

Dari penelitian ini, penulis menemukan poin-poin penting. Pertama, ulama memberikan dukungan terhadap Munjidah pada pilkada 2018 melalui mobilisasi massa kegiatan keagaman, alumni pesantren, dan organisasi fatayat, Muslimat. Kedua, pasca pilkada berlangsung relasi antara ulama dan elit lokal terjalin melalui keterlibatan ulama dalam memberikan masukan kebijakan seperti di wajibkan pendidikan keagaman pada sekolah dasar (SD). Ketiga, ulama andil dalam distribusi public good, dimana keterlibatannya dalam menyeleksi guru keagamaan yang memiliki syarat lulusan pesantren. Dari tiga pertanyaan temuan penelitian itu saya berargumen, bahwa dinamika politik lokal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik otoritas agama ulama, baik dalam strategi pemenangan kandidat maupun dalam pengambilan keputusan pasca pilkada. Namun studi ini, tentu memiliki limitasi, salah satunya lemahnya kajian yang lebih mendalam lagi dengan kajian studi etnografi, untuk memahami lebih detail tentang kebijakan yang lebih luas diluar kajian agama, apakah ulama juga terlibat mendesain distribusi proyek infrastruktun maupun proyek penting lainnya.

Kata Kunci: ulama, elit lokal, klientelisme, pendidikan keagamaan, Jombang.

ABSTRACT

Ulama and politics are one of the important topics in studies in Indonesia, this is due to the involvement of ulama in practical politics in Indonesia which has existed since the early era of independence until the era of democratization after the New Order. Previous studies by scholars on ulama and politics have given more attention to the national context. While studies on the local context are still very few. This thesis study aims to enrich the study of ulama and politics at the local level in Indonesia, which raises the case study of the role of ulama in practical politics in Jombang Regency, East Java. This study focuses on examining the involvement of ulama from the Tambakberas Islamic boarding school towards Munjidah Wahab in the 2018 regional election contestation and examining the relationship with the local government towards Islamic education. To examine this study, the following questions were answered. First, what are the forms of support given by ulama (kyai Hasib) in winning Munjidah in the 2018 regional election. Second, what is the impact of political support on the pattern of relations between ulama and regional heads after the 2018 regional election in Jombang Regency. Third, the impact of relations between ulama and local elites in development in the education sector.

To answer the above questions, this study was conducted using the perspective of historical institutionalism as a methodological reference and clientelism as a theoretical framework. Historical institutionalism emphasizes the understanding of institutions in the form of political practices that emphasize the development of institutions in historical development and clientelism to understand the relationship between ulama and political elites in political practices in Jombang Regency. This study was conducted using a qualitative method that prioritizes in-depth interviews, interviews with a number of informants who are involved in the topic of study, participant observation, and documentation studies, namely referring to the analysis of documents that are related to the study.

From this study, the author found important points. First, ulama provided support for Munjidah in the 2018 regional elections through mass mobilization of religious activities, alumni of Islamic boarding schools, and the fatayat organization, Muslimat. Second, after the regional elections took place, the relationship between ulama and local elites was established through the involvement of ulama in providing policy input such as making religious education mandatory in elementary schools (SD). Third, ulama contributed to the distribution of public goods, where their involvement in selecting religious teachers who had the requirements of being graduates of Islamic boarding schools. From the three research findings, I argue that the dynamics of local politics in Indonesia, especially in Jombang Regency, cannot be separated from the influence of religious authority politics of ulama, both in the winning strategy of candidates and in post-election decision-making. However, this study certainly has limitations, one of which is the weakness of a more in-depth study with ethnographic studies, to understand in more detail about broader policies outside of religious studies, whether ulama are also involved in designing the distribution of infrastructure projects or other important projects.

Keywords: ulama, local elite, clientelism, religious education, Jombang.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
PERSEMBAHAN ix
MOTTO x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan Masalah 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kajian Pustaka 7
F. Kerangka Teori 10
G. Metode Penelitian 18
H. SISTEMATIKA PENULISAN 22
KERANGKA TEORI 24
A. Landasan Teoritik 24
1. Historical Institutionalisme 24
BAB III 39
LANDSCAPE KABUPATEN JOMBANG 39
A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang 39
1. Kondisi Geografis dan batas Administrasi 39
2. Demografis Kabupaten Jombang 40
3. Kondisi Sosial, Ekonomi Kabupaten Jombang 42
B. Sejarah Kabupaten Jombang 44
C. Sejarah ulama dan politik Kabupaten Jombang 46
1. Perjuangan Intelektual Tafsirul Afkar 47
2. Pemikiran Politik KH. Wahab Hasbullah 48
3. Perjuangan Politik KH. Bisri Syansuri 49
D. Profil Munjidah Wahab 52
BAB IV 54

BENTUK DUKUNGAN ULAMA TERHADAP BUPATI 54

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, bentuk-bentuk dukungan ulama sebagaimana penulis akan jelaskan lebih detail pada bagian-bagian dibawah ini:..... 55

A. Gambaran Umum Proses Mobilisasi massa yang dilakukan Ulama 55

B. Bentuk mobilisasi massa..... 57

1. Mobilisasi massa ulama dalam bidang keagamaan..... 58

2. Mobilisasi keluarga ulama 61

4. Mobilisasi massa ulama melalui Musfat (Muslimat- Fatayat)..... 69

BAB V 72

POLA RELASI ULAMA DAN KEPALA DAERAH PASCA PILKADA 72

A. Proses terjadinya relasi antara ulama dan elit poitik..... 72

B. Bentuk pola relasi pasca Pilkada Jombang 74

1. Pola relasi pendekatan kultural..... 74

2. Pola relasi Pendekatan Marketis 78

3. Pendekatan Institusionalis..... 80

BAB VI..... 86

DAMPAK RELASI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI SEKTOR PENDIDIKAN..... 86

A. Pembangunan infrastrukur pendidikan 86

B. Muatan lokal keagamaan sebagai pelajaran wajib..... 89

1. Kolaborasi antara Pemerintah dan ulama dalam penyusunan kurikulum 91

2. Dampak Kurikulum Madrasah Diniyah..... 95

BAB VII 99

PENUTUP..... 99

A. Kesimpulan..... 99

B. Pelajaran Penting..... 100

DAFTAR PUSTAKA..... 102

LAMPIRAN DOKUMENTASI..... 105

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbedaan antara pembelian suara, pork barrel, dan mobilisasi politik menggunakan program sosial 33
Table 2 Statistik Penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan jenis kelamin tahun 2020 40
Table 3 Statistik Penduduk Kabupaten Jombang Berdasarkan Pendidikan Akhir tahun 2020 41
Table 4 Statistik Penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan agama tahun 2020 41
Table 5 Nama-nama Bupati Kabupaten Jombang 46

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 Alur berfikir religi-politik Pesantren TambakBeras..... 54
gambar 2 dukungan ulama terhadap Munjidah..... 60
gambar 3 Dukungan keluarga ulama Jombang..... 64
gambar 4 Bentuk dukungan melalui alumni pesantren..... 69
gambar 5 Mobilisasi ulama terhadap Muslimat & Fatayat..... 71
gambar 6 Kordinasi Pemda dan ormas Islam..... 76
gambar 7 Dokumentasi Sholawat Pemkab dan Ulama..... 77
gambar 8 Munjidah menghadiri UMKM..... 79
gambar 9 Kegiatan Festival Jombang..... 80
gambar 10 Sosialisasi Mulok oleh Dinas Pendidikan. 82
gambar 11 Penyerahan beasiswa terhadap siswa Tambakberas. 83
gambar 12 penyitaan miras oleh polres jombang..... 85
gambar 13 Alokasi Anggaran SD dan SMP 87
gambar 14 Alokasi anggaran PAUD..... 88
gambar 15 kolaborasi antara ulama dan pemerintah daerah..... 93
gambar 16 Insentif guru mulok bulan Juni..... 94
gambar 17 PAGU Muatan lokal Keagaman per tahun..... 94
gambar 18 Munjidah bersama salah satu siswa yang diwisuda..... 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah masa reformasi posisi ulama dalam dinamika politik di Indonesia sangat berpengaruh, karena hubungan ulama dan politik sangat erat, sehingga munculah berbagai fatwa dalam bentuk deklarasi dukungan yang keluar dari ulama yang berpengaruh besar terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Contohnya yang terjadi dalam Pemilu 2024 dimana MUI mengeluarkan fatwa mengharamkan golput pada saat pemilu karena dalam proses pemilu merupakan upaya memilih pemimpin yang baik sesuai dengan syariat. Contoh lainya juga terjadi dalam bentuk deklarasi dukungan yang terjadi dalam pemilu 2024 dimana ulama se-jawa mataram yaitu para ulama, habib, dan asatid berjanji akan mendukung paslon Anies-Muhaimin pada pemilu 2024. (Jabal, 2024). Dari hal tersebut, banyak partai politik seperti PKB, PPP, PAN, PKS, Nasdem dan partai politik lainnya, dalam proses politik juga melibatkan ulama untuk membantu pengambilan keputusan dan dukungan politik (Fajri, 2014). Kususnya dalam kontestasi politik dalam pemilu dimana masing-masing calon presiden selalu memiliki rujukan ulama dalam proses berlangsungnya pemilu (Gunawan, 2023).

Selain itu, dukungan ulama pada proses politik juga tertulis dalam berbagai kajian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai pengaruh ulama dalam politik skala nasional maupun daerah. Dalam lingkup nasional biasanya membahas mengenai keberadaan ulama yang mempunyai pengaruh dalam proses berjalannya pemilu. Hal ini dikarenakan pengaruh ulama yang besar dilatar belakangi dari mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, sehingga menjadi salah satu faktor penting ulma memiliki dukungan yang kuat di kalangan masyarakat.

Tidak hanya itu, ketika berbicara mengenai ulama juga pasti melibatkan santri yang ada di pondok pesantren, karena kyai dan santri di kalangan masyarakat menjadi panutan. Kondisi ini yang membuat pondok pesantren selalu menjadi perebutan dukungan politik bagi para pejabat publik atau politisi. Banyaknya

partai politik atau para politisi yang melakukan kunjungan ke pondok pesantren ternama untuk meminta dukungan politik dan mereka menganggap bahwa ulama yang mempunyai pengikut setia bisa dijadikan sebagai konstituen dalam meraih suara. Hal ini terjadi karena peran kyai dan santri tidak hanya berkutik dalam kegiatan keagamaan melainkan juga dalam aspek sosial politik (Tangkas 2021; Barokah 2023; Iqbal 2019; dan Maulani 2023).

Lalu, pada tingkat daerah pengaruh ulama juga terlihat dalam kajian-kajian yang telah menarik perhatian sejumlah sarjana secara akademis. Diantara lain fenomena yang terjadi pada Pilkada Bangkalan yaitu dimana dari tiga paslon pemimpin daerah mempunyai dukungan masing-masing, diantaranya dukungan dari Kyai, Pemuda Karang Taruna dan Blater. Masing-masing pendukung mempunyai ciri khas, akan tetapi disini peran Kyai jauh lebih besar suaranya karena cenderung masyarakat memiliki sifat *Sami'na Wato'na* (mendengarkan perintah serta mematuhinya) terhadap para Kyai sehingga mempengaruhi dalam jalannya pilkada di Bangkalan. Fenomena dukungan ulama juga terjadi pada pilkada DKI Jakarta, dimana ulama Betawi mendukung salah satu paslon, bahkan adanya dukungan ulama sampai pada kegiatan dakwah untuk mengajak masyarakat DKI mendukung salah satu paslon yang didukung oleh ulama Betawi. Strategi ulama Betawi terbukti memberikan dampak yang sangat besar sehingga dalam pilkada DKI dimenangkan oleh paslon yang didukung langsung oleh ulama Betawi. Hal ini membuktikan dukungan ulama dalam politik sangat bepengaruh terhadap masyarakat. (Umam, 2015 dan Rosi, 2019).

Dalam tingkatan daerah ini juga muncul kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dimana adanya kebebasan masing-masing daerah untuk menjalankan daerah otonominya, sehingga memunculkan adanya keterbukaan dukungan politik yang kemudian memberikan pengaruh terhadap elit lokal yang ingin terlibat dalam politik praktis. Salah satunya yaitu di di Kabupaten Jombang, terdapat hal penting tentang bagaimana peran ulama yang semakin aktif dalam dukungan politik. Dengan adanya peran penting ulama dalam dukungan politik di Kabupaten Jombang memiliki sejarah yang panjang (path dependen), keterlibatan ulama terhadap politik sudah terjadi sebelum era reformasi dimana kyai Wahab dan kyai Bisri juga sudah andil dalam politik lokal maupun nasional, sehingga adanya pola dukungan dan keterlibatan ulama melekat hingga sekarang.

Studi ini memperkaya kajian atas tentang pengaruh ulama terhadap dukungan politik, terutama untuk mengkaji hubungan antara ulama dan elit politik lokal di Kabupaten Jombang. Ulama yang dimaksud disini adalah kyai M. Hasib Wahab, yang merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Kajian ini berfokus pada satu pondok pesantren, yaitu Bahrul Ulum Tambakberas, karena kedekatan kyai Hasib dengan Munjidah Wahab, selaku Bupati Jombang periode 2018-2023. Sedangkan elit politik lokal yang dimaksud ialah Bupati Jombang. Pilihan studi pada hubungan ulama dan elit lokal di Kabupaten Jombang dilatar belakangi oleh peran pesantren menjadi bagian penting di dalam membangun sosial budaya dan bahkan politik di Jombang. Selain itu, Jumlah santri di pondok pesantren yang banyak juga memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan suara saat Pilkada berlangsung.

Dalam skripsi ini terdapat berbagai argumen yaitu mengenai adanya keterlibatan ulama dalam hal dukungan politik di kabupaten Jombang terjadi sejak lama. Dimulai sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan-perubahan dukungan ulama ini terus berlangsung dalam keterlibatan para ulama dahulu mempengaruhi terhadap pola relasi antara ulama dan elit lokal. Dimana ulama memiliki pengaruh yang cukup besar dalam relasi yang terbangun antara ulama dan elit lokal. Seringkali ulama dimintai do'a, nasihat bahkan dukungan untuk membantu elit dalam proses pilkada. Dalam hal ini, relasi politik ulama dan kekuasaan yang berlangsung lama semakin melekat serta berpengaruh terhadap dinamika politik di Kabupaten Jombang, khususnya semakin melekatnya peran ulama dalam politik electoral terhadap tata kelola di daerah Jombang.

Adapun pondok pesantren yang berdiri di Kabupaten Jombang ada 203 pesantren yang terdaftar di kemenag. Sehingga Kabupaten Jombang memiliki sosial budaya yang mayoritas dari kaum sarungan. Namun, dari sekian banyak pondok pesantren yang berdiri hanya ada tiga pondok pesantren yang sangat berpengaruh terhadap dukungan politik. Pondok pesantren tersebut ialah Tebuireng, Bahrul Ulum Tambakberas, dan Mambaul Ma'arif Denanyar. Tiga pondok pesantren yang disebutkan, masih ada hubungan saudara. Selain pondok pesantren, Nahdlatul Ulama juga berdiri di Kabupaten Jombang yang dipelopori oleh tiga serangkai yaitu K.H Hasyim Asy'ari, K.H Wahab Hasbullah, dan K.H Bisri Syansuri.

Dalam konteks pilkada 2018 terdapat adanya keterlibatan ulama dalam mendukung Munjidah Wahab dan Sumrambah. Diantara ulama yang memberikan dukungan itu adalah para ulama yang berasal dari Pondok Pesantren Tambakberas, dimana Munjidah juga masih keturunan dari pendiri Pondok Pesantren Tambakberas. Karenanya, tentu ada keterlibatan dzuriyah Tambakberas dalam mendukung kemenangan munjidah Wahab dalam pemilihan bupati pada pilkada 2018. Hal ini sudah jelas arah dukungan dari ulama Tambakberas untuk memberikan intruksi kepada alumni dan warga sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas untuk mendukung munjidah. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas merupakan salah satu pondok tertua di Kabupaten Jombang yang di dirikan oleh, kyai Abdul Salam pada tahun 1883 M (Budianto, 2022). Dalam hal ini, penulis menemukan adanya dukungan ulama Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas terhadap pasangan Munjidah Wahab dan Sumrambah yang diusung Partai Demokrat, PPP, dan Partai Gerindra serta Perindo. Pada pilkada 2018 ini pasangan Munjidah dan Sumrambah berhasil unggul dengan 308.536 suara atau setara dengan 48,30 persen yang mengalahkan 2 kandidat lain, yaitu Nyono Suharli Wihandoko dan Subaidi Muhtar (petahana) yang diusung Partai Golkar, PKB, PAN, PKS dan Partai Nasdem dengan memperoleh 219.388 suara atau setara dengan 34,34 persen dan, pasangan Syafi'in dan Choirul yang diusung PDIP, Partai Hanura, PKPI dan PBB memperoleh dukungan pemilih sebanyak 110.893 suara atau setara 17,36 persen, dengan total suara sah 638.817 atau setara 92 persen, suara tidak sah 50.294 atau setara 7 persen, dengan jumlah partisipasi pemilih 689.111 atau setara dengan 64,71 persen, dari total daftar pemilih tetap Kabupaten Jombang 977.548 (Syafi'i & Ika, 2018).

Bahwa di era demokratisasi dan otonomi daerah relasi ulama dan penguasa di bangun dalam pondasi relasi yang sangat klientelistik dan ini berdampak terhadap distribusi maupun kebijakan yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan pemerintahannya. Berdasarkan hasil temuan riset lapangan, menunjukan bahwa ada dukungan yang dilakukan ulama terhadap aktor politik telah terjadi sejak era KH. Bisri Syansuri. Sehingga pola dukungan ulama dari zaman dahulu menjadi panutan bagi generasi penerusnya sampai sekarang. Dan yang menjadi awal serta hal mendasar menjadikan ulama ikut andil dalam dukungan politik juga dikuatkan oleh gus salam salah satu pengasuh pondok pesantren lewat perkatanya

mengenai siayasah/politik bagian dari agama (*Juzz'un Minaddin).* Selain itu, juga disampaikan oleh Kyai Hasib bahwa alasan sejarah ulama ikut andil dalam politik entah melalui kelompok sosial, dakwah, dan majelis. Selain dua hal tersebut, yang menjadi alasan hingga saat ini ulama-ulama melanjutkan perjuangannya, dalam dunia politik baik terjun secara langsung atau hanya sekedar menjadi penasihat guna mempertahankan ideologi, menjalankan tasamuh, tawazun.

Pada proses Pilkada Jombang 2018 saat itu ulama memberikan dukungan terhadap pasangan Munjidah-Sumrambah, Munjidah sendiri juga masih keluarga pesantren tambakberas. Pertama, bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan oleh ulama terhadap pasangan Munjidah-Sumrambah, yaitu dengan berbagai macam, ulama memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan keagaamaan mulai dari acara ngaji, hingga peringatan hari besar islam. Dalam agenda-agenda keagaaman ulama mengundang Munjidah guna memperkenalkan terhadap para pengikutnya bahwasanya Munjidah-Sumrambah merupakan pasangan yang memiliki latar belakang santri, beliau juga sudah berkecimpung di dunia organisasi sehingga dianggap mampu akan memimpin Jombang dengan baik tanpa meninggalkan adanya hak-hak syariat islam. Kedua, bentuk dukungan ulama dengan mengarahkan keluarga besar ulama guna memberikan dukungan terhadap pasangan Munjidah-Sumrambah seringkali disampaikan melalui kumpul rutin keluarga melalui rapat Yayasan Pondok Tambakberas. Ketiga bentuk dukungan dengan mengarahkan para alumni untuk mendukung Munjidah bahkan dengan cara merekomendasikan masuk dalam timses.

Selanjutnya, dimasa pasca terjadinya pilkada pola relasi ulama dan bupati yaitu terjadinya hubungan saling mendukung satu sama lain atau hubungan timbal balik antar pemerintah daerah dengan ulama. Ulama dalam pola relasi pasca pilkada ini berperan memberikan masukan atau nasihat terhadap pemerintah mengenai hal yang seharusnya dilaksanakan. Sedangkan, pemerintah daerah seringkali melibatkan ulama dalam kegiatan sosial, maupun keagamaan. Sehingga pola relasi yang terbentuk menjadi seimbang dimana ulama mampu memberikan arahan implementasi kebijakan public dalam aspek keagamaan dan ulama mendapat dukungan bentuk beasiswa santri, kegiatan keagamaan dan memberikan kebijakan perihal muatan lokal keagamaan di sekolah umum yang dibawah naungan dinas pendidikan Jombang dan merupakan upaya sinergi antara

ulama dan pemerintah guna memperhatikan aspek keagamaan tidak hanya untuk pesantren melainkan masyarakat Jombang secara luas.

Selain itu, untuk menambah eratnya relasi dengan ulama Munjidah Selaku Bupati Jombang juga menerapkan progam pendidikan untuk santri maupun masyarakat luas melalui proses distribusi public good dengan menerapkan progam muatan lokal keagamaan. Dalam proses pelaksanaan program muatan lokal melibatkan para ulama pesantren dalam proses distribusi guru pembimbing keagamaan, diantaranya mensyaratkan lulusan pondok pesantren yang fasih dalam membaca Al Qur'an hingga mampu memahami tajwid, dan harus menguasai pego serta baca kitab kuning.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai hubungan ulama dan elit politik, studi ini meletakan fokus kajian pada tiga hal. Pertama, studi ini hendak mengkaji bagaimana bentuk-bentuk dukungan yang diberikan oleh ulama (kyai Hasib Tambakberas) dalam memenangkan pasangan Bupati Munjidah Wahab dan Sumrambah pada pilkada 2018. Kedua, studi ini mengkaji bagaimana dampak dukungan politik ulama terhadap pola relasi antara ulama dan kepala daerah pasca pilkada di Kabupaten Jombang. Ketiga, apa dampak relasi ulama dan elit lokal dalam pembangunan di sektor pendidikan, serta ingin melihat sejauh mana ulama dalam mempengaruhi distribusi public good dalam program pendidikan, baik di lingkup pesantren maupun luar pesantren. Maksud dari sektor pendidikan disini ialah adanya peran ulama yang mempengaruhi terhadap munculnya kebijakan perbup nomor 41 Tahun 2019 mengenai kurikulum muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyah pada sekolah dasar yang dibawah naungan Dinas Pendidikan, yang akhirnya dalam proses pengajaran melibatkan ustad-ustad dari Pondok Pesantren.

Studi ini penting dilakukan dengan dua pertimbangan, yaitu secara teoritis studi ini akan memperkuat argument-argumen yang dikembangkan oleh sarjana Ferdi dan Edward Aspinall tentang politik lokal yang bekerja di dalam politik klientelisme di Indonesia, khususnya dalam tingkat lokal di Kabupaten Jombang pasca reformasi. Sedangkan secara praktis studi ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat Kabupaten Jombang bahwa adanya ulama mempunyai peran selain dukungan politik, juga mempunyai pola relasi yang dapat mempengaruhi pembagunan daerah khususnya di sektor pendidikan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk dukungan yang diberikan ulama kepada pasangan Bupati pada Pilkada 2018?
2. Bagaimana pola relasi ulama dan kepala daerah pasca Pilkada di Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana dampak hubungan tersebut terhadap distribusi public good di sektor pendidikan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka memuat tujuan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dukungan yang dilakukan ulama dalam Pilkada
2. Untuk mengetahui pola relasi ulama dan kepala daerah pasca Pilkada
3. Untuk mengetahui dampak relasi terhadap pembangunan daerah di sektor Pendidikan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat Indonesia khususnya pada sub relasi ulama dan politik terhadap dampak pembangunan daerah.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai penjelasan relasi ulama dan politik terhadap dampak pembangunan daerah Jombang guna memberikan manfaat untuk masyarakat Jombang.

E. Kajian Pustaka

Dari penelitian sebelumnya sudah banyak yang mengkaji tentang studi ulama dan politik. Namun pada penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dalam penggunaan landasan teori penelitian, metode penelitian, maupun objek penelitian. Oleh karena itu, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan peneliti

terdahulu dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun berikut ini topik yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Ulama dan Politik

   Studi tentang ulama dan politik mempunyai pisau analisis yang tajam dan memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi langkah kedepan sehingga aktif dalam keikutsertaan politik praktis (Nasution, 2017). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Burdah (2019); Harahap & Idris (2020); Saifudin (2024); dan Nurlina (2022).

   Studi yang dilakukan oleh Burdah (2019) berkaitan dengan ulama dan politik, melihat secara luas penduduk Indonesia yang mayoritas dengan status agama Islam sehingga adanya peranan ulama tidak dapat dipisahkan, secara legitimasi ulama telah menunjukkan bahwa aktor penting yang mempunyai pengaruh terhadap peran politik, sosial, bahkan kultur keagamaan terhadap masyarakat secara luas. Dalam studi lain juga oleh Harahap & Idris (2020) dalam pemikiran politik Islam ulama, bahwa ulama mempunyai power yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat maupun pemerintah yang mampu mengarahkan pilihan politik nya sehingga dapat membangun jiwa semangat yang besar dalam memperjuangkan hak-hak nya melalui keterlibatan terhadap dukungan politik, hal ini juga dibuktikan oleh Gerakan politik Tuan Arsyad beliau salah satu inisiator munculnya undang-undang anti radikalisme dan melarang adanya PKI. Selain itu juga dalam studi lain oleh Khamdan (2024) ulama memiliki kekuatan yang signifikan dalam perpolitikan sehingga bermain penting dalam memperjuangkan hak umat islam yang diwakili. Studi selanjutnya yang dilakukan oleh Nurlina (2022) bahwa peran ulama NU dalam perjuangan politik yang secara moral dan politik tetap menjaga cita-cita nya dalam mempertahankan kemerdekaan, hal ini perjuangan ulama Nu telah dirasakan baik secara lokal maupun nasional dalam menentukan pilihan politiknya dalam memilih calon pemimpin yang sesuai dengan syariat.

2. Pembangunan Daerah

Studi tentang pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting karena dalam implementasi dalam sebuah kepemimpinan yaitu mewujudkan adanya pembangunan dengan menguatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena pada dasarnya adanya relasi ulama dan politik pastinya tidak lepas dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang telah di rencanakan salah satunya dengan adanya pembangunan daerah yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat yang di wakili oleh para ulama. Oleh karena itu, sangat penting dalam suatu kajian yang paling menarik adalah tentang sejauh mana relasi ulama pasca adanya dukungan politik terhadap elit lokal sehingga mewujudkan adanya suatu pembangunan daerah yang bermanfaat. Adapun beberapa studi penelitian yang dilakukan oleh Mahi (2017); Kholik (2020); Sudianing (2019); Muljanto (2021); Istiyanto (2020); dan Muzakhi (2022) tentang Pembangunan daerah.

Sesuai dengan penelitian Mahi (2017) menjelaskan bahwa pembangunan adalah menciptakan adanya suatu kondisi yang menyediakan banyak pilihan yang konkret untuk mencapai adanya hak aspirasi masyarakat yang humanis. Dengan adanya pembangunan mempunyai arti yang sangat dinamis sehingga menimbulkan jawaban-jawaban yang baru seperti tujuan peningkatan pendidikan yang nantinya memunculkan pertanyaan baru. Dalam penelitian lain oleh Kholik (2020) juga dijelaskan setelah adanya keleluasaan mengenai Otonomi daerah pemerintahan daerah mmpunyai keleluasaan dalam proses pembangunan daerah meskipun dalam beberapa hal masih belum adanya kesiapan sehingga adanya asas pembangunan daerah seringkali terlupakan sehingga berdampak terhadap infrastruktur baik perihal pendidikan maupun kesehatan. Sehingga dijelaskan juga dalam penelitian lain oleh Sudianing (2019) bahwa pentingnya pembangunan daerah untuk mewujudkan adanya pembangunan yang adil guna mengurangi adanya kesenjangan sosial yang diharapkan lebih memihak terhadap masyarakat.

Penelitian lain oleh Muljanto (2021) menjelaskan bagaimana bahwa adanya factor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya pembangunan daerah dimulai dari peningkatan sumber daya manusia

yang berkulitas dengan adanya proses pendidikan yang harus lebih baik. Penelitian lain oleh Istiyanto (2020) menjelaskan bahwa untuk menciptakan sebuah pembangunan yang bagus tidak lepas adanya komunikasi yang harus baik antar stakeholder, yang nantinya ketika melakukan adanya komunikasi pembangunan pastinya adanya umpan balik antara pemerintah dan masyarakat yang nantinya terlibat dalam proses pembangunan, dimulai dari perencanan, hingga proses pembangunan berjalan. Menurut Muzakhi (2022) menjelaskan bahwa perlu adanya tuntutan proses pembangunan daerah yang lebih merata terutama dalam akses penjaminan mutu pendidikan baik dengan memperhatikan jumlah pendidik maupun tenaga pendidik. Karena dengan adanya pendidikan yang layak akan mempersiapkan masyarakat dalam menjawab tantangan zaman secara kritis.

Dengan adanya pembahasan diatas, adanya perbedaan pandangan oleh penelitian terdahulu dan penulis, Penulis terdahulu memfokuskan pada proses peran ulama dan politik dalam mendukung salah satu paslon baik di tingkat lokal maupun nasional, sedangkan ruang lingkup penelitian penulis adalah berfokus pada peran ulama dan politik pasca pemilu dalam Pembangunan daerah di Kabupaten Jombang periode 2018-2023. Karena hal ini sangat menarik selain peran ulama dalam partisipasi dukungan politik juga pasca pemilu ulama juga mempunyai pengaruh terhadap proses pembangunan daerah terutama perihal pendidikan karena melihat latar belakang Kabupaten Jombang dengan jumlah 203 pesantren yang terdaftar dalam Kemenag pastinya ulama juga ikut andil dalam proses penjaminan mutu pendidikan formal maupun non formal.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah penelitian ini, adapun teori yang akan penulis gunakan adalah teori Klientelisme dan teori Historical Institusionalisme. Penulis akan memberikan sebuah penejalasan hal yang paling utama adalah mengenai definisi konseptual serta landasan teori penelitian. Definisi konseptual ini yang nantinya akan memberikan penjelasan hal penting mengenai konsep dari penelitian penulis. Sedangkan landasan teori dijadikan sebagai analiis data dan memperjelasn masalah dalam peneliian yang akan diteliti.

1. **Definisi Konseptual**

   a. **Ulama**

      Ulama merupakan bahasa arab, yang merupakan jamak dari kata ‘alim yang mempunyai makna “tahu atau mengetahui”, maka dari itu makna ulama dapat dipahami bahwa seorang atau kelompok yang memiliki tingkat keilmuan dalam memahami keislaman yang sangat mendalam dan luas. Selain itu ulama memiliki jiwa keihlasan, jujur dalam bertindak. Ulama juga hamba allah yang memiliki ketakwaan yang sangat tinggi, serta iman kepada allah dan takut dalam hal-hal yang dilarang allah. Secara tidak langsung ulama juga orang yang memiliki pemahaman sanga dalam perihal keilmuan tentang hal qauniyah maupun tanziliyah. Dalam bertindak ataupun fatwa yang dikeluarkan pasti atas dasar ijma’ maupun qiyas dengan landasan keilmuan, al-qur’an, hadist, fiqih dan ushul fiqih. Jadi dalam menjawab tantangan zaman ulama mempunyai landasan hokum keislaman yang jelas (Jauhari, 2019).

   b. **Relasi Politik**

      Relasi politik adalah sebuah hubungan dalam alat memperjuangkan, keadilan dan kesejahteraan, yang biasanya pasti relasi politik mempunyai keterkaitan satu sama lain contohnya adanya relasi ulama dan politik yang memiliki keterkaitan tarik menarik dalam sebuah kepentingan, karena ulama mempunyai peran penting dalam mempengaruhi masa terhadap kontestasi politik. Dengan adanya hubungan tersebutlah yang akhirnya mempunyai timbal balik (Ghifari, 2022)

   c. **Elit Lokal**

      Elit lokal adalah sekelompok atau individu orang yang mempunyai jabatan stategis lebih tinggi dari pada yang lain atau mempunyai kewenangan di daerah, dalam hal ini ketika seseorang mempunyai sumber daya dan basis yang kuat nantinya bisa menghantar dalam kekuasaan elit lokal yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi. Elit lokal sendiri antara lain, Kepala Daerah, DPRD, hingga lingkup Kepala Desa, jabatan-jabatan tersebutlah yang dimaksud elit politik lokal (Haryanto, 2009)

d. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegitatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah tertentu. Pembangunan ini mencakup seluruh aspek antara lain, eknomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial di daerah. Salah satunya dalam pembangunan daerah yang dalam sektor Pendidikan ialah melibatkan inisiatif dan program yang dirangcang untuk meningkatkan akses, mutu dan relevansi Pendidikan disuatu daerah, seperti : adanya peningkatan penjaminan mutu guru, pembangunan infrastruktur sekolah seperti perpustakan, aula, dan laboratorium (Zarmaili, 2013).

2. Landasan Teori

Dalam studi penelitian ini, penulis mnggunakan dua teori dalam kerangka berpikir menjawab pertanyaan mengenai relasi ulama dan politik yaitu teori yang digunakan adalah teori Klientelisme, dan teori Historical Institusionalisme.

a. Historical Institutionalisme

Menurut peters (2019) Historical Intitutionalisme ialah cabang dari New Instituonalisme, bahwa adanya New Istitutionalisme hanya mengenai sistem dan output tetapi pengamatan yang menentukan adanya feedback atau input politik. Poin utama adanya kebijakan yang disajokan disini adalah pembahasan mengenai input yang muncul di sistem politik yang lebih jelas menggambarkan bagaimana keputusan dibuat (perilaku) daripada adanya struktur formal atah bahkan output (kebijakan) dari suatu isntitusi tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa adanya lembaga merupakan tempat yang penuh adanya konflik dan tidak dipahami secara seragam new institutionalisme merupakan kritik dari adanya old institutionalisme yang hanya berfokus pada sistem dan produk (output) dari kebijakan. Sistem yang dibahas disini hanya tentang organisasi, peraturan formal, struktur formal, dan standar normative. Sedangkan output adalah suatu kebijakan atau regulasi formal yang mengatur atau dikeluarkan oleh institusi. Pendekatan institutional lama disibukan dngan beban moral yaitu bagaimana institusi mampu bekerja

dengan baik sesuai dengan apa yang telah dibuat dan tidak melibatkan adanya realitas yang terjadi.

Fokus analisis institutionalisme baru mengalami pergeseran dari konsepsi formal tentang institusi menuju informal, konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis, dari bertanggung jawab atas nilai ke posisi kritis terhadap nilai, dari konsepsi holistic berubah menjadi terpisah, dari independensi menjadi kemelekatan (Marsh,2011). Institusi tradisional menggunakan pendekatan deskriptif-induktif, (menarik kesimpulan dari penelitian empiris), dan sementara New Institutionalisme menggunakan pendekatan deduktif, yang pertama kali menganalisis bagaimana dalil institusi berfungsi (Peters, 2019). Berdasarkan poin-poin diatas, institutionalisme yang lebih modern dibangun institutionalisme yang lebih komprehensif dan mendalam dibandingkan dengan pemahaman sebelumnya dari sebelumnya. Dari New Institutionalisme ini memiliki beberapa cabang salah satunya Historical Institutionalisme. Argument inti dari Historical Institutionalisme ialah path dependence (lintasan ketergantungan), kemudian menganggap bahwa sejarah sebagai faktor penting dalam kejadian hari ini.

Historical Institusionalisme menempatkan sejarah dalam konteks yang berbeda dan setiap peristiwa memiliki pengaruh dalam lapisan selanjutnya (Maschab, 2013). Artinya konsep path dependence ini menggambarkan hubungan antara sejarah saat ini dan masa lalu mempunyai keterkaitan pada beberapa proses lapisan waktu. Pada konsep ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan antara hubungan dengan tindakan satu sama lainnya yang waktu dan kemudian membentuk pola perilaku. Historical institutionalisme akan menjadi lebih jelas jika mempertemukan konsep ketergantungan (path dependence) dengan konsep keseimbangan (equilibria). Ternyata pola lintasan ketergantungan merupakan bentuk baru dari keseimbangan institusi sebagai respon terhadap perubahan struktur jaringan politik disekitarnya.

Dengan demikian mengenai Historical Institutionalisme dengan pendekatan membaca mengenai bahwa adanya proses masa lampau

memiliki dampak hinga masa kini, diharap dengan adanya teori tersebut mampu menjawab mengenai penelitian penulis mengenai ulama dalam peran politiknya yang mempunyai lintasan ktergantungan denga sebuah lembaga atau kepala daerah yang akhirnya mempunyai keseimbangan dalam melakukan sebuah output politik. Karena pada dasarnya dengan suatu yang terjadi masa kini dimana ulama dan kepala daerah mampu membangun dukungan-dukungan politik sudah terbangun dari masa lampau yang berdampak hingga masa kini, pastinya dengan proses kedekatan tersebut juga memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan yang menguntungkan bagi sebuah institusi yang dimilikinya, salah satunya dalam dunia Pendidikan.

b. Klientelisme

Teori Klientelisme yang dikembangkan oleh Aspinal & Berenscot (2019). Klientelisme sendiri merupakan praktik politik dimana pemimpin atau partai politik memberikan keuntungan atau bantuan materi kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Bentuk bantuan tersebut dapat berupa uang, pekerjaan, perlindungan hukum, atau jasa lainnya. Klientelisme sendiri sering dianggap sebagai bentuk korupsi politik karena melanggar prinsip keadilan dan merusak integritas proses demokrasi. Studi mengenai klientelisme sendiri mengalami tiga fase dimana fase pertama pada tahun 1960-an dan 1970-an, para perintis intelek, mayoritas dari mereka merupakan kaum antropolog yang membidangi di wilayah asia tenggara, kebanyakan dari mereka menduduki wilayah agraris. Mengamati antara patron-klien yang dijadikan ciri khas relasi antara tuan takur dan para buruh tani yang menggaraplahan dari tuan takur, masyarakat inilah yang mulai memasuki ranah politik secara luas. Yang dimana awalnya para buruh tani bergantung pertolongan kepada tuan takur untuk memberikan bantuan sehingga acap kali tuan takur mengeksploitasi mereka.

Fase kedua klientelisme mulai berkembang pada tahun 1980-an dan awal 1990-an. Pada periode tersebut, membahas mengenai klientelisme sebagai strategi dalam memobilisasi politik dengan melibatkan jaringan klientelisme yang mencakup berbagai segmen, kelompok, dan partai politik (Roniger 2004). Fase ketiga studi mengenai klientelisme mulai

berkembang pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, dimana fokus kajian tersebut mengenai keterkaitannya antar masyarakat sipil, instirusi informal, dan relasi antar warga negara dengan politisi (Kitschelt & Wilkinson 2007).

Dalam tiga fase tersebut, mulai berkembang definisi mengenai klientelisme. Secara umum, definisi konsep klientelisme dibagi menjadi dua, yaitu definisi bersifat makro dan bersifat mikro. Briquet (2007) mengartikan klientelisme sebagai suatu relasi antar individu yang memiliki status tak setara (patron dan klien) yang melibatkan pertukaran timbal balik antara barang dan pelayanan berdasarkan jaringan personal yang dirasakan keduanya sebagai kewajiban moral. Sedangkan secara mikro lebih fokus terhadap pertukaran barang atau pelayanan sosial untuk dapat dukungan politik. Piattoni (2001) mengartikan klientelisme merupakan pertukaran antar suara pemilih atau bentuk dukungan politik untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan.

Definisi mengenai konsep klientelisme bersifat makro mencakup dua bentuk klientelisme yang secara konseptual disampaikan oleh Weingrod (1998), yaitu klientelisme dua arah yang bersifat tradisional (traditional dyadic clientelism) dan klientelisme yang memiliki keterkaitan dengan partai politik (political party-directed clientelism). Dalam hal distribusi perlindungan sosial, bentuk klientelisme yang pertama mengacu pada suatu jaringan klientelis yang dibangun oleh patron yang secara informal memberikan perlindungan sosial untuk anggota masyarakat miskin yang berstatus sebagai klien. Selain itu, bentuk klienelisme yang kedua mengacu pada suatu mekanisme ketika politisi memberikan pelayanan sosial atau berbagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin (Weingrod 1968).

Definisi mengenai klientelisme yang bersifat makro juga mencakup penggunaan konsep klientalisme untuk menganalisis praktik illegal. Konsep klientelisme sendiri seringkali dianggap tidak jauh beda dengan arti patronase. Konsep patronase sendiri memiliki arti sebagai bentuk hubungan dua arah ketika seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan sumber dayanya untuk melindungi orang dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien),

yang memberikan bantuan dan mendukung patron. Konsep broker yang juga dikenal dengan konsep middleman dan mediator diperkenalkan oleh Eric Wolf (1965). Dalam hal ini, konsep broker diartikan sebagai orang yang menjembatani relasi antar anggota komunitas yang kurang memiliki akses untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berada di luar komunitasnya dan mereka yang berada di luar komunitas yang memiliki jaringan yang luas (Sumarto, 2018).

Seiring berjalannya waktu adanya loyalitas tersebut mulai masuk keranah politik secara formal antara tuan takur kepada orang-orang yang telah dipercaya atau bahkan kepada birokrat muda, kaum professional, dan pemimpin partai yang menggeser posisi tuan takur. James Scot (1972), misalnya dikenal dengan bentuk penelitian adanya relasi tuan takur dan buruh tani yang dimana di ilustrasikan sebagai awal mula terbentuknya pemilih dan politisi. Dimana para buruh tani memberikan jasa garap terhadap tuan takur dan imbalan yang didapatkan oleh buruh tani bentuk bantuan perlindungan apabila mengalami kesulitan dan juga mendapatkan jaminan keamanan dalam kehidupannya. Hal ini terjadi ketika pemilihan umum para klien memiliki sumber daya politik baru, karena dengan adanya mengakomodir bahkan menahan suaranya bisa menentukan nasib calon untuk menduduki yang akan dicapainya.

Demikian yang menjadi adanya klientelisme yang mulai beradaptasi antara para calon politisi dan pemilih dalam memberikan timbal balik diambil antara ilustrasi relasi tuan takur dan buruh tani. Oleh karena itu, hal ini terjadi dalam pemilu di Indonesia dimana sejak zaman kerajaan yang masyarakat mulai tergantung terhadap gaya pemerintahan yang personalistik (Nordholt, 2015). Para ilmuan memandang dengan adanya klientelisme sendiri bentuk dari relasi sosial yang khusus. Misalnya yang dikutip oleh Lemarchard dan Legg, klientelisme politik sendiri merupakan jenis hubungan yang kurang lebih antara para aktor dan klien nantinya memiliki asas manfaat timbal balik (Lemarchand dan Legg, 1972). Sedangkan klientelisme sendiri terbagi menjadi tiga gelombang yaitu, Kulturalis, Marketis, dan Institusionalis.

Gelombang pertama yakni Kulturalis bagaimana dengan adanya norma sosial dan ide tersebut membentuk relasi antara patron dan klien.

Para ilmuan seringkali mengamati dengan adanya pendekatan ini bahwa adanya harapan timbal balik antara para pihak elit politik yang didukung oleh nilai-nilai dan ritual dalam komunitas yang bersangkutan (Scott, 1972). Hal ini berakibat terhadap penekanan kultural sediri yang akhirnya memunculkan kebiasaan timbal balik yang akhirnya menjadi tradisi (Lawson, G, 2014). Hal ini klientelisme kultural sendiri seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai budaya dan tradisional yang lazim di masyarakat. Tradisi patron-klien, dimana hubungan antara patron dan klien didasarkan pada pengabdian, dan pengembalian. Sehingga simbolis klientelisme sendiri secara kultur memperkuat hubungan patron dan klien. Hal ini mencakup symbol kekuasaan, ritual keagamaan yang digunakan untuk menjaga hubungan dan menegaskan pelindung, dan juga berdampak terhadap kebijakan dalam praktik ini seringkali memperhatikan nilai-nilai budaya lokal misalnya dengan adanya pendistribusi bansos atau proyek pembangunan acap kali mempertimbangkan relasi sosial dan hubungan pribadi.

Gelombang kedua yakni marketis dimana politisi menekankan dengan melihat adanya perhitungan mengenai biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapat dengan adanya pertukaran klientelis. Pemahaman ini mempengaruhi rasionalitas perilaku politik, yang dimana masyarakat menggunakan suara untuk memaksimalkan sumber daya yang telah ditawarkan ketika memenangkan pemilihan umum, sebaliknya politisi juga menawarkan secara maksimal agar mempengaruhi suaranya pada saat pemilu (Kramon, 2016). Secara tidak langsung dengan adanya klientelisme market melalui pasar dan politik mampu mengurangi praktik klien itu sendiri.

Gelombang ketiga yakni institusionalis dimana membentuk isnttitusi negara, memberikan penegasan, bahkan diharapkan bisa mengalangi bagi para politisi yang berupaya mengarah terhadap praktik-praktik klientelis, yang nantinya negara mampu keluar dari praktik klientelis atau bahkan sebaliknya terjebak dalam klientelis yang semakin mengakar (Kenny, 2015). Hal ini mampu mengurangi klientelisme politik ketika negara atau para birokrat mempunyai banyaj waktu yang cukup untuk menjadi otonom yang kuat. Sebaliknya jiga institusi tidak kuat adanya praktik klientelis

sendiri terjadi lembaga pemerintahan salah satunya denga perihal alokasi anggaran, bahkan jual beli jabatan pun terjadi dalam proses klientelis.

Dalam hal ini penelitian mengenai ulama dan politik dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah diharapkan mampu terjawab dalam teori klintelisme, karena acap kali dipandang klientelisme hanya perihal bantuan yang secara pragmatis dan menguntungkan individu akan tetapi dalam penelitian ini selain menguntungkan terhadap personal juga memberikan manfaat terhadap sektor pendidikan baik dari pengajar, infrastruktur maupun siswa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penulisan penelitian yang bersifat studi kasus dengan menggunakan analisis dari suatu kejadian yang hendak dijadikan sebagai objek permasalahan dalam penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif untuk mengkaji suatu peristiwa sosial politik. Dalam pendekatan studi kasus, tidak hanya berbentuk narasi, melainkan juga membahas tentang observasi secara tidak langsung, wawancara secara langsung, dan dokumentasi dari data-data yang telah di dapatkan dari hasil proses penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan didukung oleh pendekatan studi kasus, yaitu single kasus dengan menggunakan satu fenomena disebabkan karena dalam penelitian ini bersifat untuk menggali atas pertannyaan-pertannyaan penelitian yang ada sebagai upaya untuk memahami secara mendalam pertanyaan penelitian hingga menemukan jawaban dari hasil penelitian (Creswell, 2007).

Sehingga fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Adanya peran ulama dan politik terhadap relasi politik ulama dan elit lokal di Kabupaten Jombang 2018-2023. Oleh karena itu, jenis penelitian ini berbentuk Field Research yang berarti penelitian lapangan. Dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti berusaha untuk menganalisis fenomena kejadian di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari hasil penelitian (Creswell,2007).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, adapun sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi data yang akurat antara lain adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan. Sehingga, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil informasi dari proses wawancara secara langsung dan observasi secara tidak langsung. Dimana dalam wawancara yang akan ditemukan adalah mengenai informai atas permasalahan pertanyaan penelitian untuk membantu peneliti dalam menjawab hasil pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan, observasi secara tidak langsung dalam penelitian ini yang dihasilkan adalah dokumen sebagai bahan untuk menganalisis jawaban penelitian (Creswell, 2007).

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam penelitian oleh peneliti tidak didapatkan secara langsung dari pihak informan di lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang didapatkan dari buku, jurnal penelitian, dan artikel penelitian yang relevan sesuai tema penelitian (Creswell, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Wawancara ialah cara untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dieksekusi dengan melalui tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah serta dengan tujuan yang sudah ditemukan. Wawancara tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Penelitian ini mempunyai beberapa narasumber sebagai informan antara lain pihak ulama(KH. Hasib, KH. Wafi, KH. Abdussalam Shohib, dan KH. Wahab), Ibu Alfiyah Ashmad (Staf Ahli Bupati), Ibu Munjidah Wahab, Supartini, Geny Dinas Pendidikan, Ibu Eka dan Pak Edwin Bappeda, Ibu Is orang wali murid,

Dwi Ramadhan timses Munjidah, Farhan (Pemuda Jombang), Sabilul Aslam (Politisi Muda), Gus Haidar Dprd PPP, H. Machin Dprd Gerindra, Gus Atho Dpr Prov PKB, Ustad Umar, Ustad Rafif (pengurus pondok), Pak Mahrus Ali, Pak Soleh, Pak Nurrohman (Guru Pembimbing muatan lokal).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebagai suatu hal khusus yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, serta penyebaran dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan dokumen, foto wawancara, foto dukungan ulama dala pilkada, foto anggaran pendidikan muatan lokal keagamaan yang berkaitan dengan situasi menggambarkan kondisi ulama dan elit lokal di Kabupaten Jombang.

4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam metode menguji keabsahan data adalah teknik yang digunakan untuk metode pengecekan informasi dari berbagai sumber yang dihasilkan oleh peneliti. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data secara valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya (Creswell, 2007). Di bawah ini merupakan teknik pengecekan keabsahan data menurut Creswell (2007) adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Data

Merupakan cara untuk mencari data dari suatu sumber yang beragam ada kaitannya satu sama lain. Tujuan triangulasi sumber data adalah untuk menggali kebenaran dari suatu informasi tertentu, biasanya sumber yang dipakai adalah berupa seperti dokumentasi berupa foto/dokumen berkaitan dengan penelitian, hasil wawancara penelitian, dan hasil observasi pengamatan di lapangan. Sehingga, dapat menghasilkan analisis yang tepat sesuai dengan jawaban penelitian.

b. Member Checking

Pada bagian ini memuat tentang tahapan peneliti untuk mencari kembali kebenaran informasi dari hasil interpretasi data tentang realitas di lapangan dengan informasi yang sudah didapatkan.

c. Waktu Observasi Di Lapangan

Waktu dalam suatu penelitian sangat menentukan valid tidaknya informasi yang didapatkan. Dengan waktu yang lama diharapkan oleh peneliti untuk dapat memberikan dan memahami fenomena kejadian di lapangan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dianalisis sesuai dengan data yang akurat.

d. Pemeriksaan Sesama Peneliti

Melalui pemeriksaan dengan sesame peneliti merupakan sebagai langkah untuk mendapatkan informasi seacra valid. Dimana dengan cara diskusi sesama teman peneliti mengenai hasil yang telah diperoleh. Adapun pemeriksaan data dari hasil penelitian bisa dilakukan dengan orang yang berwawasan dibidangnya ataupun dengan tenaga pengajar seperti dosen pembimbing penelitian.

e. Pola Partisipatoris

Pada tahapan penelitian ini peneliti harus melibatkan informan guna untuk mendapatkan data secara akurat melalui proses penyusunan penelitian sampai pada tahapan terakhir, yaitu kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu cara menganalisis data penelitian menjadi sebuah informasi yang digunakan nantinya untuk pedoman dalam melakukan pengembangan dari hasil data tersebut. Sehingga, teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan cara analisis yang bersifat deskriptif atau berupa gambaran secara umum yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu melalui beberapa tahapan. Adapun penelitian ini menggunakan pengumpulan data, sebagai berikut (Creswell, 2007).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari sebuah data lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil data sebagai bentuk untuk menjawab pertannyaan-pertannyaan dalam permasalahan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan untuk menyederhanakan data kasar yang didapat dari catatan-catatan yang tertulis dalam kondisi di lapangan. Dimana reduksi data digunakan untuk memilih data yang penting untuk diperlukan dalam penelitain dan data yang harus dibuang (diseleksi). Hal ini bermaksud untuk mendapatkan hasil dari informasi yang penting, sehingga memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan bertujuan untuk pengemasan suatu data agar mudah untuk dipahami dengan hal ini dalam menganalisis disesuaikan tujuan yang hendak diinginkan. Maka dari itu,bentuk dari penyajian data adalah berupa laporan. Laporan tersebut dianalisis secara deskriptif analitik dan logis yang mengarah pada hasil kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memahami dan mencari makna atau pola-pola serta penjelasan dalam alur sebab akibat. Cara penarikan kesimpulan penelitian ini adalah dengan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara dari suatu hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum (Creswell, 2007).

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka penulisan rencana penelitian yang disesuaikan dengan pola penulisan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pokok masalah yang akan diteliti serta menemukan pencarian data penelitian dengan mudah. Dalam sistematika penelitian terdiri dari 6 bab, antara lain Bab I berisi pendahuluan, Bab II berisi tentang kerangka teori dalam penelitian, Bab III berisi tentang landscape wilayah atau lokasi yang digunakan dalam penelitian, Bab IV dan Bab V berisi tentang pertanyaan penelitian, dan Bab VI berisi tentang penutup/kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tuhuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika dalam penulisan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, berisi mengenai penjelasan teori penelitian yaitu teori klientalisme yang dikembangkan oleh Edward Aspinal dan Ward Berenschot. Teori ini digunakan untuk menganalisis Ulama dan Politik studi relasi ulama politik dan elit local dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jombang, yaitu bagaimana peran ulama dan elit lokal dalam kolaborasi pembangunan daerah Jombang salah satunya perihal Pendidikan.

BAB III LANDSCAPE KABUPATEN JOMBANG

Bab ini menjelaskan mengenai profil desa yang akan dijadikan instrument dalam penelitian. Profil ini memuat tentang kondisi atau keadaan tempat penelitian, yaitu di Kabupaten Jombang.

BAB IV BENTUK DUKUNGAN YANG DILAKUKAN ULAMA DALAM PILKADA

Bab ini menjelaskan sejarah ulama dan politik, serta bagaimana mekanisme ulama dalam melakukan dukungan politik terhadap paslon di pilkada Kabupaten Jombang.

BAB V POLA RELASI ULAMA DAN KEPALA DAERAH PASCA PILKADA

Bab ini berisi tentang bagaimana pola relasi ulama dan kepala daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah pasca adanya kontestasi politik pemilihan kepala daerah melalui proses klintelisme dan historical institutionalism

BAB VI DAMPAK RELASI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI SEKTOR PENDIDIKAN

Bab ini berisi tentang bagaimana dampak adanya relasi terhadap pembangunan di sector Pendidikan pasca adanya kontestasi politik

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil data-data keseluruhan dalam penelitian yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian. Selain itu, kesimpulan ini juga berisikan tentang sarana untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KERANGKA TEORI

Bab ini membahas mengenai definisi konseptual dan landasan teoritik dalam teori Klientelisme Oleh Edward Aspinal dan Historical Institusionalisme Oleh Pieters. Teori-teori ini digunakan untuk menganalisis relasi ulama dan elit politik di Kabupaten Jombang.

A. Landasan Teoritik

1. Historical Institutionalisme

Menurut peters (2019) Historical Intitutionalisme ialah cabang dari New Instituonalisme, bahwa adanya New Istitutionalisme hanya mengenai sistem dan output tetapi pengamatan yang menentukan adanya feedback atau input politik. Poin utama adanya kebijakan yang disajokan disini adalah pembahasan mengenai input yang muncul di sistem politik yang lebih jelas menggambarkan bagaimana keputusan dibuat (perilaku) daripada adanya struktur formal atah bahkan output (kebijakan) dari suatu isntitusi tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa adanya lembaga merupakan tempat yang penuh adanya konflik dan tidak dipahami secara seragam new institutionalisme merupakan kritik dari adanya old institutionalisme yang hanya berfokus pada sistem dan produk (output) dari kebijakan. Sistem yang dibahas disini hanya tentang organisasi, peraturan formal, struktur formal, dan standar normative. Sedangkan output adalah suatu kebijakan atau regulasi formal yang mengatur atau dikeluarkan oleh institusi. Pendekatan institutional lama disibukan dngan beban moral yaitu bagaimana institusi mampu bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah dibuat dan tidak melibatkan adanya realitas yang terjadi.

Fokus analisis institutionalisme baru mengalami pergeseran dari konsepsi formal tentang institusi menuju informal, konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis, dari bertanggung jawab atas nilai ke posisi kritis terhadap nilai, dari konsepsi holistic berubah menjadi terpisah, dari independensi menjadi kemelekatan (Marsh,2011). Institusi tradisional menggunakan pendekatan deskriptif-induktif, (menarik kesimpulan dari penelitian empiris), dan sementara New

Institutionalisme menggunakan pendekatan deduktif, yang pertama kali menganalisis bagaimana dalil institusi berfungsi (Peters, 2019). Berdasarkan poin-poin diatas, institutionalisme yang lebih modern dibangun institutionalisme yang lebih komprehensif dan mendalam dibandingkan dengan pemahaman sebelumnya dari sebelumnya. Dari New Institutionalisme ini memiliki beberapa cabang salah satunya Historical Institutionalisme. Argument inti dari Historical Institutionalisme ialah path dependence (lintasan ketergantungan), kemudian menganggap bahwa sejarah sebagai faktor penting dalam kejadian hari ini.

Historical Institusionalisme menempatkan sejarah dalam konteks yang berbeda dan setiap peristiwa memiliki pengaruh dalam lapisan selanjutnya (Maschab, 2013). Artinya konsep path dependence ini menggambarkan hubungan antara sejarah saat ini dan masa lalu mempunyai keterkaitan pada beberapa proses lapisan waktu. Pada konsep ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan antara hubungan dengan tindakan satu sama lainnya yang waktu dan kemudian membentuk pola perilaku. Historical institutionalisme akan menjadi lebih jelas jika mempertemukan konsep ketergantungan (path dependence) dengan konsep keseimbangan (equilibria). Ternyata pola lintasan ketergantungan merupakan bentuk baru dari keseimbangan institusi sebagai respon terhadap perubahan struktur jaringan politik disekitarnya.

Dari penjelasan diatas pada dasarnya dalam melihat perubahan suatu institusi harus lebih berhati-hati dikarenakan jika suatu isntitusi pada kondisi keseimbangan (equilibra) maka akan cenderung ada usaha mempertahankan status quo sehingga kondisinya akan seperti itu sampai ada penanda besar menggesernya untuk ada perubahan. Menurut Skocpol (2002) menerangkan bahwa perubahan suatu institusi terkadang tidak rasional, jarang ditemukan perubahan yang berdasar pada konsep matang, justru muncul secara tiba-tiba dan terlihat alamiah. Faktor internal adanya perubahan itu sendiri terkadang hanya mengikuti perubahan institusi lain yang ada disekitarnya. Lebih lanjut, Skocpol menilai pendekatan ini mendorong berkembangnya metode dan teori

investgas dasar sejarah, tidak melihat pada masa lalu saja tetapi mengamati proses rangkaian waktunya. Senada dengan hal itu, Peters (2019) menjelaskan bahwa pendekatan Historical Insttusionalism dikembangkan dengan sikap ekletik dengan digabungkannya beberapa pendekatan sekaligus.

Menurut penulis karakter ekletik yang dijelaskan di atas menciptakan kelebihannya adalah mampu memberikan penjelasan lebih komprehensif dan kontekstual tentang institusi. Tetap kekurangannya adalah jika proses refleksi ekletik nya tidak tuntas maka akan menjadi keblunderan sendiri. Defnisi institusi cukup sulit untuk dilakukan dalam penelitian ini, karena menempatkan posisi institusi dengan individu pada konsep yang baku. Didalam sebuah institusi tentu ada mekanisme institusi membentuk pola perilaku individu, begitu juga sebaliknya yaitu individu membentuk kembali institusi. Pendekatan ini tidak mengevaluasi pada baik dan benar tapi lebih pada keadaan bagaimana kondisi lembaga, keadaannya bagaimana. Institusi yang mampu beradaptasi adalah institusi yang baik menurut teori ini. Teori ini cenderung menggunakan pendefinisian institusi secara umum seperti gambaran umum lainnya. Formulasi institusi dalam historical institusionalism yaitu penekanan pada pendekatan keberlangsungan sebuah institusi setelah mereka terbentuk. (Bagaimana berlangsung, bagaimana berlanjut) melihat apa yang diawal dan apa yang terjadi sekarang (tidak memperhatikan bagaimana dibntuk diawal). Teori ini sering dipakai untuk menganalisis perkembangan lembaga dan memiliki pemahaman bahwa lembaga lebih luas daripada struktur organisasi. Institusi berubah sebagai sesuatu yang sulit karena konsekuensi dari awal dibentuk. Misalnya, jika ada suatu perubahan maka itu adalah konsekuensi yang ada di awal dibentuknya lembaga, tidak bias dilihat sesuatu yang terpisah dari awal. Pendekatan ini cocok untuk menjelaskan ketahanan suatu institusi.

Dalam historical institusional, juga tidak lepas dengan adanya kerangka berpikir critical juncture (titik kritis). Critical juncture sendiri merupakan sebuah peristiwa yang mengalami situasi tidak pasti sehingga mendorong adanya aktor memiliki peranan penting dalam menentukan

keputusan terhadap kejadian yang dialami. Sehingga adanya keputusan yang dilakukan aktor dampak Panjang terhadap perubahan sejarah. Criticital juncture terjadi ketidakpastian dalam krisis, maupun peubahan skala besar. Adanya perubahan sendiri dapat tejadi pada ekonomi, poltik, perang, revolusi, bencana alam, bahkan adanya transsi pemerintahan, sehingga keadaan ini mempengaruhi ketegangan baik individu maupun kelompok untuk membuat sebuah pilihan keputusan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dalam hal ini, aktor politik maupun sosial seperti elit, pemerintah, bahkan gerakan sosial memiliki kekuatan yang kuat untuk menciptakan masa depan, karena mereka-mereka yang memiliki kebebasan besr untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil inilah penting dalam membentuk jangka Panjang, sehingga dengan pilihan-pilihan keputusan mengarrah terhadap path dependence, sehingga suatu hal yang dipilih semakin sulit untuk berbalik. Meskipun critical juncture biasanya terjadi secara singkat, akan tetapi keputusan tersebut mampu mempengaruhi sejarah Panjang. Contoh yang terjadi pada reformasi 1998 yang akhirnya dapat mempengaruhi adanya ekonomi, politik, bahkan perpindahan kepemimpinan otoriter menjad demokrasi yang akhirnya system politik demokrasi terjadi hingga sekarang. Hal ini juga erjadi dalam pola relasi ulama dan elit lokal daerah Jombang memiliki secara Panjang di era sebelum reformasi, adanya peran politik ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan keputusan ulama dalam RUU pernikahan, sehingga [utusan tersebut mempengaruhi sejarah terhadap para pengikutnya, selain befikir mumpuni dalam ilmu agama, bahwa sebagai ulama atau santri juga perlu andil dalam dunia politik sehingga dapat memengauhi sebuah kebijakan sesuai dengan syariat islam. Keputusan-keputusan inilah merupakan sebuah kebijakan yang memiliki path dependence sehingga memiliki proses sejarah panjang adanya ulama memiliki pengaruh baik dengan eli lokal maupun para pengikutnya.

Dengan demikian mengenai Historical Institutionalisme dengan pendekatan membaca mengenai bahwa adanya proses masa lampau memiliki dampak hinga masa kini, diharap dengan adanya teori tersebut mampu menjawab mengenai penelitian penulis mengenai ulama dalam

peran politiknya yang mempunyai lintasan ketergantungan dengan sebuah lembaga atau kepala daerah yang akhirnya mempunyai keseimbangan dalam melakukan sebuah output politik. Karena pada dasarnya dengan suatu yang terjadi masa kini dimana ulama dan kepala daerah mampu membangun dukungan-dukungan politik sudah terbangun dari masa lampau yang berdampak hingga masa kini, pastinya dengan proses kedekatan tersebut juga memiliki pengaruh terhadap suatu kebijakan yang menguntungkan bagi sebuah institusi yang dimilikinya, salah satunya dalam dunia Pendidikan.

2. Klientelisme

Konsep klientelisme yang dikembangkan dalam skripsi ini di rujuk dari gagasan Edward Aspinall & Berenscot (2019). Klientelisme sendiri merupakan praktik politik dimana pemimpin atau partai politik memberikan keuntungan atau bantuan materi kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Bentuk bantuan tersebut dapat berupa uang, pekerjaan, perlindungan hukum, atau jasa lainnya. Klientelisme sendiri sering dianggap sebagai bentuk korupsi politik karena melanggar prinsip keadilan dan merusak integritas proses demokrasi. Studi mengenai klientelisme sendiri mengalami tiga fase dimana fase pertama pada tahun 1960-an dan 1970-an, para perintis intelek, mayoritas dari mereka merupakan kaum antropolog yang membidangi di wilayah asia tenggara, kebanyakan dari mereka menduduki wilayah agraris. Mengamati antara patron-klien yang dijadikan ciri khas relasi antara tuan takur dan para buruh tani yang menggaraplahan dari tuan takur, masyarakat inilah yang mulai memasuki ranah politik secara luas. Yang dimana awalnya para buruh tani bergantung pertolongan kepada tuan takur untuk memberikan bantuan sehingga acap kali tuan takur mengeksploitasi mereka. Fase kedua klientelisme mulai berkembang pada tahun 1980-an dan awal 1990-an. Pada periode tersebut, membahas mengenai klientelisme sebagai strategi dalam memobilisasi politik dengan melibatkan jaringan klientelisme yang mencakup berbagai segmen, kelompok, dan partai politik (Roniger 2004). Fase ketiga studi mengenai klientelisme mulai berkembang pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, dimana fokus kajian tersebut mengenai keterkaitannya antar

masyarakat sipil, instirusi informal, dan relasi antar warga negara dengan politisi (Kitschelt & Wilkinson 2007).

Dalam tiga fase tersebut, mulai berkembang definisi mengenai klientelisme. Secara umum, definisi konsep klientelisme dibagi menjadi dua, yaitu definisi bersifat makro dan bersifat mikro. Briquet (2007) mengartikan klientelisme sebagai suatu relasi antar individu yang memiliki status tak setara (patron dan klien) yang melibatkan pertukaran timbal balik antara barang dan pelayanan berdasarkan jaringan personal yang dirasakan keduanya sebagai kewajiban moral. Sedangkan secara mikro lebih fokus terhadap pertukaran barang atau pelayanan sosial untuk dapat dukungan politik. Piattoni (2001) mengartikan klientelisme merupakan pertukaran antar suara pemilih atau bentuk dukungan politik untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan.

Konsep klientelisme bersifat makro mencakup dua bentuk klientelisme yang secara konseptual disampaikan oleh Weingrod (1998), yaitu klientelisme dua arah yang bersifat tradisional (traditional dyadic clientelism) dan klientelisme yang memiliki keterkaitan dengan partai politik (political party-directed clientelism). Dalam hal distribusi perlindungan sosial, bentuk klientelisme yang pertama mengacu pada suatu jaringan klientelis yang dibangun oleh patron yang secara informal memberikan perlindungan sosial untuk anggota masyarakat miskin yang berstatus sebagai klien. Selain itu, bentuk klienelisme yang kedua mengacu pada suatu mekanisme ketika politisi memberikan pelayanan sosial atau berbagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin (Weingrod 1968).

Klientelisme yang bersifat makro juga mencakup penggunaan konsep klientalisme untuk menganalisis praktik illegal. Konsep klientelisme sendiri seringkali dianggap tidak jauh beda dengan arti patronase. Konsep patronase sendiri memiliki arti sebagai bentuk hubungan dua arah ketika seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan sumber dayanya untuk melindungi orang dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien), yang memberikan bantuan dan mendukung patron. Konsep broker yang

juga dikenal dengan konsep middleman dan mediator diperkenalkan oleh Eric Wolf (1965). Dalam hal ini, konsep broker diartikan sebagai orang yang menjembatani relasi antar anggota komunitas yang kurang memiliki akses untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berada di luar komunitasnya dan mereka yang berada di luar komunitas yang memiliki jaringan yang luas (Sumarto, 2018).

Broker juga memiliki peranan yang penting dalam mengupayakan membangun struktur jaringan klientelisme dalam skala yang lebih besar. Relasi patron-klien mampu membangun hierarkis yang berbentuk piramida. Dalam jaringan piramida terebut, patron menduduki puncak struktur yang didukung oleh kliennya. Dalam struktur skala besar relasi patron-klien dijembatani oleh broker yang pada satu sisi memiliki peran sebagai patron bagi kliennya dan berfungsi sebagai klien bagi patronnya.

Selain itu, konsep pembelian suara dalam klientelisme diartikan sebagai suatu pertukaran antara barang (kesejahteraan, perlindungan) untuk meraih suara terhadap pemilih (Stokes, 2007). Selain dengan menggunakan barang-barang, pertukaran juga dapat melalui pemberian uang tunai atau pelayanan sosial. Konsep pembelian suara dapat diklasifikasikan dengan dua cara, yaitu pembelian suara secara jumlah yang besar (*wholesale vote buying)* dan pembelian suara secara individu (*retail vote buying*). Dalam pembelian secara jumlah besar, politisi memberikan janji kepada pemilihnya bahwa nanti akan dilakukan distribusi kesejahteraan untuk mendapatlan suara pemilih (Stokes, 2007).

Adapun konsep pembelian suara memiliki beberapa model, yaitu pertama, materi yang politisi berikan untuk ditukar dengan suara pemilih dibagikan dengan beberapa hari atau beberapa jam menuju pemilihan umum, bukan diberikan pasca pemilihan umum. Kedua, yang menjadi sasaran penerima materi yang ditukarkan dengan hak pilih tertuju pada individua tau rumah tangga, justru tidak tertuju pada kelompok maupun komunitas. Ketiga, materi yang digunakan untuk membeli suara ialah berupa barang privat *(privat goods*) atau bentuk barang public yang di personalisasi *(personalized public goods*). Keempat, yang menjadi kritera bagi politisi dalam membeli suara untuk mendapatkan hak pilih adalah "Apakah anda nantinya memilih saya?" (Stokes, 2007).

Secara harfiah, pastinya dalam konsep pembelian suara melibatkan "pasar dukungan politik" *(electoral market*) dengan "pembeli suara" (*vote buying*) berupa pemberian barang atau jasa yang diinginkan oleh penjual suara (*vote sellers*) dan penjual suara memberikan suaranya sebagai bentuk imbalan atas barang atau jasa yang telah diterima. Pasar dukungan politik sendiri meliputi dua hal, yaitu adanya barang-barang yang bersifat privat ditukar dengan suara pemilih (*private-goods electoral markets*) dan pasar barang secara public ditukar dengan hak pilih (*public-goods electoral markets*). Dalam jenis pasar yang pertama, politisi membeli hak pilihnya dengan cara menukar dengan bentuk barang privat yang berupa uang atau barang. Uang atau barang tersebut merupakan kepemilikan pribadi politisi. Sedangkan jenis pasar yang kedua, politisi membeli hak pilihnya dengan cara menukar barang publik (*public goods*) dengan suara pemilihnya. Barang publik yang dimaksud disini berupa program sosial yang diberikan terhadap si pemilih (Desposato, 2007).

Pasar dukungan politik sendiri tidak akan hadr dalam ruang hampa tanpa adanya melibatkan syarat, tetapi muncul dengan adanya syarat bahwa pembeli suara dianggap dapat memberikan kontrol terhadap pemilih. Karena dengan adanya kontrol terhadap pemilih bersifat penting yang nantinya antara penjual dan pembeli suara akan mendapatkan tekanan secara langsung yang dihadapkan dengan dampak sosial psikologis. Karena pada dasarnya politisi pun tidak memiliki instrument yang pasti dalam memberikan sebuah jaminan ketika politisi uang atau bentuk barang yang bersifat program sosial pada pemilih, pemilih akan memberikan dukungannya terhadap politisi. begitupun sebaliknya, penerima penjual suara berfikir bahwa dengan adanya pemberian uang atau bentuk pelayanan sosial yang diberikan oleh politisi dianggap dengan secara sukarela atau kebaikan hati politisi tanpa adanya ikatan politik, yaitu kewajiban resiprokal (timbal balik) untuk memberikan suaranya terhadap politisi. Melalui mekanisme sistem kontrol, politisi dapat memperoleh kepatuhan dari penjual suara sehingga penjual suara berkomitmen memberikan suaranya secara hubungan timbal balik setelah adanya proses pembelian suara dengan memberikan uang atau barang, bahkan pelayanan sosial terhadap penjual suara.

Pertukaran secara transaksional antar suara dan barang public selain adanya keterkaitan dengan konsep pembelian suara, juga sulit dipisahkan dengan adanya konsep *pork barrel* dan mobilisasi politik dengan menggunakan cara pemberian program sosial (*programmatic mobilization*). Untuk memahami lebih dalam konsep jual beli suara utuh, sangat penting untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan antara konsep tersebut dengan konsep *pork barrel* dan mobilisasi dengan cara memberikan program sosial (Stokes, 2007).

Pork barrel juga seringkali dimaknai sebagai politik dstribusi (*distribution politics*) dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemberian bantuan materi dalam bentuk kontruk hibah, atau proyek pekerjaan umum ke kabupaten/kota dari pejabat yang terpilih. Secara umum, dapat dimaknai bahwa pork barrel berkelompok dengan proyek pekerjaan publik, seperti proyek perbaikan jalan, perbaikan fasilitas umum yang berada di sekitar sungai bahkan perbaikan pelabuhan. Proyek-proyek yang berkaitan dengan perbaikan fasilitas publik inilah yang diklaim sebagai contoh klasik pork barrel yang seringkali dibahas melalui kajian-kajian berupa politik pork barrel. Hal ini bukan berarti ketika membahas mengenai pork barrel hanya membahas perihal proyek-proyek berupa fasilitas publik melainkan berbicara mengenai pork barrel juga bisa berupa pemberian jaminan kesejahteraan (Magaloni dan Stokes, 2007).

Dengan adanya distribusi proyek pork barrel inilah upaya politisi dalam memanfaatkan meraih suara secara banyak untuk memenangkan pemilu dan untuk membentuk koalisi politik antara parpol penguasa dan parpol yang masih dalam jangkauan relasi klientelisnya. Secara umum, sebagaimana digambarkan dalam table berikut, yang dijadikan target penerima pork barrel adalah kabupaten, karena anggaran pembangunan proyek pork barrel di danai oleh pemerintah yang didapatkan melalui hasil pembayaran pajak atau pendapatan daerah. Perlu digaris bawahi bahwa mengenai konsep pork barrel, adanya pembangunan fasilitas bentuk fisik maupun non fisik berupa kesejahteraan dilaksanakan pasca pemilu. Maka dari itu, politisi memilih para konstituennya sebagai penerima proyek pork barrel atau program sosial dengan memastikan sipenjual tinggal di kabupaten tempat politisi tersebut (Stokes, 2007).

Table 1 Perbedaan antara pembelian suara, pork barrel, dan mobilisasi politik menggunakan program sosial

Strategi Politik	**Cakupan Sasaran Program**	**Waktu distribusi**	**Produk yang Dipertukarkan**	**Kriteria Memilih Penerima**
Pembelian suara	Indvidu/rumah tangga	Sebelum Pemilu	Barang privat/barang publik yang dipersonalisasi	Apakah anda akan memilih saya?
Pork barrel	Wilayah	Setelah Pemilu	Program Pemerintah	Apakah anda tinggal di kabupaten saya?
Mobilisasi politik menggunakan program sosial	Kelompok sosial pemilih (missal, pemilih tidak berpenghasilan tetap, mereka yang pensiun)	Setelah Pemilu	Program Pemerintah	Apakah anda termasuk dalam suatu kelompok penerima bantuan sosial?

Sumber: Desposato 2007; Hicken 2007; Stokes 2007

Terkait dengan adanya mobilisasi politik menggunakan program sosial, konsep ini dapat dimaknai sebagai upaya yang dijanjikan politisi kepada konstituen dengan memberikan fasilitas/barang public (misalnya, keamanan nasional, udara bersih) atau memberikan perlindungan sosial

untuk semua masyarakat, terlepas kepada siapapun dukungan politiknya (missal, dengan adanya upaya pemerintah membuat kebijakan Pendidikan keagamaan di Sekolah dasar yang nantinya melibatkan guru agama dari kalangan pesantren). Mobilisasi politik menggunakan program sosial yang biasa sering disebut sebagai politik alokasi (allocation policies) dibiayai oleh pemerintah. Sama halnya seperti pork barrel dengan adanya proyek-proyek yang didistribusikan melalui kesejahteraan dengan konsep mobilisasi politik yang menggunakan program sosial juga diralisasikan pasca pemilu. Target penerima distribusi kesejahteraan kelompok sosial yang masih berada dalam kelas sosial tertentu (Stokes, 2007).

Karakteristik lain yang sangat penting dan dapat digunakan untuk membedakan mengenai konsep pembelian suara, pork barrel, dan mobilisasi politik menggunakan program sosial dengan pembelian barang privat untuk membeli suara, sementara pork barrel dan mobilisasi politik lebih menggunakan program sosial menggunakan barang publik. Walaupun dalam membeli suara seharusnya hanya dibatasi pada bentuk-bentuk transaksi antara penjual dan pembeli suara menggunakan barang privat, politisi yang memenangkan dalam pertarungan pemilu dengan memanfaatkan program sosial untuk mendukung tujuan politiknya dalam meraih kemenangan kembali pada pemilu berikutnya. Para politisi seringkali memanfaatkan sumber daya milik pemerintah dan mendistribusikan kepada konstituennya dengan menyampaikan tujuan dan pesan politiknya terhadap konstituen bahwa program yang diberikan ialah menggunakan dana pribadi. Hal ini berarti tidak menutup kemungkinan para politisi yang berkuasa bersama parpolnya ada tindakan manipulasi program-program sosial yang didanai oleh negara dan didistribusikan kepada konstituennya sebagai barang public yang di personalisasikan, kemudian digunakan sebagai upaya meraih suara (Desposato, 2007).

Salah satu cara efektif dalam melakukan personalisasi barang publik adalah dengan adanya klaim politik (credit claming) atas distribusi kesejahteraan sosial. Melalui klaim ini, efektivitas politisi dalam membuat pernyataan terhadap publik bahwa program pemerintah yang didistribusikan kesejahteraan sosial merupakan jerih payah individu dan bukan hasil dari partai politik maupun pemerintah, sehingga para politisi

mengklaim bahwa dengan mewujudkan program yang mensejahterakan rakyat merupakan bagian upaya dirinya menjelang masa jabatannya berakhir, hal ini guna menarik pemilih untuk memilih politisi tersebut dalam pemilu yang akan datang.

Adanya klaim politik atas distribusi kesejahteraan sosial menunjuk pada suatu tindakan yang dilakukan seorang politisi, untuk membangun trust terhadap konstituen bahwa politisi tersebut yang bekerja secara personal, sehingga anggapan masyarakat dalam capaian program pemerintah yang sesusai harapan masyarakat merupakan bagian dari hasil kerja keras politisi tersebut. Karena klaim politik merupakan salah satu upaya untuk memenangkan pemilu. Melihat peranan penting dari klaim politik ini, sebenarnya banyak politisi yang kurang berkontribusi dalam program kerja apapun karena dalam realisasi program kerja banyak politisi yang menyatakan klaim politiknya bahwa mereka telah berupaya tulus dalam realisasi program tersebut, yang kemudian mengarah terhadap munculnya polemik politik antarpolitisi (Beland, 2007).

Dalam hal ini, adanya klaim politik memiliki dua fungsi. Pertama, klaim politik dijadikan sebagai instrument untuk personalisasi barang public. Kedua, klaim tersebut dijadikan sebagai alat untuk mengikat pemilih yang dalam hal ini juga mencakup sebagai penerima program agar pemilih nantinya memberikan dukungan politiknya terhadap politisi yang menyampaikan klaim politiknya. Hal ini dilakukan dengan cara merayu bahwa adanya kesejahteraan sosial yang terdistribusi bukan secara gratis tanpa bayar, melainkan pemberian tersebut perlu adanya timbal balik dengan memberikan suara dan dengan cara mobilisasi para penerima agar konstituen memberikan suaranya kepada politisi yang telah menyuarakan klaim politiknya.

Seiring berjalannya waktu adanya loyalitas tersebut mulai masuk keranah politik secara formal antara tuan takur kepada orang-orang yang telah dipercaya atau bahkan kepada birokrat muda, kaum professional, dan pemimpin partai yang menggeser posisi tuan takur. James Scot (1972), misalnya dikenal dengan bentuk penelitian adanya relasi tuan takur dan buruh tani yang dimana di ilustrasikan sebagai awal mula terbentuknya pemilih dan politisi. Dimana para buruh tani memberikan jasa garap

terhadap tuan takur dan imbalan yang didapatkan oleh buruh tani bentuk bantuan perlindungan apabila mengalami kesulitan dan juga mendapatkan jaminan keamanan dalam kehidupannya. Hal ini terjadi ketika pemilihan umum para klien memiliki sumber daya politik baru, karena dengan adanya mengakoodir bahkan menahan suaranya bisa menentukan nasib calon untuk menduduki yang akan dicapainya.

Aspinall dan Berenschot, dalam memahami klientelsme menggunakan tiga pendekatan untuk menjelaskan lebih detail mengenai klienelisme yang terjadi di Indonesia. Pertama pendekatan secara kulturalis, kedua pendekatan secara maketis, dan ketiga secara Institusionalis. Karena dalam hal ini, dalam mengukur adanya klientelisme cukup sulit sehingga Aspinall dan Berenschot menggunakan metode survei ahli yang diadopsi dari ilmuwan politik Herbert Kitschelt. Bahwa hasil dari pandangan mengenai klientelisme dari berbagai provinsi mengalami perbedaan seusia dengan kondisi ekonomi daerah maupun relasi yang terbangun dari elit politik terhadap peran ulama di daerah terkhusus yang terjadi di Kabupaten Jombang. Memahami konsep dasar klienelisme tersbut akan dibahas secara rinci dibawah ini.

Demikian yang menjadi adanya klientelisme yang mulai beradaptasi antara para calon politisi dan pemilih dalam memberikan timbal balik diambil antara ilustrasi relasi tuan takur dan buruh tani. Oleh karena itu, hal ini terjadi dalam pemilu di Indonesia dimana sejak zaman kerajaan yang masyarakat mulai tergantung terhadap gaya pemerintahan yang personalistik (Nordholt, 2015). Para ilmuan memandang dengan adanya klientelisme sendiri bentuk dari relasi sosial yang khusus. Misalnya yang dikutip oleh Lemarchard dan Legg, klientelisme politik sendiri merupakan jenis hubungan yang kurang lebih antara para aktor dan klien nantinya memiliki asas manfaat timbal balik (Lemarchand dan Legg, 1972). Sedangkan klientelisme sendiri terbagi menjadi tiga gelombang yaitu, Kulturalis, Marketis, dan Institusionalis.

Gelombang pertama yakni Kulturalis bagaimana dengan adanya norma sosial dan ide tersebut membentuk relasi antara patron dan klien. Para ilmuan seringkali mengamati dengan adanya pendekatan ini bahwa adanya harapan timbal balik antara para pihak elit politik yang didukung

oleh nilai-nilai dan ritual dalam komunitas yang bersangkutan (Scott, 1972). Hal ini berakibat terhadap penekanan kultural sendiri yang akhirnya memunculkan kebiasaan timbal balik yang akhirnya menjadi tradisi (Lawson, G, 2014). Hal ini klientelisme kultural sendiri seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai budaya dan tradisional yang lazim di masyarakat. Tradisi patron-klien, dimana hubungan antara patron dan klien didasarkan pada pengabdian, dan pengembalian. Sehingga simbolis klientelisme sendiri secara kultur memperkuat hubungan patron dan klien. Hal ini mencakup symbol kekuasaan, ritual keagamaan yang digunakan untuk menjaga hubungan dan menegaskan pelindung, dan juga berdampak terhadap kebijakan dalam praktik ini seringkali memperhatikan nilai-nilai budaya lokal misalnya dengan adanya pendistribusi bansos atau proyek pembangunan acap kali mempertimbangkan relasi sosial dan hubungan pribadi.

Gelombang kedua yakni marketis dimana politisi menekankan dengan melihat adanya perhitungan mengenai biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapat dengan adanya pertukaran klientelis. Pemahaman ini mempengaruhi rasionalitas perilaku politik, yang dimana masyarakat menggunakan suara untuk memaksimalkan sumber daya yang telah ditawarkan ketika memenangkan pemilihan umum, sebaliknya politisi juga menawarkan secara maksimal agar mempengaruhi suaranya pada saat pemilu (Kramon, 2016). Secara tidak langsung dengan adanya klientelisme market melalui pasar dan politik mampu mengurangi praktik klien itu sendiri.

Gelombang ketiga yakni institusionalis dimana membentuk isnttitusi negara, memberikan penegasan, bahkan diharapkan bisa mengalangi bagi para politisi yang berupaya mengarah terhadap praktik-praktik klientelis, yang nantinya negara mampu keluar dari praktik klientelis atau bahkan sebaliknya terjebak dalam klientelis yang semakin mengakar (Kenny, 2015). Hal ini mampu mengurangi klientelisme politik ketika negara atau para birokrat mempunyai banyak waktu yang cukup untuk menjadi otonom yang kuat. Sebaliknya jiga institusi tidak kuat adanya praktik klientelis sendiri terjadi lembaga pemerintahan salah satunya dengan perihal alokasi

anggaran, bahkan jual beli jabatan pun terjadi dalam proses klientelis (Edward dan Berenschot, 2019).

Dengan tiga konsep dasar tersebut, Aspinall dan Berenschot membahas lebih lanjut mengenai konsep klientelisme sebagai gelindingan roda lepas untuk melihat klientelisme gelindingan roda lepas di Indonesia dengan menggunakan empat argument: jejaring dengan pertukaran klinetelistik antar partai dan non partai, pola kontrol melalui diskresi, hakikat petukaran sumber daya, dan adanya intesitas dalam pertukaran klientelistik. Dengan adannya empat argument yang dibangun oleh Aspinall dan Berenschot menjabarkan bahwa dengan adanya klientelisme gelindingan roda lepas dimana dalam sebuah pencalonan hanya menguntungkan adanya calon incumben dan para pemilihnya. Karena dengan adanya histori path dependen mempengaruhi bentuk dukungan melalui jaringan yang sudah terbentuk, sedangkan yang dialami oleh calon baru harus mengeluarkan pembiayaan pembentukan jaringan baru sehingga pengeluaran lebih besar (Edward dan Berenschot, 2019).

Dalam hal ini penelitian mengenai ulama dan politik dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah diharapkan mampu terjawab dalam teori klintelisme, karena acap kali dipandang klientelisme hanya perihal bantuan yang secara pragmatis dan menguntungkan individu akan tetapi dalam penelitian ini selain menguntungkan terhadap personal juga memberikan manfaat terhadap sektor pendidikan baik dari pengajar, infrastruktur maupun siswa.

BAB III

LANDSCAPE KABUPATEN JOMBANG

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran penjelasan tentang konteks dimana penelitian ini dilakukan. Konteks ini berkaitan dengan penjelasan tentang Kabupaten Jombang dilihat dari kondisi geografi, Demografis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Kabupaten Jombang. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai sejarah Kabupaten Jombang. Studi ini penting untuk engetahui bagaimana kondisi masyarakat Kabupaten Jombang dari segi ekonomi dan Pendidikan.

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

1. Kondisi Geografis dan batas Administrasi

Kabupaten Jombang sendiri luas wilayah yang dimiliki 115.950 hektare yang tediri dai 21 Kecamatan dan 301 desa, 5 kelurahan. Setara dengan 2,4% luas Provinsi Jawa Timur. Mayoritas wilayahnya berupa dataran rendah, dengan kisaran ketinggian kurang dari 500 meter diatas permukaan laut. Namun selain dataran rendah sebagian dari wiilayah di Jombang ada dataran tinggi lebih dari 1000 dpl, yaitu Kecamatan Wonosalam. Sebelah Utara Kabupaten Jombang bebatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah Tmur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.

Gambar 1. Peta Wilayah dan Administrasi Kabupaten Jombang

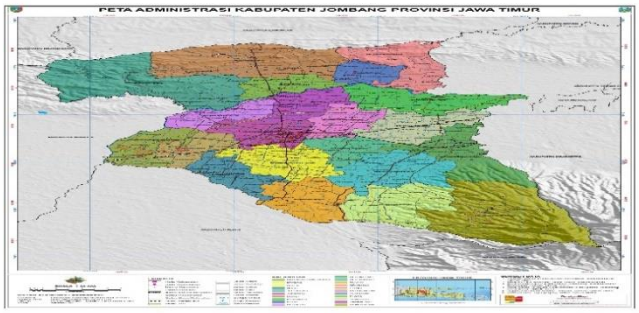

(sumber : Doc. Peneliti)

2. Demografis Kabupaten Jombang

Jumlah masyarakat Kabupaten Jombang tahun 2020 yaitu sebanyak 1.268.504 jiwa. Dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 631.118 dan perempuan sebanyak 637.386. jika dilihat berdasarkan data, di Kabupaten Jombang lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Selisih jumlah perempuan dan laki-laki sebanyak 6.268. Data mengenai jumlah penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020 dapat dilihat dalam table berikut:

Table 2 Statistik Penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan jenis kelamin tahun 2020

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	631.118
Perempuan	637.386
Jumlah Total	1.268.504

Sumber: Data Demografi Kabupaten Jombang 2020

Penjabaran lebih lanjut mengenai data penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan kelompok umur. Diketahui bahwasanya komposisi penduduk didominasi oleh penduduk rentang usia 35-39 tahun yaitu sebanyak 112.793 jiwa. Di posisi terbanyak kedua yaitu penduduk dengan rentang usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 110.751 jiwa. Dan posisi terbanyak ketiga yaitu dengan rentang usia 20-24 tahun yaitu sebanyak 100.413 jiwa. Sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah penduduk rentang usia 65-69 tahun yaitu sebanyak 37.311 jiwa.

Selanjutnya yaitu mengenai jumlah penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan Pendidikan akhirnya. Masyarakat Kabupaten Jombang dari seg Pendidikan masih didominasi oleh penddk yang tamat akhir SD/sederajat dengan jumlah 236.240 jiwa. Sedangkan diposisi kedua tebanyak yaitu penduduk dengan Pendidikan akhir SMP dengan jumlah 193.003 jiwa, beda sedikit dengan penduduk tamatan SD. Sedangkan jumlah penduduk yang berkuliah dilihat dari lulusan Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II, dan Strata III, yaitu sebanyak 60.662

jiwa. Data mengenai jumlah penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan Pendidikan akhir tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Table 3 Statistik Penduduk Kabupaten Jombang Berdasarkan Pendidikan Akhir tahun 2020

Pendidikan Akhir	Bekerja	Pengangguran	Jumlah
<=SD	226.718	9.522	236.240
SMP	185.085	7.918	193.003
SMA	142.416	6.020	148.436
SMK	111.397	9.084	120.481
Diploma I/II/III	8.369	-	8.369
Sarjana	49.503	2.790	52.293
Jumlah	**723.488**	**35.334**	**758.822**

Sumber: Data Demografi Kabupaten Jombang

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2020 hampir semua agama mempunyai penganut. Agama islam sendiri masih mendominasi dengan jumlah 1.334.603 masih banyak diantara agama budha, Kristen, hindu, konghucu, dan kepercayaan. Sedangkan terbanyak kedua penganut agama Kristen denga jumlah 16.826 jiwa. Data mengenai jumlah penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan agama tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Table 4 Statistik Penduduk Kabupaten Jombang berdasarkan agama tahun 2020

No	Keterangan	Jumlah
1.	Islam	1.334.603
2.	Kristen	16.826

3.	Katolik	1.921
4.	Hindu	641
5.	Budha	925
6.	Konghucu	43
7.	Kepercayaan	6
Jumlah Total		**1.354.965**

Sumber: Data Demografi Kabupaten Jombang 2020

3. Kondisi Sosial, Ekonomi Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang adalah daerah yang memasuki wilayah Provinsi Jawa Timur dengan pemandangan yang sangat indah dan masyarakat tergolong ramah. Hubungan antar warga masih sangat harmonis, masih sering berkumpul membahas perihal kersahan satu sama lain, yang cukup unik di Jombang banyak warung kopi sehingga tak jarang banyaknya masyarakat mulai dari yang muda sampai tua banyak yang ngumpul melalui warung kopi, keresahan-kerasahan tersebut banyak tertuang selain di halaman rumah juga bias terjadi di warung kopi. Kabupaten Jombang sendiri memiliki 21 kecamatan, 301 desa, dan 5 kelurahan, dimana masing-masing pemimpin desa dengan baik mendampingi para masyarakatnya, sehingga kegiatan-kegiatan di desa berjalan dengan baik, gotong royong, kerja bakti masih terjadi di desa-desa Kabupaten Jombang sehingga antar masyarakat sering berinteraksi satu sama lain. Ataupun event-event besar sepert momentum 17 Agustus dan hari santri nasional masyarakat jombang sangat antusias berkontribusi dalam memperingati hal tersebut dan masing-masing desa memiliki keunikannya tersendiri.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Jombang menganut agama islam dengan kultur pesantren yang masih sangat kental, terbukti masih sering diadakannya acara-acara keagamaan yang masih sangat diminati oleh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari kultur-kultur kyai pesantren NU yang tertanam di Kabupaten Jombang, karena selain banyak pondok pesantren yang berdiri di jombang cikal-bakal NU juga berdiri melalui peran ulama jombang yaitu KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahan Hasbullah. Dan KH. Bisri Syansuri, sehingga kultur-kultur NU masih

sangat kuat dikalangan masyarakat Jombang sendiri. Organisasi-organisasi NU tumbuh dengan baik disana, dari mulai remaja hingga ibu-ibu dan bapak-bapak terlibat aktif disana. Dari remaja yang aktif di organisasi banom IPNU dan IPPNU, sedangkan untuk ibu-ibu aktif di fatayat dan muslimat, sedangkan bapak-bapak aktif di Ansor, banser hingga mwcnu dan PCNU. Organisasi tersebut yang menyelenggarakan acara keagamaan untuk desa-desa yang memiliki pondok pesantren biasanya acara diselenggarakan bersama santri-santi untuk menjalin warga masyarakat desa tersebut dengan santri-santri yang menimba ilmu diponpes sekitar desa tersebut. Selain itu organisasi-organisasi inilah menjadi wadah antar tokoh agama dan masyarakat untuk mempertahankan amaliah-amaliah aswaja hingga menjaga kultur agama islam yang saling toleran antar umat beragama.

Selain itu tak jarang di Kabupaten Jombang seringkali agenda bancaan mungkin itu kultur yang biasanya terjadi dikalangan santri makan secara ramai-ramai namun mampu tersampaikan dikalangan masyarakat umum perihal bancaan atau makan-makan Bersama secara jumlah besar, dimana biasanya terjadi karena atas rasa syukur atau sekedar mengagendakan untuk menjalin silaturahmi antar warga tetap baik satu sama lain. Biasanya warga membawa makanan masing-masing dari rumahnya atau ada juga yang dipercayai untuk memasak untuk acara bancaan. Hal tersebut terjadi di setiap gang atau RT yang digelar karpet seadanya untuk makannya sendiri biasanya menggunakan daun pisang, sebelum acara ramah tamah dimulai biasanya ada sambutan-sambutan dari ketua RT maupun tokoh agama setempat, lalu dilanjut do'a bersama.

Jombang sendiri termasuk wilayah strategis membuat Kabupaten Jombang mempunyai sector unggul yang dijadikan mata pencaharian utama oleh masyarakatnya, seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, peternakan, dan industi. Jombang sendiri memiliki tanah yang subur sehingga pemanfaatan lahan masyarakat jombang lebih bercocok tanam yang akhirnya memnghasilkan banyak hasil tani seperti, padi, tebu, jagung, manga, pisang, bahkan ada salah satu kecamatan yang menghasilkan durian. Selain jombang sendiri memiliki dua pabrik gula sehingga mendorong masyarakatnya dalam bertanam tebu sebagai komoditas unggul di Kabupaten Jombang. Selain itu Jombang juga dijuluki sebagai kota "Santri" karena banyaknya pondok pesantren dan beberapa tokoh pendiri NU, seperi, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah. Dan KH. Bisri Syansuri, hingga KH. Abdurrahman Wahid, yang dijadikan sebagai wisata religi, sehingga

dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan banyaknya wisatwan yang berkunjung hal ini menjadi manfaat besar bagi masyarakat Jombang, untuk berjualan di sekitar tempat wisata.

B. Sejarah Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang sendiri merupakan yang terletak dibagian tengah Provinsi Jawa Timur. Jombang merupakan kabupaten yang tergolong masih muda yaitu dibentuk pada tahun 1910. Seiring perjalanan terbentuknya Kabupaten Jombang, terdapat hal menarik mengenai sejarah mengenai asal usul nama hingga terbentuknya wilayah administrasi. Asal-usul nama Jombang sendiri mulai muncul pasca meredupnya pemerintahan kerajaan Majapahit, sehingga kondisi yang terjadi di daerah Jombang cukup kacau. Salah satunya munculnya Surontanu seorang penjahat yang tergolong sakti sehingga sulit untuk dikalahkan, menjadikan masyarakat Jombang takut terhadap Surontanu.

Konon Jombang sendiri dahulunya sebagai lokas perkelahian antara Kebo Kicak dan Surontanu, petarung yang tergolong sakti di daerahnya. Sebuah permasalahan mulai muncul ketika salah satu peliharaan Surontanu menyebabkan munculnya penyakit aneh. Penyakit tersebut menimbulkan wabah yang sult disembuhkan oleh berbagai macam obat. Karena keresahan-kresahan tersebt terjadi dimasyarakat, Kebo Kicak diutu oleh seorang kyai untuk menggunakan kekuatanya melawan Surontanu, atas perintah dari kyai nya Kebo berangkat bertarung dengan Surontanu demi menghilangkan wabah penyakit yang di derita masyarakat. Pertarungan keduanya terjadi sangat sengit dan saling mengeluarkan kekuatan sehingga mengeluarkan cahaya yang berwarna hijau (ijo) dan merah (Abang). Kemunculan cahaya yang begitu dahsyat itu kemudian menjadi asal usul nama Jombang yang merupakan perpaduan istilah Ijo Abang.

Sejarah Jombang sendiri bermula diera pemerintahan Kerajaan Majapahit, yang sebagian wilayah Jombang menjadi daerah kekuasaannya. Bahkan desa Tunggoroni dulunya merupakan gapura keraton Majapahit bagian barat. Sedangkan disebelah selatan terdapat desa Ngrimbi yang merupakan dahulu terletak gapura dan saat ini terdapat beberapa candi. Namun pasca runtuh Majapahit Jombang belum menjadi daerah Otonom melainkan masih menjadi bagian Pemerintahan Mojokerto. Sehingga kegiatan administrasi Jombang

sebenarnya sudah mulai lama sebelum tahun 1910, melainkan sudah jalan lama sejak tahun 1880-an.

Sehingga kini Jombang yang dikenal sebagai kota santri karena terdapat banyak pondok pesantren yang memiliki ribuan santri. Diantara lain yaitu Tebuireng, Tambak Beras, Darul Ulum Rejoso, Ponpes Denanyar. Jombang sendiri juga tempat lahirnya tokoh-tokoh bangsa mulai dari pahlawan nasional bahkan Presiden Republik Indonesiam diantaranya KH. Hasyim Asyari, KH. Wahid Hasyim, Nurcholis Madjid, dan Presiden Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan sapaan Gus dur.

Era kepemimpinan Jombang sendiri bermula dari kalangan kerajaan yang pada saat itu di pimpin oleh R.A.A. Soeroadiningrat yang merupakan pemimpin pertama Kabupaten Jombang pasca terpisah kewilayahan secara administrasi dari Mojokerto, sehingga di eranya Jombang mendaoat hak berupa pelimpahan wewenang otonomi daerah. Adanya pelimpahan ini tentunya tidak lepas dari undang-undang memgenai desentralisasi yang pada masa itu dibentuk langsung oleh pemerintah colonial Belanda. Sehingga undang-undang tersebutlah yang menjadi acuan dasar hokum dalam otonomi daerah. Undang-undang desentrali kemudian mengalami beberapa perubahan seiring berkembangnya zaman yakni pada tahun 1905 dan 1922. Alasan terjadinya perubahan karena menyesuaikan kebutuhan wilayah pada masa itu.

Pada Soeroadiningrat banyak perkembangan pembangunan pasca terpishnya dari Mojokerto, pertama ialah dibangunnya masjid yang terletak d sebelah barat alun-alun yang secara bersamaan juga dibangunnya pendopo Jombang. Masjid ini sekarang sangat dikenal oleh masyarakat Jombang yng diberi nama sebagai Masjid Agung. Letak dari masjid agung dan pendopo bersebrangan dan saling mengadap ke ruang teruka kosong atau yang disebut sebagai alun-alun. Hal ini merepresentasikan sebagai relasi antara manusia dengan tuhan, relasi penguasa dengan masyarakat, dan relasi hablumminal alam (manusia dengan alam).

Kedua adalah Pembangunan sarana kerata api, yang sebenarnya hal ini sudah dibangun pada tahun 1899, sehingga mulai banyak jalur-jalur penghubung antar kabupaten diera Soeroadiningrat. Ketiga adalah pembangunan pondok pesantren dan lembaga Pendidikan islam, pada era kepemimpinan kanhjeng sepuh, mulai berdiri pondok pesanren yang Namanya pada saat itu amat terkenal bai di Jombang maupun luar daerah. Pondok pesantren tersebut bernama Mamba'ul Ma'arif yang

didirikan oleh KH. Bisri Syansuri pada tahun 1917 di daerah Denanyar, selain itu denanyar juga salah satu munculnya pondok pesantren putri pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1919. Sebelum pondok denanyar berdiri Jombang juga sudah berdiri beberapa pondok pesantren yang tersohor yaitu Pondok Pesantren Bahrul ulum 1838, Darul Ulum 1885, dan Tebuireng 1899. Selain itu juga mulai berdiri penddikan khusus anak perempuan yang dunamakan Mabadi'ul Huda.

Keempat pada era kanjeng sepuh di tahun 1921 mulai berdiri sarana kesehatan yang dinamakan rumah sakit, yang terletak di Ngoro. Rumah sakit inilah merupakan salah sat milik dari bank colonial, meskipun secara pengelolaan oleh warga pribumi yang pada saat itu ikelola oleh Z. Hulzebos. Dan salah satu pembayaan ruah sakit mendapat bantuan da pabrik gula. Empat pembanguna tersebutlah mulai dbangun diera bpati Jombang pertama sehingga mulai banyak pembangunan-pembangunan di era kepemimpinan Munjidah Wahab yang memunculkan terobosan mengenai Pendidikan muatan lokal keagamaan tingkat sekolah dasar dibawah naungan dinas Pendidikan.

Table 5 Nama-nama Bupati Kabupaten Jombang

No	Periode	Nama Bupati	Keterangan
1.	2013-2018	Nyono Suharli	Kader Partai Golkar
2.	2018-2023	Munjidah Wahab	Kader Partai PPP

Sumber: Profil Jombang

C. Sejarah ulama dan politik Kabupaten Jombang

Pada dasarnya ulama merupakan panutan bagi pengikutnya sehingga hasil keputusanya di anggap sebagai fatwa. Karena ulama dianggap mumpuni dalam perihal pemahaman agama sehingga tak jarang para pengikut maupun politisi berkunjung menemui ulama untuk meminta beberapa pertimbangan keputusannya. Alasan utama ulama terjun dalam dunia politik untuk memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar (*mengamalkan ajaran untuk yang lebih baik dan menjauhi segala keburukan*).* Perilaku ulama dalam politik dijelaskan adanya pola relasi antar ulama pesantren, organisasi masyarakat NU, dan partai politik sudah terjadi

sebelum masa reformasi. Hubungan dengan politik ulama merupakan sosok khaismatik yang mempunyai pengaruh besar, sehingga banyak para politisi menggandeng ulama sebagai pendulang suara (vote getter). Ulama yang berjuang dalam dunia pesantren dan politik di Jombang ialah KH. Wahab Hasbullah dan KH. Bisri Syansuri beliau berdua merupakan masih kakak beradik ipar, yang sama-sama berjuang di kancah lokal hingga nasional. Untuk mengetahui lebih dalam peran politik sebagai berikut:

1. Perjuangan Intelektual Tafsirul Afkar

Jiwa kepemimpinan kyai Wahab mulai menonjol sejak beliau masih menempa ilmu keagamaan di pondok pesantren. Disela-sela kesibukannya kyai Wahab menyempatkan waktunya untuk membentuk kelompok diskusi secara rutin. Dengan dibentuknya kelompok diskusi guna membahas berbagai persoalan, mulai dari perihal agama hingga problem sosial kemasyarakatan. Sepulang dari pondok pesantren, kyai Wahab tidak kaget ketika turun langsung ke masyarakat dalam mengamalkan ilmunya. Karena semasa di Tebuireng kyai Wahab membentuk tim musyawarah yang pada saat itu terdiri dari, kyai Bisri Jombang, kyai As'ad Situbondo, kyai Manaf Lirboyo, kyai Abbas Crebon.

Dalam lingkar diskusi tersebut membahas persoalan masyarakat, mulai dari fenomena yang terjadi, dengn rujukan kitab-kitab kuning, untuk menjawab berbaga persoalan dengan menjawab sesuai realitas perkembangan zaman. Semasa beliau pulang dar Makkah langsung melanjutkan di Surabaya, karena pada saat itu Surabaya menjadi pusat perdagangan dan aktifitas politik hingga sosial dari berbagai macam organisasi.

Bersama ulama senior kyai Ahmad dari Kebondalem, kyai Wahab mendirikan forum untuk mewadahi diskusi yang dinamai *Taswirul Afkar* (Pegolakan Pemikiran), yang awalnya adanya forum ini diadakan pertemuan secara terbatas oleh para pemuda untuk mengakomodir kebebasan berfikirnya. Pada saat itu adanya forum ini menjadi sorotan bagi kaum muda karena diaggap menarik. Sebenarnya didirikannya taswirul afkar guna

mewadahi aspirasi masyarakat islam tradisional dengan islam pembaharu, guna menyatukan pemikiran melawan politik kolonial.

2. Pemikiran Politik KH. Wahab Hasbullah

Pada dasarnya metode berfikir yang dilakukan oleh kyai Wahab yang merupakan tokoh NU tidak lepas dari pemahaman Aswaja, yang menganut dengan empat mazhab, sehingga kalangan tradisionalis lebih menekankan untuk pemikiran mazhab Syafi'iyah, daripada tiga mazhab lain. Paham aswaja lebih menggunakan pendekatan yang miltidimensi dari aspek fiqih dan tasawuf. Dengan hal ini kyai Wahab menjadikan pola piker NU yang moderat lebih ke akomodatif, khususnya dalam menanggapi persoalan politik dan saat memberikan treatment terhadap kekuasaan. salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh NU yang pada saat itu di pimpin oleh kyai Wahab yaitu berpegang teguh pada kaidah Imam Syafi'i, yaitu menghindari adanya bahaya diutamakan daripada melaksanakan kebaikan. Dengan adanya pemikiran kaidah tersebut disederhanakan dengan amar ma'ruf nahi munkar dan maslahat terhadap umat.

Kyai Wahab mempertegas, bahwa hukum agama tidak harus berdasarkan tekstual, melainkan hukum agama juga harus memahami realitas yang terjadi pada sosial masyarakat. Hal tersebut juga beberapa langkah politik yang dilakukan oleh kyai Wahab semasa hidupnya. Adanya kiprah politik kyai Wahab juga beliau dekat dengan Soekarno sehingga pada saat itu juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Daerah. Sehingga kyai wahab ikut terlibat dalam keputusan kebijakan yang kaitannya dengan perihal agama untuk mewakili NU.

Selain itu ketika diceritakan oleh bu Alfiyah selaku tenaga Ahli dari ibu Munjidah, beliau juga bercerita " salah satu fase kenapa ulama di Jombang andil dalam politik karena juga para pendahulu-pendahulunya seperti kyai wahab beliau juga selain ulama yang fokus dalam keilmuan agama juga ikut andil dalam perpoliikan secara nasional hal ini dibuktikan kyai Wahab yang pada saat itu juga bertugas di istana, lebih jelasnya saya sudah tulis dibuku saya mas, yang menceritakan ibu nyai mun" (wawancara Alfiyah Ashmad, Tenaga Ahli Munjidah, 28 September 2024). Bu alfi juga menceritakan

bahwa kyai Wahab salah satu pemimpin yang menekankan kepada masyarakat dalam kebebasan berfikirnya. Kyai Wahab juga pada tahun 1948-1950 menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan salah sat pendiri NU. pada saat tu juga kyai Wahab sebaga pemimpin PBNU sehingga beberapa pandangan dan kebijakannya dijadikan sebagai pertimbangan dari berbagai kalangan.

3. Perjuangan Politik KH. Bisri Syansuri

Berangkat dari pengalaman-pengalamannya yang didapat, KH. Bisri Syansuri bersama KH. Wahab Hasbullah, mendirikan Komite Hijaz. Komite inilah bergerak untuk menarik dukungan dalam tujuannya untuk mengirim delegasi ke Arab. Meskipun awalnya upaya pembentukan komite hijaz tidak mendapat restu dari guru, KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng. Yang jarang diketahui jam'yah Nahdlatul Ulama, aalnya dinamai Komite Hijaz. Pada awal berdirinya NU kyai Bisri menduduki Jabatan A'wan. Sehingga hal ini mempengaruhi kehidupan kyai Bisri, yang semulanya hanya aktif dikancah lokal, kini beliau harus aktif ditingkat nasional. Pada saat itulah santri-santri yang belajar bersama beliau diikutsertakan masuk kedalam Nahdlatul Ulama.

Pada era pemerintahan DPR tahun 1955, dalam hasil pemilu pertama, KH. Bisri Syansuri mendapatkan amanah dipercaya melalui basis wilayah Jawa Timur. Pada saat menjabat DPR saat itu, kyai Bisri mengedepankan umat dan memperjuangkan umat, tas dasar suara rakyat. Masa kyai Bisri menabat DPR tidak cukup lama. Karena dengan adanya dekrit presiden di tahun 1959 menjadi system presidensial. Dengan langkah awal membubarkan cabinet, pad saat itu DPR dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Selain itu adanya inkonstitusional dilakukan presiden, dengan adanya MPR/DPR semulanya di pilih oleh rakyat diubah dengan peraturan MPRS Perpes No. 2 tahun 1959, yang disahkan pada 22 Juli 1959. Berisikan anggota diangkat dan dihentikan oleh Presiden.

Adanya MPRS menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat secr luas, terutama NU. sebagian pengikut NU menolak adanya MPRS karena danggap telah menyalahi undang-undang. Adanya penolakan ini dikomando

oleh kyai Bisri dan diikuti oleh kyai Dahlan dsb. Beliau menganggap bahwa adanya putusan MPRS menunjukan bahwa DPR anti tehadap demokrasi. Karena menurut kyai Bisri adanya pemilihan DPR tanpa melibatkan suara rakyat dianggap bertentangan dengan konsep ilmu fiqih yang menjadi rujukan beliau. Lain hal dengan kelompok kyai Wahab dan para pengikutnya justru menerima keputusan presiden perihal keanggotaan yang dipilih secara langsung oleh presiden. Karena yang menjadi kekhawatiran kyai Wahab ketika adanya sebuah penolakan yang begitu massif akan menimbulkan presiden tidak mau mewadahi tempat aspirasi bagi kaum Nahdliyin. Meskipun dengan perbedaan tersebut kyai Bisri menghargai keputusan yang dambil oleh kyai Wahab, karena pada saat itu kyai Wahab merupakan pemimpin tertinggi dalam partai NU.

Sikap yang begitu lunak oleh NU dalam menyikapi perghelatan politik, sikap tersebut diambil guna mendapat kesempatan dan mengimbangi kondisi politik pada waktu itu. Meskipun kyai Bisri tidak masuk dalam keanggotaan DPR, beliau masi berperan secara aktif dalam mengambil keputusan ketika situasi politik pada saat itu di dominasi oleh PKI.

Selain itu di era pergolakan penggulingan PKI di tahun 1965, perubahan kekuasaan orde lama ke orba, kyai Bisri seringkali ke luar kota guna mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan nasional, karena pada saat itu kyai Wahab sakit-sakitan sehingga Kyao Bisri menggantikan beliau. Di Tahun 1972 bertepatan dengan wafatnya kyai Wahab, sehingga kyai Bisri menggantikan posisi kyai Wahab sebagai Rais Aam PBNU. Secara beramaan pada aat itu sedang mengalami politik yang ckup pelik bagi NU. karena pada era orde baru mulai mengendalikan politik dengan mengendalikan seluruh elemen masyarakat. Orde baru saat itu juga, menciptakan Golkar sebagai alat politik yang pada saat itu bukan termasuk dalam partai politik. Pada tahun 1973 pemeintah menyederhanakan partai politik menjadi tiga yaitu Golkar, PPP (gabungan partai-partai ideologi islam), dan PDIP (partai basis berasaskan nasionalis).

Pada saat itulah, terpaksa NU harus melebur dalam ranah politik ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Namun disisi lain NU tidak ingin

terlibat secara langsung kedalam system partai, sehingga pada saat itu secara tegas adanya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial agama yang non-politik. Meskipun pada saat itu kyai Bisri keberatan dengan adanya penggabungan partai islam, meski beliau aktif di PPP, kyai Bisri berhasil membawa NU sebagai ormas yang kuat dan Tangguh dalam menghadapi tantangan zaman, pada saat itu di tegaskan lagi oleh cucunya bernama gus dur bahwa NU kembali ke Khittah 1926.

Tantangan besar pada saat itu ialah, dimana muncul adanya RUU perkawinan yang dianggap jauh dari ketentuan syariat agama, sehingga muncl penolakan meskipun proses nya berlangsung secara ketat. Karena pada saat itu ulama-ulama NU berhadapan langsung dngan ABRI, namun hal ini tidak dijadikan sebagai hilang semangat bagi para ulama terutama kyai Bisri. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pengaruh ulama dalam partai PPP. Langkah awal yang dilakukan kyai bisri dengan cara mengumpulkan ulama-ulama di Jombang untuk membuat UU tandingan. Setelah terentuknya UU tandingan tersbut NU memberikan kepercaaan terhadap PPP sebagai pengusul dalam pengesahan RUU perkawinan.

Salah satu perubahan UU tersebut berisikan, pada pasal 2 dimana mengatur masa Iddah yang awalnya pemerintah mengatur selama satu tahun, sedangkan NU sesuai dengan kaidah fiqih di perpendek pada masa tiga bulan kewajiban mantan suami memberikan nafkah. Ketiga perjuangan UU lainnya dimana pemerintah mengatur dalam UU perkawinan hamil diluar nikah tidak diizinkan oleh negara. NU berhasil mempengaruhi dengan menyederhanakan mengenai definisi anak yang sah adalah yang dilahirkan atas dasar perkawinan. Keempat NU mengusulkan bahwasanya anak yan sah adalah aak yang lahir atas dasar pernikahan. Masih banyak lainnya bentuk upaya yang dipelopori kyai Bisri dalam keputusan politiknya yang atas dasar ilmu fiqih.

Hal ini juga di ceritakan oleh kyai Salam dalam proses pengambilan data di Denanyar “ selain mbah Bisri andil dalam UU perkawinan, beliau juga turut andil dalam mencetuskan konsep KB le, yang pada hari ini diterapkan dan diakui oleh pemerintah bahkan masyarakat secara luas dan

juga pada saat tu mbah Bisri juga salah satu pencipta logo Ka'bah pada partai PPP" (wawancara kyai Salam, 29 September 2024). Meskipun pada saat itu banyak ulama yang menolak adanya program KB, kyai Bisri bersikeras memperbolehkan dengan rujukan dari imam Ghozali perilah dengan niat utuk menuju kemaslahatan berumah tangga. Hal ini menunjukan bahwa dibalik sikap tegasnya dalam ber fiqih, juga melihatkan bahwa kecintaan beliau terhadap negara begitu tinggi.

Dengan melihat dua sejarah perihal ulama diatas menunjukan bahwa adanya pola ulama yang terjadi di Jombang ada kaitanyya dengan konsep Historical Institusionalisme yaitu Path dependen, dimana adanya pengaruh sejarah yang terjadi ada hal yang mempengaruhinya (Maschab, 2013). Ialah terjawab dengan adanya sejarah kekutsertaan ulama-ulama Jombang pada sebelum orde lama sampai orde baru terlibat aktif dalam dan politik, bak secara politik sosial keagamaan melalui kebijakan-kebijakan secara syariat islam, maupun secara praktis dengan terlibatnya, kyai Wahab dan Kyai Bisri pada partai politik.

D. Profil Munjidah Wahab

Munjidah Wahab merupakan seorang politisi Jombang kelahiran 22 Mei 1948. Ia memiliki suami, almarhum KH. Imam Asy'ari Muhsin. Dari pernikahannya, Munjidah dikaruniai lima anak yaitu Ema Umiyyatul Chusnah, Silahuddin Asyari, Awin Tammah, Lailatun Nikmah, dan Gus A'ud. Munjidah mengenyam pendidikan di SDN Sambong, Jombang hingga tahun 1962, Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum hingga tahun 1963, serta melanjutan Mualimin dan Mualimat di Bahrul Ulum Tambakberas hingga lulus tahun 1968. Selain itu, Munjidah pernah belajar agama di Pondok pesantren Tambakberas dan Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem, Jawa Tengah.

Jiwa kepemimpinan Munjidah sudah terlihat sejak beliau mengeyam pendidikan di Mts Tambakberas, ia semasa itu menjabat sebagai ketua pelajar mualimat (KPM). Ia bukan tipe yang haus akan jabatan. Segala aktivitas dan perjuangannya semata-mata diabdikan demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Munjidah mengawali karir politik maupun ormas sejak muda. Ia aktif di organisasi perempuan Nahdlatul ulama (NU). Mulai dari aktif di IPPNU, Fatayat

hingga Muslimat Nu. Bahkan Munjidah pernah menjabat sebagai ketua PC Muslimat pada Tahun 2020.

Pada Tahun 1971 Munjidah mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Jombang. Pada periode berikutnya 1997 hingga 2012, Munjidah menjabat anggota DPRD Jawa Timur. Sebagai politisi perempuan ia sudah banyak pengalaman baik dari legislatif maupun eksekutif. Mengawali karir di dunia eksekutif pada pilkada 2013 Munjidah terpilih menjadi Wakil Bupati mendampingi Nyono Suharli pada periode 2013-2018. Kemudian, pada pilkada 2018 Munjidah ikut berkontestasi kembali. Ia mencalonkan diri sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Sumrambah. Pasangan ini pun terpilih untuk memimpin Jombang yang terkenal sebagai kota santri.

BAB IV

BENTUK DUKUNGAN ULAMA TERHADAP BUPATI

Bagian bab ini peneliti akan menjelaskan bentuk-bentuk dukungan ulama terhadap Calon Bupati pada pilkada 2018. Bentuk-bentuk ini, meliputi keterlibatan ulama dalam memberikan dukungan terhadap Munjidah Wahab. Keterlibatan ulama dalam mendukung Munjidah melalui mobilisasi massa. Sedangkan bentuk-bentuk mobilisasi massa yang dilakukan ulama dalam mengarahkan dukungan. Pertama, mobilisasi massa yang dilakukan ulama melalui kegiatan keagamaan seperti dalam acara peringatan maulid, pengajian, hingga pengajian alumni. Kedua, mobilisasi massa keluarga ulama, karena Munjidah masih ada hubungan keluarga dengan pesantren Tambakberas. Pada saat itu melawan petahana yang menjadi tantangan tersendiri dalam membangun strategi pemenangannya, dengan jaringan relasi ulama dan keluarga pesantren beliau lah memobilisasi pemilih pada pilkada 2018. Ketiga, ulama memobilisasi massa terhadap alumni pesantren, karena alumni pesantren Tambakberas dengan para ulama-ulama masih terjalin melalui forum-forum pengajian rutin alumni pesantren. Keempat, mobilisasi ulama terhadap Muslimat dan fatayat diarahkan untuk mendukung Munjidah pada pilkada 2018.

gambar 1 Alur berfikir religi-politik Pesantren TambakBeras

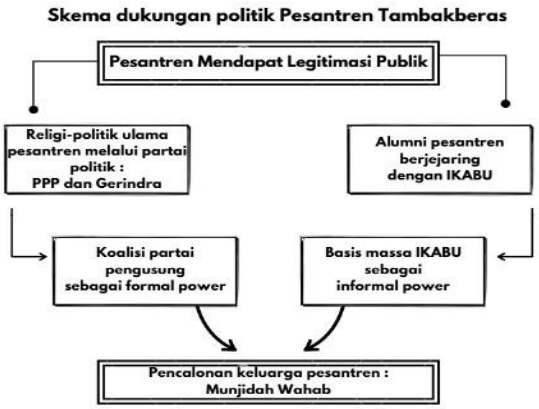

(sumber: Doc. Peneliti)

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, bentuk-bentuk dukungan ulama sebagaimana penulis akan jelaskan lebih detail pada bagian-bagian dibawah ini:

A. Gambaran Umum Proses Mobilisasi massa yang dilakukan Ulama

Mobilisasi massa merupakan suatu hal penting yang dilakukan dalam proses politik, melalui pendekatan, untuk membangun kolektivitas, secara individu maupun jaringan sosial dengan cara partisipasi dalam sebuah gerakan sosial (Subaktiar, 2020). Para ulama terutama dari kalangan NU mempunyai peran aktif dalam bentuk mobilisasi masyarakat maupun santri dan alumni untuk membentuk sebuah dukungan terhadap bupati di Jombang, mereka melakukan bentuk mobilisasi masa biasanya melalui berbagai kegiatan keagamaan, baik melalui majlis, ngaji alumni, dan perayaan hari besar islam. Adanya bentuk mobilisas untuk membantu proses pemenangan pada pilkada guna melancarkan pendekatan terhadap masyarakat untuk meraih dukungan.

> "Adanya peran dukungan ulama terhadap para para politisi sudah terjadi sejak zaman KH. Hasyim, bahkan KH. Bisri Syansuri juga ikut andil dalam proses politik di daerah bahkan nasional, sehingga dukungan-dukungan ulama terhadap para politisi berlangsung hingga sekarang mas." (Wawancara, KH. Wahab, Pengasuh ponpes Al-Risalah, 22 September 2024).

Bentuk dukungan ulama melalui mobilisasi massa yang menekankan adanya peran sejarah yang telah membangun pola dukungan ulama sehingga berpengaruh terhadap konteks sosial dalam membentuk institusi. Pada dasarnya peran dari ulama menjadi sebagai menjembatani antara masyarakat dan pemerintah, memberikan sebuah legitimasi dan bentuk dukungan moral terhadap suara bupati, serta mengakomodir basis massa yang dimiliki oleh ulama untuk mendapatkan suara. Melalui fatwa yang dikeluarkan ulama dapat mempengaruhi sosial, membantu membentuk opini dukungan public guna mendukung kandidat politik tertentu. Bentuk dukungan ini menggambarkan adanya sebuah hubungan historis antara ulama dan kekuasaan lokal dalam konteks politik yang terjadi di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Jombang.

Salah satu bentuk yang dilakukan ulama dalam memobilisasi massa yaitu dengan cara menyampaikan aspirasi politik yang disampaikan pengikutnya terhadap pemerintah, melalui tausiahnya menyampaikan terhadap pengikutnya untuk ikut andil dalam menyukseskan pilkada dengan cara mengajak paslon untuk ikut serta hadir dalam kegiatannya dan diperkenalkan terhadap pengikutnya untuk memberikn dukungan

terhadap paslon tersebut. Hal ini sudah terjadi sejak zaman mbah Bisri Syansuri, sehingga terjadi kepada ulama-ulama penerusnya.

Hal ini sesuai dengan konsep historical institusionalisme dimana ulama sebagai pemimpin informal yang memiliki ranah otoritas moral, sehingga nantinya mempengaruhi terhadap keputusan politik masyarakat. Mereka acap kali menggunakan jaringan sosial nya yang sudah terbentuk dalam memobilisasi suara, dengan menyangkutkan nilai-nilai agama dalam konteks politik lokal. Sehingga adanya path dependence (lintasan ketergantungan) antara ulama serta pengikutnya dan Politisi. sehingga bentuk dukungan yang terjadi hari ini karena adanya pengaruh dari ulama-ulama sebelumnya (Maschab, 2013)

> "Sebenarnya dengan adanya ulama ikut diandilkan dalam berbagai keputusan politik karena ulama memiliki pengikut yang banyak dan dihormati sehingga saya mencoba untuk bantuan terhadap ulama guna mengetahui aspirasi-aspirasi ulama maupun para pengikutnya mas, kedekatan antara politisi dan ulama bukan suatu hal yang asing karena pada dasarnya Jombang terbentuk karena adanya imperium ulama-ulama yang ada di jombang di era mbah Hasyim, mbah Wahab dan mbah Bisri." (Wawancara, Haidar, DPRD PPP Jombang, 23 September 2024).

Adanya pola dukungan ulama terjadi sebelum era reformasi yang dilakukan langsung oleh pendiri NU Jombang, ialah kyai Wahab dan kyai Bisri, sehingga dengan adanya perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu, melalui perjuangan politik maupun kebijakan yang sudah dilakukan, memiliki pengaruh terhadap anak-cucunya untuk melanjutkan semangat perjuangan kyai Wahab dan kyai Bisri. Terutama pada pilkada 2018 dimana Munjidah didukung langsung oleh kyai Hasib yang merupakan pengasuh di Pondok Pesantren Tambakberas. Kyai Hasib menegaskan terhadap bani Hasbullah bahwa ketika masih saudara kita perlu support baik secara langsung maupun do'a. dengan adanya dukungan yang dilakukan kyai Hasib merupakan bukti bahwa adanya ulama ikut andil dalam peran pilkada terkhusus terhadap pasangan Munjidah-Sumrambah. Pastinya adanya dukungan yang dilakukan antara ulama dan calon bupati masih ada kaitannya denga proses patron-klien dimana ulama memberikan dukungannya dengan basis masa yang dimiliki.

Dalam hal ini, ulama mempunyai peran dalam cultural brokers, untuk menjadi mediator terhadap kebutuhan yang diinginkan masyarakat dengan sistem

pemerintahan yang terjadi, serta menjadi penguat masyarakat dalam berpartisipasi politik dari aspek agama dan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal ini juga sesuai dengan teori Klientelisme dari segi kulturalistik, dimana adanya bentuk dukungan yang diharapkan adanya timbal balik antar elit politik dan komunitas yang mendukung. Sebenarnya adanya dukungan secara kulturalis juga terjadi di Amerika serikat dimana konsep mesin politik digunakan, dengan cara partai politik besekongkol dengan pekerja yang dianggap kuat seperti komisi pemilihan daerah diberikan bantuan uang guna memobilisasi msa suara untuk memenangkan si calon (Aspinall, Berenschot, 2019). Namun hal ini juga terjadi di Indonesia dengan cara yang berbeda, adanya hubungan timbal balik terjadi terhadap ulama dan elit politik. Khususnya terjadi di Kabupaten Jombang pada pilkada 2018, dimana Munjidah menggandeng ulama untuk mendapatkan suara dengan basis yang dimiliki oleh ulama.

B. Bentuk mobilisasi massa

Bentuk mobilisasi masa yang dilakukan oleh kyai Hasib dalam mendukung pasangan calon Munjidah-Sumrambah tidak hanya dalam sekala kecil melainkan juga dalam proses pengumpulan massa yang besar. Karena kyai Hasib sendiri merupakan ulama yang cukup dipandang baik lokal maupun nasional. Adanya upaya mobilisasi massa pastinya dilakukan untuk memaksimalkan dukungannya atas komitmen dasar komitmen untuk mendukung Munjidah. Selain itu, kyai Hasib juga seorang ulama yang aktif dalam berbagai organisasi sehingga nama beliau sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat secara luas. Pastinya dengan keterlibatan kyai Hasib mendukung Munjidah, diharapkan adanya aspek timbal balik yang nantinya mampu memperhatikan kalangan santri maupun sebuah kebijaka-kebijakan yang dilakukan atas dasar syariat islam.

Adanya proses mobilisasi massa pastinya menyangkut berbagai aspek baik kalangan masyarakat umum, keluarga, maupun alumni pesantren. Pastinya dalam proses mobilisasi massa dilakukan oleh kyai Hasib secara massif, mesikpun tidak selamanya beliau langsung yang turun akan tetapi beliau juga melibatkan orang-orang kepercayaannya sesuai dengan bidangnya, selain orang-orang kepercayaan beliau juga melibatkan alumni pesantren yang notabennya masih warga Jombang. Beberapa hal ini dilakukan guna memaksimalkan dukungan kyai Hasib terhadap Munjidah yang masih bagian dari keluarga Tambakberas. Berikut proses mobilisasi massa yang dilakukan oleh kyai Hasib beserta pengikutnya :

1. Mobilisasi massa ulama dalam bidang keagamaan

Peran ulama dalam pemilihan kepala daerah secara tidak langsung biasanya dilakukan ulama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti dalam momen pengajian, memperingati hari besar islam seperti acara Maulid Nabi. Dengan adanya peran ulama secara tidak langsung beliau mengingatkan terhadap jamaahnya untuk tidak golput dalam pemilihan, selain itu juga untuk memberikan gambaran pemimpin yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini dilakukan kyai Hasib dalam berbagai kegiatan keagamaan, guna memberikan pandangan terhadap para jamaahnya (santri) untuk memilih pemimpin yang mempunyai latar belakang kuat perihal agamanya, salah satunya yang diarahkan oleh kyai hasib ialah Munjidah selain sosok agamis dari kalangan pesantren, beliau juga organisatoris yang juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu adanya keikutsertaan kyai Hasib dalam dukungan pilkada merupakan sebuah bentuk taat terhadap huku syara' dimana bagian dari bentuk doktrin terhadap orang yang mukallaf (orang yang sudah balig,berakal sudah mengetahui apa yang harus ditiggalkan). Hal ini disampaikan oleh kyai Hasib dalam forum-forum pengajian yang dilakukan oleh beliau.

> "keikutsertaan saya dalam pilkada juga atas dasar kewajiban seorang yang dianggap tahu oleh masyarakat maupun santri kang, selain memberikan pilihan pemimpin yang paham perihal agama juga memberitahu pemimpin baik secara agama juga baik secara perilaku, saya sampaikan itu dalam forum-forum keagamaan guna menguatkan dan memantapkan jamaah juga ikut andil mendukung mba Munjidah, saya panggil beliau mba karena lebih sepuh dari saya kang, saya memperkenalkan mba Munjidah juga terhadap jamaah, menceritakan perjuangan-perjuangan beliau terhadap agama melalui legislatif pada saat itu. Semua ini ya bentuk komitmen saya mendukung mba Munjidah." (wawancara, kyai Hasib, dewan penasihat ponpes Tambakberas, 24 September 2024).

Tujuan dari kyai Hasib dalam memberikan arahan terhadap jamaah maupun masyarakat, dikarenakan beliau memahami betul bagaimana kualitas yang dimiliki oleh Munjidah, sehingga ketakutan beliau apabila terjadi orang-orang salah dalam memilih pemimpin. Meskipun begitu adanya arahan dukungan beliau bukan perihal kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan daerah dan masyarakat secara luas kedepannya nanti. Dalam hal ini juga kyai Hasib mengajak para jamaahnya tidak dengan cara memaksa melainkan dengan ajakan yang begitu lembut, dan halus.

Mekipun adanya mobilisasi keagamaan tidak semuanya secara terang-terangan menyebut by name paslon, karena kyai Hasib juga melihat beberapa kondisi forum yang di hadiri oleh beliau.

Dalam hal ini yang juga disampaikan oleh kyai Hasib melakukan ajakan dukungannya melalui forum-forum NU ketika beliau di undang sekaligus memberikan sambutan sekaligus mengajak secara tersirat bagaimana beliau menyinggung perihal pilkada, dan menyampaikan ajakan partisipasi aktif dalam pilkada. Karena adanya partisipasi secara aktif oleh masyarakat luas juga membantu berlangsungnya pilkada secara sukses, selain itu juga beliau menyinggung perihal kriteria pemimpin yang seharusnya dipilih, meskipun tidak menyebut secara langsung siapa yang dimaksud tapi para peserta yang hadir memahami arah yang dimaksud dari kyai Hasib.

> "Yang dikatakan kyai hasib pada kegiatan NU beliau memberikan ajakan untuk turut aktif dalam proses pilkada karena menurut beliau momentum ini lima tahun sekali agar tak salam mmilih pemimpin, beliau juga memberikan pandangan dalam memilih pemimpin ya harus pemimpin yang ngopeni masyarakat, pemimpin yang paham agama, pernah nyantri, tur nggak harus laki-laki selagi perempuan juga ada pada kriteria tersebut y rapopo, itu yang dikatakan beliau mas, meskipun tidak menyebut nama tapi orang-orang paham yang dimaksud yai Hasib yo Bu Munj. Meskipun tidak nyebut secara nama karena beliau masih menghargai ulama-ulama yang saat itu juga ikut hadir di acara. Selain itu juga nggak jarang mas masyarakat yang sowan ke beliau hanya untuk meminta nasihat dan pendapat untuk pilihan pemimpin)." (wawancara, Ali bukan nama asli, kader Ansor, 25 September 2024).

Adanya masyarakat yang silaturahmi ke rumah kyai Hasib juga banyak hanya untuk meminta pertimbangan kepada beliau untuk memilih pasangan calon pemimpin. Dengan pertanyaan tersebut, ulama pun memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat dengan menasihati untuk lebih condong kepilihan yai Hasib, meskipun beliau tidak memaksakan apa yang dipiih beliau, tapi hal tersebut memberikan pengaruh terhadap masyarakat karena pada dasarnya kyai Hasib merupakan ulama terpandang dengan jiwa sosial yang tinggi, tak heran jika kyai Hasib menentukan pilihannya dan masyarakat mengetahui bahkan ada yang mengikuti pilihan beliau. Karena adanya santri nderek kyai (santri ikut kepada kyai) hal tersebut terjadi dikalangan orang-orang yang hidup disekitar kalangan pesantren. Sehingga dengan

nasihat tidak ada paksaan pun mampu mempengaruhi pilihan masyarakat secara tidak langsung. Selain untuk kepentingan masyarakat meskipun hal tersebut tidak jauh dari adanya unsur kepentingan politik, juga karena kyai Hasib mempunyai caranya untuk mengarahkan masyarakat berpegang pada amar ma'ruf nahi munkar. Selain dengan cara forum-forum keagamaan juga bentuk ajakan dukungan yang dilakukan kyai Hasib melalui personal individu juga dilakukan ketika beliau sesekali mampir atau bertem dengan jejaring beliau.

gambar 2 dukungan ulama terhadap Munjidah

Sumber: (Instagram Emma dan Munjidah)

Dengan adanya bukti foto-foto diatas menggambarkan bahwa dengan adanya bentuk dukungan ulama terhadap Munjidah dilakukan melalui berbagai peringatan hari besar islam, dimana dalam foto diatas banyak dihadiri oleh ulama baik dari kalangan kyai maupun bu nyai. Adanya dukungan ulama terhadap elit politik seringkali terjadi melalui kegiatan keagamaan, hal itu juga terjadi terhadap dukungan ulama kepada Munjidah, dimana dalam kegiatan keagamaan baik dari sholawat, bahkan pengajian rutinan ahad wage juga Munjidah menghadiri sekalian dikenalkan terhadap jama'ah yang mengikuti dalam kegiatan pengajian tersebut maupun yang

menghadiri kegiatan sholawat, bahkan hingga maulid Nabi SAW. Salah satu contoh kata yang disampaikan ulama dalam mendukung Munjidah pada kegiatan keagamaan "Beliau niki Ibu Munjidah sosok pemimpin perempuan yang merupakan santri bahkan keluarga Pondok Pesantren Tambakberas, beliau ini sedang berjuang mencalonkan sebagai Bupati Jombang yang insya allah sudah jelas secara keilmuan sudah tidak diragukan lagi". Meskipun kata-kata tersebut terkesan sangat general tidak langsung mengarahkan dukungan akan tetapi hal ini mampu mempengaruhi pilihan para jama'ah yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk memberikan dukungannya terhadap Munjidah, karena pada dasarnya di Kabupaten Jombang adanya tingkah bahkan dawuh dari para ulama memberikan efek begitu besar terhadap para pengikutnya sehingga tak jarang muncul kata santri nderek dawuh kyai. Adanya bentuk dukungan tersebut juga terjadi ketika di pilkada 2018 dan 2024.

Dengan adanya ajakan secara individu oleh kyai Hasib dengan cara bertemu atau berkunjung langsung kerumah alumni, maupun masyarakat Jombang, orang-orang yang di kunjungi oleh beliau merasa diperhatikan, merasa senang dikunjungi oleh ulama yang terkenal, dan merasa masyarakat dianggap keberadaannya. Dengan adanya cara ajakan secara individu inilah mampu membangun adanya ikatan emosional yang terbangun antar kyai Hasib dan pengikutnya.

2. Mobilisasi keluarga ulama

Munjidah Wahab merupakan calon bupati yang masih kalangan dari ulama Tambakberas melalui jalur kyai Wahab Hasbullah, merupakan tokoh ulama yang begitu dihorwati di Daerah Jombang. Selain itu kyai Wahab merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur dan beliau semasa hidup dalam organisasi dan sosialnya begitu tinggi sehingga dari Kalangan ulama serta masyarakat menilai kyai Wahab beserta anak turunnya merupakan kalangan keluarga yang terkenal baik dan suka membantu dikalangan masyarakat. Karena itu Munjidah memiliki kedekatan secara emosional dengan ulama-ulama Tambakberas terkhusus dengan keluarga kyai Hasib, sehingga adanya kiprah politik dai Munjidah Wahab, selain Munjidah dikenal sebagai tokoh perempuan yang berjuang di pemerintaha, beliau juga dikenal dekat dengan keluarga Tambakberas sosok yang aktif di Organisasi terkhusus beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Muslimat Jombang.

> “Bu Munjidah itu orang yang terkenal dekat dengan ulama karna beliau juga masih dari kalangan ulama, jadi kenapa alasan kyai Hasib mendukung bu Munjidah selain dari kinerjanya yang bagus beliau masih keluarga dari Tambakberas mas.” (Wawancara, Wafiyul Ahdi, Pengasuh Pondok Tambakberas Jombang, 25 September 2024).

Tidak hanya kyai Wahab yang terkenal dikalangan masyarakat, tetapi Munjidah juga memiliki kedekatan dengan ulama karen beliau juga hidup dikalangan pesantren. Sebab Munjidah pernah menjabat sebagai Muslimat NU Jombang sehingga beliau juga dikenal dengan kinerjanya dan sosialnya begitu bagus. Hal ini membuktikan bahwa Munjidah juga melanjutkan kiprah para pendahulunya dalam berkiprah di dunia politik. Mengapa alasan kyai Hasib mendukung dengan mengarahkan keluarga besar Tambakberas untuk membantu Munjidah dalam pilkada karena pinsip dari kyai Hasib ketika masih dari saudara beliau harus mendukung dalam menjalankan kontestasi politik. Adanya peran ulama dalam memobilisasi massa melalui keluarga juga seperti contoh kasus yang ditemukan oleh Akbar (2022) dalam penelitiannya berjudul “Dukungan Ulama Kabupaten Bogor terhadap pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan pada pilkada 2018”. Dalam penelitiannya ini adanya faktor dukungan ulama terhadap pasangan Ade Yasin, selain dukungan secara personal juga dilakkan dukungan dengan keluarga besar ulama. Dengan adanya contoh kejadian ini juga terjadi dalam pilkada Jombang sehingga adanya peran Ulama di Kabupaten Jombang menjadi power dalam memberikan mobilisasi massa selain dengan keluarganya juga melalui para pengikut ulama tersebut terkhusus kyai Hasib.

Hal ini sesuai dengan teori Klientelisme mengenai konsep klientelis secara kultural sehingga proses tesebut secara kultur memperkuat hubungan patron dan klien. Sehingga dengan adanya dukungan ulama yang merupakan symbol agama digunakan untuk menjaga hubungan antara patron dan klien (Aspinall, Berenschot 2019). Hal in juga terjadi terhada roses dukungan ulama terhadap Munjidah yang merupakan juga sebagai elit lokal adanya patron-klien terjadi dimana saling memberikan keuntungan timbal balik bai dari bentuk kebijakan yang nantinya mempertimbangkan nlai-nilai keagamaan. Selain itu dalam konsep berfikir historical institusionalisme adanya path dependence (lintasan ketergantungan), kemudian menganggap adanya sejarah sebagai faktor penting yang terjadi dalam kejadian hari ini (Maschab, 2013). Dengan adanya dukungan ulama terhadap elit lokal juga merupakan adanya pengaruh sejarah di era

kyai Wahab juga memberikan dukungan terhadap kyai Bisri, sehingga adanya bentuk dukungan ulama terjadi hingga saat ini pada pilkada 2018, dimana kyai Hasib beserta keluarga besar mendukung Munjidah Wahab pada pilkada 2018 di Jombang.

> "kyai Hasib seringkali dikunjungi oleh para politisi mas, tak heran karena beliau juga dikenal ulama terpandang sehingga para politisi juga meminta restu dan do'a dalam kontestasi pilkada, bagaimanapun seorang ulama dimintai do'a pasti beliau menerima, akan tetapi dalam perihal dukungan beliau memilih untuk support terhadap bu Munjidah. Dengan alasan, bahwa paslon Munjidah-Sumrambah merupakan yang dilahirkan dari kalangan pesantren yang notabennya masih keluarga NU dan secara kedekatan emosional tehadap masyarakat pasangan ini juga sosok dikenal peduli, tidak hanya pada masa pemilihan tapi ketika tidak dalam kontestasi juga beliau sering aktif turun langsung baik dalam acara muslimat maupun silaturahmi biasa, jadi selain sudah dkat dengan ulama juga secaa greshot dikatakan sudah matang." (Wawancara, Dika, abdi ndalem kyai Hasib, 24 September 2024).

Ketika dilihat, dapat dikatakan bahwa Munjidah merupakan elit lokal dan beliau sudah dikenal secara baik dikalangan pesantren maupun masyarakat secara umum. Selain itu juga adanya kyai Hasib merupakan ulama yang dipanuti dan dihormati. Sehingga bias dikatakan secara personal maupun keluarga kyai Hasib sudah mempunyai pengaruh dalam konteks keagamaan di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil dari wawancara, dapat dibilang bahwa Munjidah dikenal yang rajin menjalin silaturahmi kepada kyai NU, selain dari latarbelakang keturunan ulama juga beliau sering memberikan bantuan terhadap masyarakat maupun Yayasan Tambakberas.

Berdasarkan dari penelitian, kyai Hasib memberikan dukungan terhadap Munjidah Wahab dengan menginstruksikan dzuriyah Tambakberas, selain kepada dzuriyah kyai Hasib beserta keluarga juga menggandeng alumni pesantren untuk memberikan dukungan terhadap Munjidah. Adanya dukungan terhadap alumni juga ckup memantu proses moblisasi massa karena alumni Tambakberas juga banyak dari masyarakat Jombang.

“Bu Munjidah perihal dukungan dari pondok pesantren bisa dikatakan sudah clear, dengan kedekatan beliau dengan NU dan keluarga Tambakberas.” (wawancara, Wafiyul Ahdi, pengash Pondok Tambakberas, 25 September 2024).

Meskipun hal tersebut bisa dikatakan sebagai dukungan adanya dinasti politik, akan tetapi Munjidah tidak hanya mengandalkan terhadap keluarga ulama Tambakberas, akan tetapi juga bentuk dukungan yang dilakukan oleh alumni Pesantren cukup membantu. Selain itu dengan dibuktikan Munjidah selaku tokoh yang mempunyai etos kerja yang bagus juga mampu meyakinkan alumni pesantren dalam memberikan dukungan terhadap Munjidah

gambar 3 Dukungan keluarga ulama Jombang

Sumber: (Instagram Munjidah)

Dengan adanya foto-foto diatas menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan dukungan ulama tidak hanya dalam ranah keagamaan, hal ini juga terjadi terhadap keluarga-keluarga ulama dimana saling mendukung Munjidah. Dukungan ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga pondok Tambakberas, melainkan juga mendapat dari dukungan pondok pesantren yang ada di Jombang, karena pada dasarnya pondok

pesantren di Jombang masih ada hubungan keluarga satu sama lain. Munjidah juga mendapatkan dukungan oleh pondok pesantren Darul Ulum, Cukir, Denanyar, Tebuireng. Hal tersebut dibuktikan melalui momentum-momentum yang dihadiri oleh Munjidah, seperti yang terjadi pada Haul Pondok Cukir dengan dihadiri oleh Munjidah Wahab, adanya silaturahmi pasca pengajian di Pondok Tebuireng juga merupakan bentuk pertanda lampu hijau bagi keluarga Tebuireng untuk mendukung Munjidah Wahab. Meskipun berbagai macam bentuk dukungan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Pondok se-Kabupaten Jombang tidak semuanya secara terang-terangan akan tetapi ada beberapa Pondok yang mendukung secara internal keluarga Pondok tanpa dilakukan dukungan secara massif terhadap para santrinya, seperti yang terjadi pada Pondok Denanyar, dimana keluarga Ulama Denanyar mayoritas berpartisipasi dalam partai Politik PKB, yang pada saat itu calon dari PKB juga menjadi lawan dari Munjidah Wahab. Akan tetapi keluarga denanyar memberikan dukungan secara internal keluarga karena pondok denanyar merupakan masih saudara terhadap ulama Tambakberas dimana Kyai Bisri yang merupakan pendiri Pondok Denanyar menikah dengan adik Kyai Wahab yang merupakan pengasuh Pondok Tambakberas pada zaman sebelum orde baru. Dengan adanya hubungan antar pondok pesantren memiliki pengaruh dukungan terhadap Munjidah Wahab dalam mengikuti kontestasi di Kabupaten Jombang.

3. **Mobilisasi Massa ulama melalui alumni Pesantren**

Pondok Pesantren Tambakbera merupakan salah satu pondok tebesar di Kabupaten Jombang dengan jumlah santri 14.000, hal ini menjadikan Tambakberas mempunyai ribuan alumni yang tersebar diberbagai tempat baik dari kota maupun pelosok desa terpencil. sehingga peran alumni Tambakberas dirasakan oleh masyarakat, karena alumni Tambakberas di amanahi ketika lulus harus mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan sosial maupun keagamaan. Dengan adanya jaringan alumni yang kuat juga kyai Hasib memberikan amanah tehadap alumni di Jombang untuk ikut serta dalam mendukung Munjidah yang notabennya masih satu almamater dengan alumni Tambakberas, hal ini dilakukan kyai Hasib melalui personal maupun melalui ngaji rutinan alumni Huwal Habib yang biasanya dilaksanakan setiap kamis malam jum’at. Adanya jaringan sosial alumni juga dapat berubah bersifat politik guna mencapai kemenangan Munjidah dalam pilkada 2018.

Dalam pengertian Klientelisme dimana menjelaskan perihal suatu relasi antar indibidu yang memiliki status tak setara (patron klien) yang meibatkan adanya timbal balik baik secara personal yang dirasakan kedanya sebagai kewajiban moral (Aspinall, Berenschot, 2019). Adanya proses patron klien disini terjadi dalam alumni terhadap kyai dimana kyai merupakan sebagai patron sedangkan si pengiutnya (alumni) sebagai klien dimana nantinya mendi perantara dalam memberikan dukungan terhadap calon yang di support oleh kyai Hasib.

> "adanya silaturahmi antar santri tambakberas selain ndrekeaken kyai ngaji, kita juga terkadang dapat dawuh untuk mendukung bu Munjidah dalam pilkada Jombang, meskipun adanya ajakan dari kyai-kyai Tambakberas tidak memaksa, santri juga memberikan respon baik karena salah satu Khidmah dengan kyai ya ndereaken apa pilihannya, meskipun tidak bias mengajak dengan sekala besar terutama bias mengajak keluarga terdekat untuk ikut memberikan pilihannya ke bu Munjidah mas." (wawancara, Umar Zam, alumni Tambakberas, 02 Oktober 2024).

Bentuk mobilisasi massa yang dilakukan oleh keluarga Tambakberas, melalui jaringan alumni yang biasanya disampaikan melalui rutinan ngaji alumni biasanya disampaikan oleh kyai maupun bu nyai Tambakberas guna memberikan dukungan terhadap Munjidah. Adanya sebaran jaringan alumni tambakberas yang memiliki nama IKABU (ikatan alumni Bahrul Ulum) memang sangat dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat, bahkan hampir setiap kecamatan maupun desa pasti terdapat alumni dari pesantren Tambakberas. Dukungan secara langsung yang dilakukan oleh alumni terhadap pasanga Munjidah-Wahab merupakan inisiatif para alumni atas dasar bentuk Khidmah kepada kyai yang telah memberikan pemahaman ilmu agama secara ikhlas terhadap santri-santrinya dahulu. Hal ini juga menandakan adanya relasi kyai-santri mrupakan implementasi yang telah diajarkan dalam kitab kuning Ta'lim Muta'alim, yang diajarkan melalui ngaji di pesantren.

> "perihal adanya dukung mendukung, dari dzuriyah tidak menekankan beliau menyampaikan semisal bias mendukung ya lebih baik nek mboten ya tidak masalah niku hak panjenengan, niku sanjange yai Hasib ketika teng ngaji Alumni mas, akan tetapi saya sebagai alumni memiliki rasa berbakti kalihan guru secara ikhlas." (Wawancara, Umar zam, alumni Tambakberas, 02 Oktober 2024).

> “kami selaku dzuriyah Tambakberas jga nderek dawuh yai Hasib beliau sanjang nek onok keluarga opo alumni seng berjuang ndek politik yo apike dewe mbantu masio ora iso secara langsung iso lewar do’a opo nyampaikan teng alumni-alumni nalika silaturahmi. Sehingga kami selaku dzuriyah terkadang melalui ngaji alumni bahkan terkadang juga by personal ketika lagi silaturahmi, ada juga dzuriyah yang meminta abdinya untuk menyampaikan ke alumni.” (wawancara, Wafiyul Ahdi, pengasuh pondok Tambakberas, 25 September 2024).

Fenomena yang terjadi adanya relasi alumni IKABU menjadi bagian dari kekuatan politik ini jelas bahwa pesantren tidak hanya eksis dalam ilmu-ilmu keagamaan melainkan juga bergerak di bidang politik. Secara tidak langsung makna poltik dalam pesantren bukanlah sekedar seni mendapatkan kekuasaan, tetapi politik bagian dari mencapai amaliah akhirat melalui keputusan-keputussan yang diambil memoerhatikan dasar-dasar syariat islam. Adanya fenomena nlah menjadi isu dimana religi-politik, adanya partisipasi sebuah institusi agama (pesantren) mampu memberikan dinamika dalam terjadinya pot electoral. Keterlibatan yang dimaksud dalam hal ini di implementasikan oleh Pesantren Tambakberas yang mempunyai legitmasi kuat selain adanya partai politik di Jombang sehingga adanya pesantren melalui, ulama, alumni mampu mengarahkan pilihan masyarakat yang di dukung oleh tokoh ulama pesantren.

Adanya legitimasi sosial inilah menjadi faktor keterlibatan pesantren andil dalam politik praktis merupakan bentik dari religi-politik. Secara tidak langsung adanya alur, keterlibatan pesantren Tambakberas dalam politik electoral diafirmasi oleh masyarakat Jombang yang percaya terhadap pesantren sebagai system sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. Sehingga melalui legitimasi aktor maupun ulama pesantren mempunyai peluang dalam berkiprah melalui partai politik yang pada intinya menjadi sebagai kekuatan secara formal (formal power). Sedangkan para alumni pesantren terwadahi dalam jaringan IKABU sebagai kekuatan politik secara informal (informal power). Maka tak jarang juga ada beberapa tokoh ulama yang masih dalam dzuriyah Tambakberas terjun dalam duni politik salah satunya pada partai PPP. Adanya konsep religi-politik juga memberikan alur pemahaman dimana relasi antar ulama dan alumninya dalam memperkuat jaringan sosial menjadi politik. Berikut adanya gambaran berfikir mengenai religi-politik yang terjadi pada Pondok Tambakberas.

Berdasarkan alur dukungan yang dilakukan oleh ulama melalui mobilisasi masa alumni, kandidat Munjidah sebagai calon Bupati Jombang mendapat dua kekuatan dukungan politik. Pertama, adanya kekuatan politik secara formal melalui dukungan partai politik koalisi yang notabennya masuk dalam beberapa partai politik seperti Partai Persatua Pembangunan (PPP) dan Gerindra. Kedua, adanya dukungan melalui kekuatan politik secara informal yang merupakan bagian dari jaringan alumni Tambakberas yaitu ikatan alumni Bahrul Ulum (IKABU). Selain itu ning Emma yang meruoakan dzuriyah Tambakberas beliau juga aktif dalam partai PPP, sehingga adanya peran dukungan juga terbantu melalui jejaring ning emma bai dari kalangan alumni maupun konstituen masyarakat non alumni Tambakberas.

> “macam-macam mas dukungan yang dilakukan oleh alumni sesuai dengan kemampuannya masing-masing karena dari yai Hasib dawuh juga tidak memaksakan sesuai dengan kemampuannya alumni, nek isone lewat ngaji yo iso lewat ngaji, nek iso ngajake mung keluargane yo mboten nopo-nopo nek orak iso kabeh yo awakedewe seng nyoblos gapopo wes menggugurkan kewajiban. Itu yang disampaikan yai Hasib ketika ada ngaji Alumni.” (wawancara, Ustad Rafif, alumni Pondok Tambakberas, 04, Oktober 2024).

Salah satu Gerakan alumni dalam melaksanakan dukungan terjadi beraneka ragam, ada alumni yang ikut andil langsung dalam partai guna mendapatkan dukungan terhadap Munjidah, ada juga alumni melakukan dukungan dengan silahturahmi secara door to door ke masing-masing alumni maupun masyarakat sekitar alumni tersebut, bahkan ketika tidak bias andil secara besar alumni hanya mendapatkan dukungan semampunya dengan mengajak keluarga dekat. Meskipun dalam mendukung mayoritas alumni berusaha mendukung secara maksimal dengan jaringan-jaringan yang dimiliki oleh alumni.

gambar 4 Bentuk dukungan melalui alumni pesantren

(sumber : Doc. Penliti)

Selain melalui gerakan alumni yang terlibat aktif dalam partai, dukungan alumni terhadap Munjidah Wahab juga terjadi pada forum-forum pengajian kecil yang dilakukan oleh para alumni, hal ini juga memberikan pengaruh besar, karena dapat membantu secara masif melakukan komunikasi antar alumni melalui forum-forum kegiatan pengajian yang tersebar di berbagai Kecamatan di Jombang. Adanya pertemuan tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai ngaji alumni akan tetapi juga seringkali dijadikan sebagai bentuk support dukungan alumni Tambakberas terhadap Munjidah Wahab.

4. Mobilisasi massa ulama melalui Musfat (Muslimat- Fatayat)

Muslimat dan fatayat NU di Kabupaten Jombang memiliki basis massa yang cukup besar dengan proses mobilisasi massa melalui dukungan dua organisasi tersebut bias membantu mendompleng suara dari pasangan Munjidah-Sumrambah. Selain itu bentuk andil dari dzuriyah Tambakberas juga bias dikatakan aktif dalam organisasi massa tersebut, sehingga kalangan ning dari keluarga pesantren Tambakberas mengakomodir Muslimat dan fatayat se Kabupaten Jombang. Selain dari keluarga Tambakberas Munjidah sendiri juga pernah menjabat menjadi ketua PC Muslimat Jombang, sehingga para kader muslimat sudah mengetahui bagaimana kinerja dari Munjidah selama berkiprah di Muslimat.

“adanya peran dari ning dan bu nyai dari kalangan pondok Tambakberas menjadi penyemangat bagi kader perempuan di Jombang mba baik dari muslimat maupun

fatayat, karena dari beberapa Gerakan yang dilakukan mengenai bagaimana peran muslmiat mampu menjadi peran melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, bahkan kemandirian dalam ekonomi melalui umkm kecil, merupakan ada campur tangan dari bu Munjidah dan keluarga Tambakberas mas, tidak heran jika kepercayaan dukungan para kader-kader muslimat ketika dari keluarga Tambakberas ada yang meminta tolong perihal dukungan di politik ya para kader dengan semangat membantu karena melihat dari perjuangan beliau-beliau juga menjadi pemantik adanya organisasi Muslimat dan Fatayat tetap eksis sampai sekarang di Jombang." (Wawancara, bu Alfi, TA sekaligus kader Muslimat Jombang, 28 September 2024).

Dalam proses mobilisasi massa selain melalui forum-forum resmi kegiatan muslimat dan fatayat, juga melalui forum-forum non formal, hal ini juga dilakukan oleh ning Emma selaku keluarga dari pondok Tambakberas dan beliau juga aktif sebagai kader PPP, adanya pertemuan tersebut bertempat di Pondok Putra Al-Wahabiyyah Tambakberas. Dengan adanya pertemuan tersebut diinisiasi guna menyampaikan permohonan dukungan, sekaligus dihadiri oleh pasangan Munjidah dan Sumrambah guna menyampaikan gagasannya didepan para srikandi NU. Selain itu bentuk Komitmen yang dinyatakan oleh ning Emma selaku srikandi NU Jombang bahwa secara tegas memberikan dukungan terhadap Munjidah-Sumrambah, berharap bahwa adanya kader NU perempuan juga mampu memimpin Kabupaten Jombang dengan baik.

"adanya pertemuan kader muslimat dan fatayat se Kabupaten Jombang ya selain forum silaturahmi juga, kita memberikan arahan terhadap kader-kader bahwa Bu Munjidah bagaimanapun selain beliau juga masih ada keturunan dari Tambakberas, beliau juga salah satu kader perempuan yang tegas dan berani untuk memimpin Jombang dengan berbagai karir politik beliau tidak diragukan lagi mas, harapan dari kader-kader juga dengan munculnya bu Munjidah kedepannya eksistensi Muslimat dan Fatayat lebih diperhatkan lagi dalam ruang lingkup gerakan di masyarakat." (Wawancara ning Emma, keluarga Tambakberas sekaligus srikandi NU, 03 Oktober 2024)

gambar 5 Mobilisasi ulama terhadap Muslimat & Fatayat

Sumber: (Instagram Munjidah)

Dengan adanya gambar diatas menunjukan bahwa adanya bentuk dukungan ulama yang dilakukan melalui mobilisasi fatayat dan muslimat. Meskipun dalam agenda diatas sebenarnya merupakan acara do'a bersama dalam memperingati hari santri nasional akan tetapi dalam acara tersebut terdapat bentuk dukungan kampanye dengan dibuktikan adanya alat peraga kampanye pada agenda muslimat dan fatayat tersebut. Adanya agenda tersebut juga dihadiri oleh ning Emma yang termasuk keluarga Pondok pesantren Tambakberas yang ikut aktif dalam kegiatan Fatayat Kabupaten Jombang. Dengan adanya kegiatan memperingati hari santri diatas juga terlihat secara jelas para tamu undangan dari Muslimat dan Fatayat menyatakan dukungan terhadap pasangan Munjidah Wahab, hal ini merupakan bentuk dukungan yang dilakukan keluarga Tambakberas melalui mobilisasi massa terhadap Muslimat dan fatayat di Kabupaten Jombang.

BAB V

POLA RELASI ULAMA DAN KEPALA DAERAH PASCA PILKADA

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan data dan hasil penemuan dilapangan mengenai bentuk pola relasi yang terjadi pasca pilkada berlangsung yang dilakukan oleh ulama terhadap cabup-cawabup Jombang periode 2018-2023. Data diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara langsung terhadap narasumber kalangan ulama, politisi, dan masyarakat pada lokasi penelitian. Pola relasi yang terjadi disini setelah mengenai masa pilkda berdasarkan teori klientalisme Edward Aspinall dann Berenscort (2019) terdiri dari tiga tahapan pendekatan yaitu petama terjadinya pendekatan kulturasisasi, kedua pendekatan marketing, yang ketiga pendekatan institusional yang terjadi pada lembaga masyarakat.

A. Proses terjadinya relasi antara ulama dan elit poitik

Sebagai negara dengan jumlah mayoritas penduduknya beragam Islam, Indonesia sangat terikat dengan praktik politik dan keagamaan baik secara simbolis maupun substansial yang biasanya dipimpin oleh para ulama. Para ulama memiiki pengaruh serta menjadi simbol agama Islam yang sangat dihargai dan diikuti, tidak hanya mengajarkan tentang pedoman agama tetapi juga mengenai pengorbanan serta meningkatkan rasa cinta tanah air di kalangan santri dan masyarakat sekitar.

Selain itu peran ulama tidak hanya berpengaruh secara nasional melainkan juga mempunyai pengaruh besar di tingkat daerah, seperti yang terjadi pada proses Pilkada di Jombang dimana salah satu ulama pimpinan dari pesantren Bahrul Ulum Tambakberas yang memiliki hubungan baik dengan salah satu elit politik yaitu Munjidah Wahab yang maju dalam kontestasi politik sebagai calon Bupati Jombang priode 2018-2019. Keterlibatan ulama dalam mendukung proses pencalonan ini pada mulanya sudah terjalin dari jauh sebelum masa Pilkada berlangsung. Relasi anatara kyai M. Hasib Wahab dan Munjidah Wahab bermula dilatar belakangi dimana Munjidah juga masih keturunan dari pendiri Pondok Pesantren Tambakberas. Hal ini seperti penjelasan salah satu informan sebagai berikut:

> *"Munjidah ini dari nasabnya sudah seperti mbak yu sendiri toh dari waktu masih kecil sudah sering ketemu, Dan siapapun yang menjadi bagian dari pesantren Tambakberas baik santri maupun pengurus lain sudah*

*seperti keluarga. Apalagi Munjidah juga berasal garis keturunan pendiri Pondok Pesantren Tambakberas. (*Wawancara, kyai Hasib, pengasuh Pondok Tambakberas, 24 September 2024*)*

Hubungan diantara mereka ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Munjidah Wahab sebagai berikut: *"Abah kyai M. Hasib Wahab tidak hanya sebagai guru tetapi saudara saya"*. Relasi antara kyai M. Hasib Wahab dan Munjidah Wahab yang bermula hubungan emosional kekeluargaan ini kemudian semakin berkembang kemudian berkembang dalam ranah politik seperti dengan hubungan antara klien, dalam hal ini dimana ulama berperan penghubung antara masyarakat dan pemerintah, memberikan sebuah bentuk dukungan moral terhadap suara bupati, serta kemudian berkembang mengakomodir basis massa yang dimiliki oleh ulama untuk mendapatkan suara. Melalui fatwa yang dikeluarkan ulama dapat mempengaruhi lingkungan sosial, membantu membentuk kepercayaan masyarakat untuk mendukung kandidat politik. Serta arah dukungan dari ulama Tambakberas untuk memberikan intruksi kepada alumni dan warga sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas untuk mendukung munjidah.

Untuk lebih memproleh dukungan dari para ulama pasangan Munjidah Wahab-Sumrambah menekankan pada misinya untuk memberikan mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadian social melalui pembangunan social yang bertumpu pada masyarakat yang dimana masyarkat jombang adalah masyrakat yang mayoritas islam tentu hal ini sangat berguna untuk menunjang kemeratan pembangunan di daerah-daerah yang belum merata guna untuk menambah pendidikan dan infrastuktur terhadap masyarakatnya terutama dalam lingkungan keagamaan. Kedua, memperkuat kebersamaan warga masyarakat sebagai fondasi dari prinsp kemajemukan dalam persatuan. Ketiga, mewujudkan profesionalisme apratur negara dan pengturan kelembagaan sebagai wujud tekad pelayanan kepada masyarakat yang sempurna. Keempat, mengukuhkan martabat pembangunan karakter kemapuan daerah.

"Masyarakat disini mayoritas beragama islam dan banyak pondok-pondok pesantren besar, tetapi juga masih banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan di pondok peantren ntentu saja saat pencalonan saya pasti akan memberikan visi-misi yang terbaik untuk meningkatkan kebutuhan mereka

terutama dalam system pembangunan pendidikan agar masyarakat non santri juga merasakan pendidikan yang sama dan setara, selain itu masih banyak lagi progam yang saya siapkan untuk masyarkat di jombang ini." (wawancara, kyai Hasib, pengasuh Pondok Tambakberas, 24 September 2024)

Dalam hal ini, juga ulama berharap pada kepemimpinan Munjidah bagaimana memperhatikan pendidikan diluar pesantren lebih menjadi program prioritas, bila perlu memberikan pendidikan moral, karena seiring perkembangan zaman yang terjadi dimasyarakat mulai terkikis moral nya dalam ber sosial.

B. Bentuk pola relasi pasca Pilkada Jombang

Hubungan politik dan ulama sebelum masa Pilkada juga berangsung pada masaa pasca Pilkada selesai. Dimana Munjidah Wahab kemudian meralisasiakan progam-progam yang telah disusun saat proses Pilkada. Selain itu, Munjidah juga memberikan timbl balik terhap hak-hak para ulama dan pendukunganya, serta masyarakat Jombang dalam berbagi hal yang bermanfaat.

Hal ini sesuai dengan teori Klientelisme yang merupakan praktik politik dimana pemimpin atau partai politik memberikan keuntungan atau bantuan materi kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Melalui mekanisme sistem kontrol, politisi dapat memperoleh kepatuhan dari penjual suara sehingga penjual suara berkomitmen memberikan suaranya secara hubungan timbal balik setelah adanya proses pembelian suara dengan memberikan uang atau barang, bahkan pelayanan sosial terhadap penjual suara.

Pola relasi yang terjadi disini setelah masa pilkda berdasarkan teori klientalisme Edward Aspinall dan Berenscort (2019) terdiri dari tiga tahapan pendekatan yaitu sebagai berikut: pendekatan kultural, pendekatan marketis, dan pendekatan Institusional.

1. Pola relasi pendekatan kultural

Pendekatan kultural ini menekankan pada kepekaan terhadap logika dan norma kultural secara turun-temurun. Kabupaten Jombang merupakan daerah yang memilik kultur adat istiadat yang kental terutama dalam lingkungan keagamaan, Kabupaten yang bergelar kota santri karena memiiki banyak pondok santren yang

terkenal seperti Tebuireng, Tambakberas, Darul Ulum Rejoso, dan Denanyar. Merupakan daerah strategis dalam pengembangan keteribatan ulama dalam hubungan klientalisme.

Disini hubungan klientalisme yang dimaksud yaitu terjadi dalam bidang keagamaan dimana bupati terpilih priode 2018-2024 Munjidah memberikan ruang terbuka dan sebesar-besarnya kepada para ulama untuk berrkolaborasi dalam peningkatan pembangunan keagamaan yang bersifat umum, seperti melibatkan ulama-ulama dalam kegiatan keagamaan dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW di kontor pemerintah daerah, atau berbagai acara sholawat dan pengajian dan penyelesaian beberapa konflik keagamaan.

Pada masa pemerrintahnya sebagai bupati, dalam penyelesaian konflik keagamaan munjidah memberikan ruang audiensi terbuka kepada Pimpinan daerah muhammadiyah, dan juga para ulama lainya dalam menyelesaikan penentuan permasalahan harri Raya Idhul Fitri 2023. Keterlibatan ulama disini untuk memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada mereka untuk memberikan aspirasinya dan juga hak mereka sebagai bentuk timbal balik pasca pilkada berlangusung.

> *"Adanya perbedaan penetapan hari raya pada waktu itu merupakan suatu perrbedaan yang besar, namun keterlibatan ulama-ulama selain dari pimpinan daerah Muhammadiyan sangat penting untuk memberikan perrtimbangan yang besar dan juga sebagai bentuk dari merealisasikan hak mereka. Dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk tidak cemas, apaalagi disini banyak santri dan masyarakat muslim mas."* (Wawancara, Munjidah, Bupati Jombang, 9 Oktober 2024)

gambar 6 Kordinasi Pemda dan ormas Islam

Sumber: (Jombangkab.go.id)

Dengan adanya bukti foto dan penyampaian dari informan diatas menggambarkan bahwa dengan adanya keterlibatan ulama dari berbagai ormas dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi merupakan suatu bentuk menjaga dan mengeratkan relasi antara Munjidah, pemerintah daeraah dan juga ulama-ulama. Dan tidak hanya itu keterlibatan ulama dari berbagi ormas dalam menyelesaikan konflik keagaman tanpa adanya kerusuhan secara kekeluargaann tanpa adanya kerusuhan juga dapat menarik simpati masyarakat untuk semakin mendukung pemerintah daerah.

Selain itu keterlibatan ulama terutama ulama dari Tambakberas dalam bidang keagamaan juga dapat dilihat kegiatan keagaman diadakan oleh pemerintah daerah dari awal sampai mas jabatan dari Munjidah berakhir. Seperti pada kegitan Sholawat, Maulid Nabi, dan istigosah pengajian Taklim diakhir masa jabatannya. Dalam kegiatan keagaman ini munjidah tidak hanya melibatkan ulama tetapi juga masyarakat sekitar untuk berpartisipasi.

> *"di Jombang keterlibatan ulama yang masif terutama diwadahi melalui perkumpulan para ulama di Jombang mas, namanya forum pengasuh pesantren bersama pemda. Adanya forum tersebut rutinnya setahun sekali dan incidental bisa kumpul sewaktu-waktu ketika diperlukan" (Wawancara, Makhrus Aly, ketua Pondok Denanyar, 21 Oktober 2024)."*

Adanya keterlibatan ulama bersama pemda yang diwadahi melalui forum pengasuh pesantren di Jombang, dinyatakan oleh Mahrus Aly. Dimana forum tersebut merupakan

bentuk relasi yang terjadi antara ulama dan pemerintah daerah pasca pilkada 2018. Adanya forum tersebut dilakukan pertemuan rutin setahun sekali dan insidental bisa berkumpul sewaktu-waktu ketika ada hal-hal yang mendadak ataupun permasalahan yang harus di selesaikan bersama ulama dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melibatkan dalam acara-acara keagamaan, seperti Istighosah dan sholawat yang dilaksanakan di pendopo Kabupaten Jombang.

gambar 7 Dokumentasi Sholawat Pemkab dan Ulama

Sumber: (Jombangkab.go.id)

Dengan adanya bukti foto-foto diatas menggambarkan bahwa Munjidah selalu melibatkan masyaarakat dari berbaagai lapisn dan juga para ulama dalam hal keagamaan. Bahkan, pada akhir masa jabaatanya Munjidah masih mengadakan Istigosah sebagi bentuk doa dan penghormatan untuk memperat hubungannya dengan masyarakat.

Dilibatkannya para ulama dalam bidang kegamaan juga diakui oleh para santri dan masyarakat. Seperti yang dikatakan sebagai berikut:

> *"Bu Munjidah orangnya terkenal dekat dengan ulama dan masyarakat karna beliau juga masih dari kalangan ulama, selain itu walaupun beliau sudah menjabat menjadi Bupati tetap tidak lupa dengan kita, beliau sering mengadakan progam dan acara keagaman mas.''* (wawancara, Ustad Umar, pengurus pondok Tambakberas, 3 Oktober 2024)

2. Pola relasi Pendekatan Marketis

Pendekatan ini menekankan pada strategi yang memotivasi banyak pilihan politik yang diambil para aktor dalam politik klientelisme. Kemajemukan masyarakat Jombang melatarbelakangi Munjidah untuk juga menggunakan pendekatan marketis dalam memperoleh dukungan, sama halnya dengan marketing politik yaitu menawarkan sebuah program melalui visi dan misi kepada masyarakat melalui pendekatan dan diskusi yang dilakukan secara menyeluruh. Melalui pendekatan marketis tentunya mengindikasikan pemasaran politik sebagai upaya untuk menwarkan sebuah program selama lima tahun kepemimpinan nantinya.

Dalam hal ini ketika Munjidah sudah terpilih dan menjabat sebagai bupati pola relasi klientalisme dengan cara pendekatan marketis yaitu dengan cara menjalankan beberapa progam atu kegiaatan dalam bidang pemasaran yang tentu saja melibatkan para ulama dan masyarakat sekitar, terutama di tambakberas. Berapa kegiatan pemasaran yang dilakukan munjidah yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Mendorong UMKM lokal di Kabupaten Jombang untuk naik kelas, dengan meningkatkan kualitas dan kemasan produk

Peningkatan kualitas UMKM ini hampir menyeluruh di jombang, di daerah pesantren Tambakberas sendiri kegiatn tersebut sangat membantu masyarakat khusunya dikalangan alumni santri. karena dalam hal alumni santri sebagai lapisan masyarakat yang ada dijombang ikut berrperan dalam pemeberdayaan ekonomi dengan cara meningkatkan kulitas usaha yang mereka miliki. Dukungan yang dilakukan Munjidah sendiri dengan cara memotivasi danterjun langsung ke masyarakat denagan meramaikan kegiatan festival atau bazar UMKM serta memberikan dana ke desa untuk pembagunan yang dapat disalurkan juga dalam pengembangan UMKM. Dengan keterlibatnnya secaralangsung ini nantinya dharapkan dapat menarik wisatawan.

> *"nantinya santi sudah selesai mondok dan berniat membuka usha kami pemerintah daerah siap mendukung pengembangan umkm yang berlangsung, tidak hanya santri tapi semua masyarakat yag melakukan usaha umkm pasti saya dukung untuk berkembang mas, saya biasnya terjun langsung dalam kegiatan festival atau bazar UMKM supaya*

semakin rame dan banyak yang datang" (wawancara Munjidah, 9 Oktober 2024).

gambar 8 Munjidah menghadiri UMKM

Sumber: (Radar jombang)

Dengan adanya bukti foto tersebut dapat dilihat bahwasanya Munjdah telah menjalankan tugas dan memberikan hak untuk santri, ulama maupun masyarakat sekitar secara umum dari seegala kalangan untuk mengembangkan potensi UMKM yang dimiliki oleh mereka.

b. Menggelar Jombang Festival

Jombang festival diadakan dengan tujuan untuk memperingati hari jadi Kabuaten Jombang dan hari santri nasional (HSN), namun tujuan utama dari festival ini tidak hanya sekedar ajang perayaan, tetapi juga sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mempromosikan potensi pariwisata, dan menyatukan masyarakat dari berbagai daerah.

Selain itu, Kabupaten jombang sebagai daerah dengan julukan kota santri merupakan potensi tinggi untuk meningkatkan wisata religi. Di Tambakberas sendiri terdapat wisata religi (Desa Wisata Tambak beras) yang memang sudah ada sejak dulu, namun dimasa kepemimpinan Munjidah sebagai bupati desa wisata ini lebih dikenalkn lagi kepda masyarakat umum secara nasional melalui adanya Jombang festival. Tentu saja nantinya tidak hanya memberi keuntungan bagi mayarakat sekitar tetapi juga pondok pesantren Tambakberas karena

meningkatkan minat menjadi santri disana. Tidak hanya di daerah sekitar sana, peningkatan potensi wista religi juga untuk daerah-daerh lain juga terutama di daerah dekat pondok pesantren. Adanya jombang festival ini didukung oleh ulama Tambak beras sebagai berikut:

> *"progam Jombang festival ini sangat bermanfat menurut saya mas, meskipun peminat wisata religi di desa wisata Tambak beras ini sudah banyak, tapi dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat meningkatakan lebih banyak lagi wisatawan dari luar daerah."* (wawancara, Wafiyul Ahdi, ketua Yayasan Tambakberas, 25 September 2024).

gambar 9 Kegiatan Festival Jombang

Sumber: (Jombangkab.go.id dan Seketsanusantara.id)

Adanya bukti foto-foto diatas menggambarkan bahwa dengan dilaksanakannya Jombang Festivalini sebagai bentuk realisasi progam Munjidah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi daerah, terutama wisata-wisata religi yang ada banyak sekali dikabupaten Jombang. Dengan festival ini juga dapat memperkuat kerjasama antar wilayah, kususnya dalam perkembangan ekonomi dan memfasilitasi investor atau pelaku usaha untuk berinvestasi dikabupaten jombang.

Serta, harapan dari ulama dalam melestarikan budaya Kabupaten Jombang melalui festival ini mampu mengenalkan secara luas bahwa Jombang memiliki kultur kebudayaan yang menarik, serta memberikan santri maupun masyarakat untuk berkreasi dalam festival Jombang. Akan tetapi tidak sampai meninggalkan ciri khas Jombang sebagai kota santri.

3. Pendekatan Institusionalis

Pendekatan pola relasi pasca Pilkada ini menekankan pada hubungan yang terjadi pada institusi atau lembaga masyarakat. Di Kabupaten Jombang sendiri banyak lembaga masyarakat yang mendukung Munjidah dalam Pilkada yang berlangsung saat itu,

keterlibatan ulama dalam proses dukungan itu akhirnya muncu klientalisme secara pendekatan Institusional dalam bidang pendidikan dan bidang kebijakan masyarakat. Dalam hal ini Munjidah memberikan perhatian lebih karena banyak sekali hal yang harus di sesuaikan dan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan system pembelajran dan aturan bagi ulama maupun masyarakat umum dikabupaten Jombang.

a. Dalam Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan ini Munjidah selaku bupati terpilih pada pilkada Jombang 2018-2024 menerapkan system kurikulum Muatan Lokal pendidikan Diniyah yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 41 tahun 2019, untuk mengembangkan kompetensi siswa yang telah di sesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Yang mana pelaksanaan kurikulum muatan lokal Diniyah ini wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yakni satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Upaya penerapan kurikulum muatan lokal keagamaan diantaranya dengan melakukan kegiatan pembiasaan. Berdasarkan observasi yang saya lihat bahwa setiap pagi anak anak sebelum masuk halaman sekolah diwajibkan turun dari sepeda lalu menyapa bapak ibu Guru kemudian mengambil posisi duduk untuk siap melaksanakan sholat dhuha, membaca asmaul khusna serta membaca surat-surat pendek dalam juz Amma setiap hari, serta belajar menulis pego.

> *"Di Kabupaten Jombang ini, walaupun terkenal dengan kota santri dan pendidikan agamanya kental tapi masih banyak juga anak-anak yang belum bias mengaji, lebih tepatnya banyak anak yang berasal dari sekolah negeri yang lebi banyak menyerap materi umum, banyak yang belum lancer mengaji biasaanya baru di tahapan iqro. Dan disinilah pendidikan diniyah mengajarkan kepad anak-anak kitab suci Al-Quran dari dasar dan terutama jus 30, dan untuk tahap awal embelajaran diniyah biasanya hanya disaampaikan secara lisan untuk pembelajaran Bhasa arab dengan melafalkan kosa kata dan Nahdomnya. "*(wawancara, Munjidah, Bupati Jombang, 9 Oktober 2024)

gambar 10 Sosialisasi Mulok oleh Dinas Pendidikan.

Sumber: (Radarjombang dan Jombangkab.go.id.)

Gambar diatas menjelaskan bagaimana sinergi Pemerintah Kabupaten Jombang dan pesantren dalam menyusun kurikulum muatan lokal dari segi pendidikan agama yang kurang di Jombang kurikulum Muatan Lokal pendidikan diniyah sudah dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan Bupati yang diterapkan oleh Munjidah dalam mendukung pendidikan keagamaan bagi anak-anak sesuai yang diajarkan dengan para ulama-ulama terdahulu.

Dalam bidang pendidikan Mujidah juga memberikan beasiswa bagi para santri, salah satunya beasiswa kepada siswa/siswi Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas yang dilaksanakan di Masjid Al Madinah MAN 3 Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas bersama dengan BUMN Perum Perhutani Kabupaten Jombang. Beasiswa ini bersal dari Dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang di salurkan kepada Siswa yang berprestasi. Tujuan beasiswa santri ini yaitu sebagai wujud kepedulian dalam bidang pendidikan di pondok pesantren yang harus tersu dikembangan agar kulitasnya terus meningkat dan juga agar para santri dapt bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu hingga berpestasi tinggi hingga memberi manfaat untuk dirri sendiri dan masyarakat.

> *"Beasiswa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini progam yang direncanakan untuk kesejahteraan santri atau siswa siswi yang berprestasi di Tambakberas supaya mereka juga lebih semangat untuk*

belajar dan berprestai lagi kedepannya." (wawancara, Munjidah, Bupati Jombang, 9 Oktober 2024).

Beasiswa pendididikan santri yang diberikan kepada siswa/i, MAN 3 Tambakberas, merupakan bagian dari perhatian pemerintah daerah Jombang terhadap para santri yang berprestasi. Sedangkan beasiswa yang diberikan per tahunnya Rp. 150.000.000. sedangkan untuk proses pembagian beasiswa per semester Rp. 75.000.000, untuk dialokasikan kepada lima puluh siswa/i MAN 3 Tambakberas.

gambar 11 Penyerahan beasiswa terhadap siswa Tambakberas.

Sumber: (Radarjombang)

Dengan adanya foto diatas membuktikan bahwa peran relasi ulama dan elit lokal dalam memberikan dukungan memiliki hubungan timbal balik sehingga beberapa program beasiswa memberikan kebermanfaatan bagi santri Tambakberas. Selain itu juga para pemerintah daerah juga tidak hanya memberikan beasiswa ke santri tetapi juga kepada siswa yang berada di Kabupaten Jombang.

b. Bidang Kebijakan Masyarakat

Kasus minuman keras, baik miras oplosan maupun sejenisnya, masih marak beredar di Kabupaten Jombang dan meresahkan masyarakat apalagi. Keresahan ini, berawal dari ulama yang mendapat banyak laporan bahwa disekitar makam pahlawan banyak warung-warung yang menjual miras. Sehingga makam pahlawan dijadikan tempat untuk minum-minuman yang seharusnya kurang etis di area makam para pejuang kemerdekaan. Apalagi di lihat dari latar belakang masyarakat Jombang mayoritas beragama muslim dan ditambah juga Jombang sebagai daerah kota santri. Sehingga banyak masyarakat maupun ulama menentangnya. Maka untuk memberantas beredar luasnya miras di masyarakat Munjidah menerapkan kebijakan tindak pidana ringan sampai berat bagi msyarakat yang menjual, meminum atau mengedarkan miras. Adanya kebijakan ini juga berasal dari masukan para ulama dan koloborasi dari pemerintah daerah dengan ulama-ulama kabupaten jombang guna untuk menjaga dan melindungi kota dari hal-hal yang bersifat negatif.

Selain itu Munjidah juga melakukan pembinaan mental, spiritual terhadap korban minuman beralkohol. Munjidah membentuk Pokja Pemberantasan Minuman beralkohol dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait seperti SATPOL PP Jombang, Polres Jombang dan Kodim 0814 dalam rangka pemberantasan penjualan miras yang berkedok Warkop dan Angkringan.

> *"Di Jombang peredaran miras masih luas sekalidi masyarakat dan meresahakan. Banyak muda-mudi mabuk-mabukan maka dari itu saya menerapkan peraturan tentang pemberantasan miras dan menghimbau masyarakat untuk tidak menjual atau mengkonsumsi miras."* (Wawancara, Munjidah, Bupati Jombang, 9 Oktober 2024)

Kebijakan mengenai pemberreantasan miras ini juga didukung oleh banyak pihak, seperti berikut ini:

> *''Dari kebijkan Bu Munjidah ini saya liat banyak satpol PP yang bergerak untuk membrantas miras, dan hal ini sangat bagus untuk membersihkan*

lingkungan dari hal-ha yang tidak baik apalagi mengancam juga mas"
(wawancara, Pak Mahrus Aly, pengurus Denanyar, 23 September 2024)

gambar 12 penyitaan miras oleh polres jombang

Sumber: (Suara Jatim Pos.com)

Dengan adanya foto tersebut menjadi bukti bahwa Adanya kebijakan ini mendapat mengurangi peredaran miras dan juga mendapat dukungan baik dari masyarakat, maupun ulama. Karena banyaknya keresahan ulama terhadap masyarakat Jombang yang pesta miras sehingga ditakutkan memberikan pengaruh tidak baik terhadap santri, sehingga keresahan ini juga di respon oleh Munjidah, lalu memberikan ketegasan bahwa Jombang kota anti miras. Adanya karangan itu pastinya guna menghindari kemudharatan (merugikan).

BAB VI

DAMPAK RELASI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI SEKTOR PENDIDIKAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak relasi yang telah terjadi dalam mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Jombang. Selain Jombang dikenal sebagai kota santri. Dengan adanya pondok pesantren di Kabupaten Jombang mengundang berbagai santri dari berbagai daerah, yang dulunya pondok pesantren hanya dalam pendidikan non-formal seiring berkembangnya waktu memiliki pendidikan secara formal. Selain adanya pondok pesantren di Jombang sendiri memiliki banyak sekolah umum non pesantren dengan jumlah SD/MI 819 sedangkan SMP/Mts 258 sekolah. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah kabupaten, dimana mulai memperbaiki fasilitas pendidikan di Kabupaten Jombang, selain itu di era Munjidah merumuskan kebijakan madrasah diniyah diterapkan sekolah yang dibawahi naungan dinas pendidikan, atas dasar pertimbangan antara pemerintah dengan ulama yang ada di Kabupaten Jombang. Adanya relasi terjadi tidak hanya dalam momentuk pilkada akan tetapi ulama juga memiliki pengaruh dalam membangun kabupaten Jombang terkhusus dalam ranah pendidikan, melalui madrasah diniyah yang diterapkan adanya kurikulum muatan lokal keagamaan.

A. Pembangunan infrastrukur pendidikan

Di era kepemimpinan Munjidah wahab, dalam jangka tiga tahun kepemimpinannya terus berbenah terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan secara terus menerus. Karena salah satu prinsip yang diutamakan ulama dalam memuliakan pendidikan baik dari guru, murid bahkan fasilitas harus memadai. Hal itu menjadi acuan Munjidah dalam mewujudkan pendidikan yang memiliki karakter unggul dan daya saing yang kuat, maka dari itu dalam mewujudkan tersebut Munjidah berbenah dalam infrastruktur guna mewujudkan prose belajar yang nyaman dan aman.

> *"selama tiga tahun menjabat Bu mun menjadikan pendidikan terus maju mas, salah satunya dalam membangun infrastruktur dari 2019-2021." (Wawancara Supartini, dinas pendidikan, 30 September 2024).*

Pada masa kepemimpinan Munjidah, baik dari segi pembangunan, perbaikan maupun perawatan sarana dan prasarana terus dilakukan guna menciptakan system pendidikan yang unggul. Beberapa yang dilakukan rehabilitasi ialah pada 2019.

Antaranya, 17 PAUD dengan alokasi anggaran turun Rp 4,3 miliar, 338 SD dengan alokasi anggaran Rp 20,2 miliar dan 147 SMP alokasi anggaran Rp 26,9 miliar. Pada tahun 2020 juga banyak sekolah yang dilakukan rehabilitasi. Antaranya, 21 PAUD alokasi anggaran Rp 3,1 miliar, 126 SD melakukan rehab dengan alokasi anggaran Rp 28,1 miliar dan sebanyak 115 SMP yang melakukan perbaikan dengan alokasi anggaran Rp 16,8 miliar. Dengan adanya perbaikan Gedung maupun sarpras guna memadai sekolah dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Adanya factor yang menjadikan perbaikan ialah karena mayoritas Gedung yang sudah mulai rentan, sehingga banyak bangunan yang rawan ambruk ketika musim hujan turun.

Dengan adanya perbaikan fasilitas pendidikan mendapat apresiasi ulama Jombang karena pada dasarnya dengan mewujudkan pendidikan yang baik tentu harus didukung dengan sarana yang baik juga. Hal ini juga mendapatkan apresiasi oleh sejumlah kepada sekolah yang ada di Jombang karena pemkab melalui dinas pendidikan sangat getol dalam perbaikan Gedung sekolah, yang menjadikan siswa nyaman di kelas, guna meningkatkan mutu pendidikan.

gambar 13 Alokasi Anggaran SD dan SMP

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**257.000.951.361**	**274.280.941.561**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**116.543.466.200**	**118.070.514.813**	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	625.513.000	625.513.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.773.410.100	4.287.450.100	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.062.132.800	6.006.132.800	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	411.244.497	411.244.497	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	413.074.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	990.000.003	1.020.580.003	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	4.705.974.750	2.370.220.750	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.418.422.300	8.061.112.300	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.250.000.000	3.566.594.997	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	75.129.300	75.129.300	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	642.727.300	847.047.300	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Perdidikan Sekolah Dasar	19.680.451.050	17.493.856.053	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	231.681.100	241.681.100	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	72.676.780.000	72.650.878.613	
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**81.298.473.878**	**83.343.737.195**	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	400.782.750	400.782.750	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	547.789.950	547.789.950	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	438.893.300	629.893.300	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	186.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	159.000.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	255.000.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000	100.000.000	
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	0	319.000.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	5.812.379.500	3.083.043.500	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	14.738.981.178	18.185.399.108	

Sumber: (APBD Kabupaten Jombang 2023)

Dengan adanya bukti alokasi anggaran diatas menunjukan bagaimana komitmen yang dilakukan Munjidah dalam melakukan perbaikan fasilitas pendidikan guna memberikan pelayanan pendidikan ditingkat SD dan SMP yang nyaman dan kondusif. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan Munjidah Wahab dalam pembangunan di sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas pada masa kepemimpinannya. Selain perbaikan fasilitas sekolah Munjidah juga memberikan bantuan berupa seragam gratis bagi siswa sekolah dasar yang masuk dalam alokasi anggaran diatas.

gambar 14 Alokasi anggaran PAUD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	389.172.400	389.172.400	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.541.982.000	5.561.982.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	98.998.300	98.998.300	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	52.906.340.000	53.104.521.387	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**29.110.935.539**	**31.202.115.509**	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	433.192.000	533.192.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	210.709.600	210.709.600	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	22.000.000	22.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0	1.400.000.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.694.342.100	5.977.142.100	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	22.450.300.000	22.758.680.000	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	300.391.839	300.391.809	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**30.048.075.744**	**41.664.574.044**	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	115.173.900	115.173.900	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14.437.500	14.437.500	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24.668.584.344	36.240.202.644	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.249.880.000	5.294.760.000	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**1.081.831.350**	**1.081.831.350**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.081.831.350**	**1.081.831.350**	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.081.831.350	1.081.831.350	

Sumber: (APBD Kabupaten Jombang 2023)

Selain SD dan SMP yang mendapatkan perhatian oleh Munjidah, melainkan PAUD juga menjadi perhatian Munjidah selain dari perlelengkapan penunjang belajar mengajar, beliau juga memberikan perbaikan fasilitas pendidikan yang ada di PAUD. Selain itu juga langkah yang dilakukan melalui pengadaan alat praktik guna mendorong minat belajar anak usia dini dalam mengembangkan perkembangan motoric. Tidak hanya itu bentuk dukungan yang dilakukan dalam mengembangkan PAUD juga melalui pengembangan pelatiha guru PAUD guna meningkatkan kompetensi dalam mengajar dengan menggunakan pendekatan yang tidak membosankan dan melihat dari kebutuhan anak. Dalam aspek fasilitas juga dianggarkan adanya perbaikan Gedung PAUD.

> *"pada tahun 2021 Ibu Munjidah melakukan perbaikan kelas yang ada di PAUD, karena melihat kondisinya yang kurang memadai sehingga ditakutkan membahayakan anak-anak dalam proses belajar." (Wawancara, Srie Soejati, kepala PAUD, 3 Oktober 2024).*

Adanya perbaikan fasilitas Gedung juga mendapat respon dari Munjidah melalui alokasi anggaran diatas yang diajukan melalui dinas pendidikan, hal ini guna memastikan bangunan yang sudah tidak layak guna melakukan perbaikan agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan nyaman.

B. Muatan lokal keagamaan sebagai pelajaran wajib

Mengembangkan dunia pendidikan telah menjadi cita-cita bagi ulama maupun Munjidah Wahab. Pasca dilantiknya bupati Munjidah mulai mengajak tokoh agama dalam memperhatikan pendidikan keagamaan yang sesuai masyarakat di Kabupaten Jombang. Adanya hal ini berangkat dari keresahan Munjidah ketika bertemu dengan masyarakat masih banyak yang belum lancar bahkan ada yang belum bisa baca Al-Qur'an. Selain itu para ulama di Jombang juga mempunyai pemikiran yang sama akan tetapi lebih memandang bagaimana masyarakat yang mempunyai anak tidak disekolahkan di Pondok bagaimana dalam mempelajari ilmu agama, sehingga munculah kebijakan atas dasar kesepakatan para tokoh agama dan bupati Jombang melalui kebijakan muatan lokal keagamaan di terapkan melalui dinas pendidikan untuk dilaksanakan di sekolah dasar.

> *"adanya kebijakan yang dilakukan oleh Ibu Mun merupakan salah satu keresahan dari Ibu ketika ada kegiatan bersama masyarakat pada saat itu ibu menunjuk pengurus ranting NU memipin do'a akan tetapi dalam membaca do'a tidak lancar. Dari situ ibu cerita ke saya {aku prihatin mba masyarakat Jombang masih banyak yang belum lancar baca al-qur'an terus pie leh e nek bapak e sholat yo?} nah mulai dari situ ibu mulai berbincang dengan para ulama guna mecentuskan bagaimana hal tersebut bisa mengatasi perihal keagamaan bagi masyarakat Jombang." (wawancara Alfiyah Ashmad, Tenaga Ahli Bupati, 28 September 2024).*
>
> *"Salah satu tugas ulama juga ikut andil dalam merumuskan kebijakan, salah satunya berangkat dengan keresahan yang sama le, kebetulan juga Ibu Munjidah selain politisi juga beliau ada basic dalam pendidikan sehingga sehingga beliau juga sering menemui para kyai salah satunya dengan saya berdiskusi bagaimana pendidikan keagamaan juga bisa tersampaikan secara menyeluruh meskipun tapa memgenyam pendidikan di Pesantren, dengan hal itu muncul ide adanya muatan lokal keagamaan di*

sekolah dasar." (wawancara Gus Wafi, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tambakberas, 25 September 2024).

Dengan langkah tersebut adanya peran ulama dalam mempengaruhi kebijakan di bidang pendidikan keagamaan melalui relasi antar ulama dan pemerintah daerah dalam mencetuskan program pendidikan keagamaan madrasah diniyah. Karena melihat mayoritas penduduk masyarakat Jombang 98% menganut kepercayaan islam. Selebihnya beragama Kristen, konghucu, budha, dan hindu.

Berangkat dari keprihatinan ulama dan pemerintah daerah memiliki gagasan untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah bagi siswa SD, yang nantinya berlanjut ke Jenjang SMP. Ini sebagaimana penjelasan oleh salah satu informan: *"Lek arek-arek gelem belajar ngaji, belajar fiqih sesuci, mugo-mugo gawe sadar qong tuwone pengin belajar ngaji, mugo-mugo wong tuone sungkan karo anak-anak e nek gaiso ngaji*" (kata yai Hasib). Melalui dawuh tersebut Munjidah membangun strateginya untuk menyadarkan hati masyarakat agar mau belajar Al-Qur'an. Selain itu ia membayangkan bahwa dengan adanya program tersebut 10 atau 20 tahun mendatang mayoritas masyarakat Jombang sudah mampu membaca Al-Qur'an dan memahami dasar-dasar ilmu fiqih.

Ide tersebut kemudian diturunkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dengan membentuk tim penyusun muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyah. Kurikulum tersebut diterapkan diseluruh SD. Ruang lingkup muatan lokal sendiri memuat pelajaran keagamaan islam. Seperti bab sholat, baca tulis Al-Qur'an, praktik ibadah dan do'a, serta hafalan juz amma. Adanya kurikulum tersebut pastinya diselaraskan dengan Jombang identik dengan kota santri, daerah yang ditopang dengan ratusan pondok pesantren, ribuan santri, dan kehidupan warga yang harmonis dan religious. Adanya kebijakan tersebut akhirnya berhasil di tetapkan pada tahun 2019, melalui banyak pertimbangan ulama-ulama Kabupaten Jombang akhirnya dapat dirumuskan melalui Perbup Nomor 41 Tahun 2019 Tentang muatan lokal keagamaan dan Madrasah Diniyah. Adanya Perbup ini guna meningkatkan pengalaman pengetahuan siswa mengenai pemahaman perihal keagamaan, kaidah hukum islam yang berdasarkan kitab salaf, keterampilan dalam menjalankan ibadah, serta membentuk sikap yang berakhlakul karimah.

Dalam proses rekruitmen guru mulok sendiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang bekerja sama dengan kyai-kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang.

Karena dalam hal ini syarat menjadi guru muatan lokal keagamaan merupakan alumni pesantren atau memiliki ijazah S1 bidang keagamaan.

> *"Adanya proses seleksi guru mulok dari dinas pendidikan juga menggandeng para kyai pesantren mas guna menyeleksi para ustad atau calon guru yang sesuai dengan keilmuannya." (Wawancara, Supartini, Dinas Pendidikan Jombang, 30 September 2024).*

Hal ini pastinya terjadi adanya patron-klien dimana, ulama dilibatkan dalam proses kebijakan daerah salah satunya dengan ikut andil dalam proses seleksi guru mulok, memberikan perlindungan sosial untuk semua masyarakat, terlepas kepada siapapun dukungan politiknya (missal, dengan adanya upaya pemerintah membuat kebijakan Pendidikan keagamaan di Sekolah dasar yang nantinya melibatkan guru agama dari kalangan pesantren). Mobilisasi politik menggunakan program sosial yang biasa sering disebut sebagai politik alokasi (allocation policies) dibiayai oleh pemerintah. Sama halnya seperti pork barrel dengan adanya proyek-proyek yang didistribusikan melalui kesejahteraan dengan konsep mobilisasi politik yang menggunakan program sosial juga diralisasikan pasca pemilu. Target penerima distribusi kesejahteraan kelompok sosial yang masih berada dalam kelas sosial tertentu. Maka dari itu, ulama dan elit lokal juga melibatkan para santri yang di distribusikan melalui rekruitmen guru mulok. Hal ini adanya timbal balik antar pemerintah dengan ulama dan ulama memberikan manfaat juga terhadap para pengikutnya (santri). Kolaborasi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kolaborasi antara Pemerintah dan ulama dalam penyusunan kurikulum

Dalam kurikulum Madrasah diniyah disusun untuk memperdalam pendidikan keagamaan siswa di sekolah umum, khususnya di jenjan SD. Materi mencakup beberapa aspek penting dari ajaran Islam, yang dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan warga Jombang yang mayoritas agama Islam.

> *"memang benar mas, adanya rekruitmen juga ada andil dari para masyayikh pesantren guna menyeleksi para guru mulok, bahkan dalam penyusunan kurikulum juga melibatkan ustad dan masyayikh dalam menyelaraskan agar siswa yang berada di sekolah umum dapat merasakan ilmu agama yang berada di Pondok pesantren, apalagi yang ditekankan oleh para masyayikh ya perihal dasar, dasar fiqih, kaya bab sesuci, bab sholat, niku penting banget karena banyak diluar sana yang belum memahi perihal sesuci, padahal niku*

penting sanget ndamel keberlangsungan ibadah mas." (Wawancara, Ustad Nurrohman, guru Madin ponpes Denanyar, 24 September 2024).

Bahkan sebelum adanya perancangan kurikulum, pemerintah melakukan diskusi dengan para ulama dari berbagai pondok pesantren di Jombang, guna memberikan arahan berdasarkan ilmu para ulama yang kompeten dalam ilmu agama dan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum lebih mudah dalam memahami keagamaan. Pasca adanya diskusi dengan ulama, mulailah dari dinas pendidikan membentuk tim gabungan yang terdiri dari tenaga ahli pendidikan, dan ulama untuk menyeleksi calon guru mulok baik dari alumni pesantren atau ustad yang masih aktif mengajar di pesantren, serta melibatkan dalam perancangan kurikulum.

"kulo mendukung adanya kebijakan yang mewajibkan sekolah umum diwajibkan belajar keagamaan karena adanya kebijakan tersebut bisa membangun relasi antar ulama dan pemerintah semakin terjalin nantinya juga bisa memberdayakan alumni pesantren untuk tetap berhidmah mengamalkan ilmunya meskipun tidak harus di pesantren bisa berjuang memahamkan dasar-dasar agama di masyarakat secara umum, guna menyelamatkan generasi yang diluar pondok untuk tidak buta pemahaman agama, pesen para sepuh pesantren lain yang ditekankan dalam pengajaran ya bagaimana siswa memahami tajwid, belajar pegon ibarat wong jowo ya iku aksara jawa ne islam, terus juga menekankan perihal dasar-dasar fiqih dan juga menekankan perihal adab mas." (wawancara, Wafiyul Ahdi, ketua Yayasan Pondok Tambakberas, 25 September 2024).

Dengan adanya berbagai masukan dari para ulama mulailah disahkan oleh pemerintah daerah melalui Perbup Nomor 41 tahun 2019 tentang muatan lokal keagamaan guna menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya. Pasca disahkannya kurikulum, dinas pendidikan juga bekerja sama dengan guru keagamaan guna memastikan implementasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah didiskusikan dengan para ulama.

gambar 15 kolaborasi antara ulama dan pemerintah daerah

CAPAIAN PEMBELAJARAN AKHIR FASE B	
Peserta didik memiliki kemampuan memahami pengorbanan seorang ibu saat mengandung dalam kitab Birrul Walidain Peserta didik memiliki kemampuan memahami jasa seorang ayah kepada ibu dan anaknya dalam kitab Birrul Walidain Peserta didik memiliki kemampuan memahami makna rukun Islam dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz 1 Peserta didik memiliki kemampuan memahami ketentuan sebelum melaksanakan sholat dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz 1 Peserta didik memiliki kemampuan memahami cara berbakti anak pada ayah dan ibunya dalam kitab Birrul Walidain Peserta didik memiliki kemampuan memahami tata krama anak pada ayah dan ibunya dalam kitab Birrul Walidain Peserta didik memiliki kemampuan memahami waktu shalat fardlu dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz 1 Peserta didik memiliki kemampuan memahami ketentuan sholat dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz 1	
Birrul Walidaikum	3.1 Memahami pengorbanan seorang ibu saat mengandung dalam kitab Birrul Walidain 3.2 Memahami jasa seorang ayah kepada ibu dan anaknya dalam kitab Birrul Walidain 3.3 Memahami cara berbakti anak pada ayah dan ibunya dalam kitab Birrul Walidain 3.4 Memahami tata krama anak pada ayah dan ibunya dalam kitab Birrul Walidain
Mabadi'il Fiqhiyyah juz 1	3.5 Memahami makna rukun Islam dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz 1 3.6 Memahami ketentuan sebelum melaksanakan sholat dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz 1 3.7 Memahami waktu shalat fardlu dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz 1 3.8 Memahami ketentuan sholat dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz 1

Sumber: (Modul ajar mulok)

dengan adanya gambar diatas merupakan bentuk kolaborasi antara ulama dan pemerintah daerah guna mewujudkan pendidikan keagamaan juga dirasakan oleh masyarakat secara luas, dengan adanya bukti tersebut adanya relasi antara ulama tidak hanya terjadi pada momentum pilkada saja melainkan juga pasca adanya pilkada keterlibatan ulama dalam memberikan dampak pembangunan pendidikan terutama di bidang keagamaan mampu diwujudkan atas kerjasama antara ulama dan pemerintah daerah. Tidak hanya itu adanya pola relasi juga memberikan kebermanfataan terhadap santri maupun alumni karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru mulok meskipun kuota terbatas. Adanya kebijakan tersebut pastinya memberikan adanya patron-klien dimana pada momentum pilkada peran ulama dalam memberikan dukungan terhadap pasangan Munjidah Wahab, pasca adanya pilkada memberikan hubungan timbal balik dimana Munjidah bersama ulama memberikan lapangan pekerjaan bagi santri dibidang keagamaan.

Tidak hanya itu Pemkab juga memberikan insentif kepada guru agama dianggarkan melalui APBD daerah untuk memberikan bisyaroh terhadap guru Madin,"iya kang, untuk guru mulok mendapatkan insentif langsung dari pemkab dengan membuat rekening melalui bank jatim, meskipun ya insentifnya bisa dikatakan tidak terlalu banyak hanya sekitar 670 perbulannya." (Wawancara Ustad Sholeh, guru mulok sekaligus pengurus pondok Tambakberas, 23 September 2024).

gambar 16 Insentif guru mulok bulan Juni

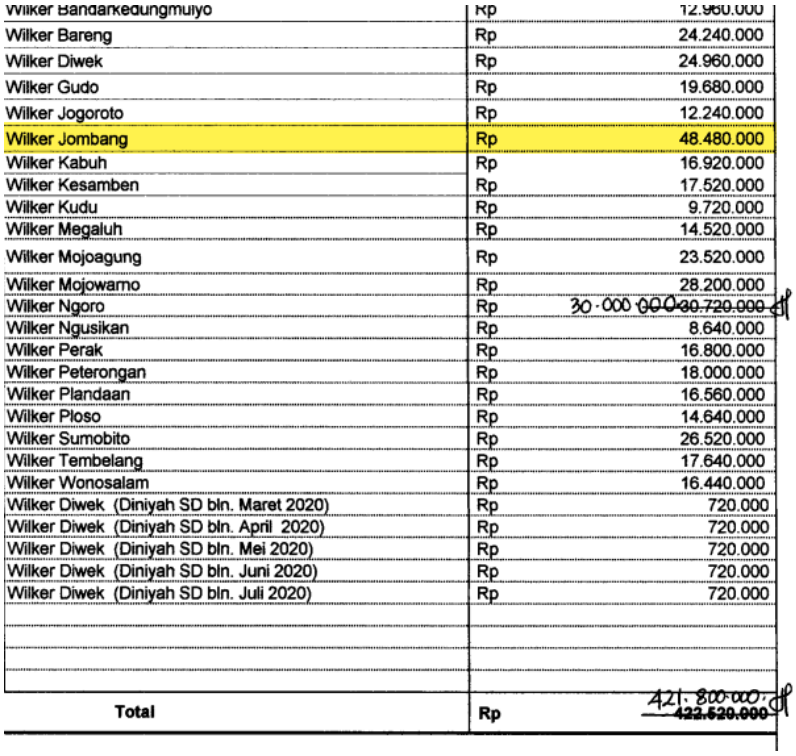

Wilker Bandarkedungmulyo	Rp	12.960.000
Wilker Bareng	Rp	24.240.000
Wilker Diwek	Rp	24.960.000
Wilker Gudo	Rp	19.680.000
Wilker Jogoroto	Rp	12.240.000
Wilker Jombang	Rp	48.480.000
Wilker Kabuh	Rp	16.920.000
Wilker Kesamben	Rp	17.520.000
Wilker Kudu	Rp	9.720.000
Wilker Megaluh	Rp	14.520.000
Wilker Mojoagung	Rp	23.520.000
Wilker Mojowarno	Rp	28.200.000
Wilker Ngoro	Rp	30.000.000 ~~30.720.000~~
Wilker Ngusikan	Rp	8.640.000
Wilker Perak	Rp	16.800.000
Wilker Peterongan	Rp	18.000.000
Wilker Plandaan	Rp	16.560.000
Wilker Ploso	Rp	14.640.000
Wilker Sumobito	Rp	26.520.000
Wilker Tembelang	Rp	17.640.000
Wilker Wonosalam	Rp	16.440.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. Maret 2020)	Rp	720.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. April 2020)	Rp	720.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. Mei 2020)	Rp	720.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. Juni 2020)	Rp	720.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. Juli 2020)	Rp	720.000
Total	**Rp**	421.800.000 ~~422.520.000~~

Sumber: (Pak Nurohman guru mulok, SKPD)

Dengan bukti gambar diatas, bahwasanya pemerintah mengalokasikan anggaran guna memberikan insentif terhadap guru muatan lokal keagaamaan, yang di Jombang sendiri memiliki 1.159 guru muatan lokal keagamaan dengan insentif perbulannya sekitar 670.000 ribu. Adanya insentif tersebut pastinya memberikan manfaat terhadap para guru mulok karena dengan adanya jam kerja guru mulok tidak sepadat guru honorer maupun guru PNS karena sehari hanya mendapatkan satu jam kerja untuk menyampaikan materi keagamaan.

gambar 17 PAGU Muatan lokal Keagaman per tahun

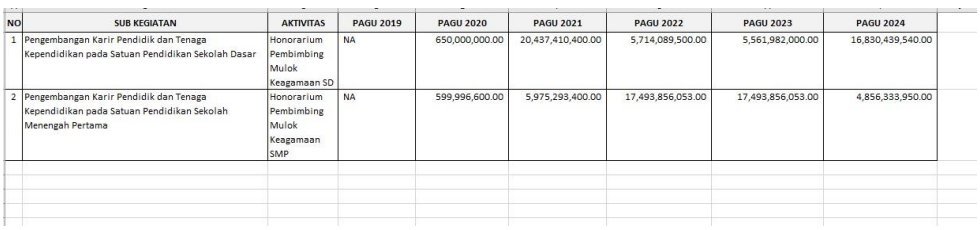

NO	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU 2019	PAGU 2020	PAGU 2021	PAGU 2022	PAGU 2023	PAGU 2024
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Honorarium Pembimbing Mulok Keagamaan SD	NA	650,000,000.00	20,437,410,400.00	5,714,089,500.00	5,561,982,000.00	16,830,439,540.00
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Honorarium Pembimbing Mulok Keagamaan SMP	NA	599,996,600.00	5,975,293,400.00	17,493,856,053.00	17,493,856,053.00	4,856,333,950.00

Sumber: (Bappeda pak Edwin bidang PPM)

Dengan adanya bukti diatas, berdasarkan laporan PAGU yang didapatkan oleh bappeda dimana setiap tahunnya biaya prioritas khusus muatan lokal keagamaan membutuhkan biaya yang begitu besar.

> *"Semenjak terpilihnya Ibu Munjidah, memang mulai masuk program prioritas salah satunya pendidikan baik di infrastruktur bahkan yang masih jarang diterapkan didaerah lain itu muncul gebrakan baru adanya pendidikan keagamaan dengan dialokasikan anggaran yang cukup besar mas, ya adanya kebijakan ini pastinya karena baground beliau sebagai santri dan juga mendapatkan banyak dukungan ulama pastinya kebijakan tersebut juga guna memberikan manfaat untuk masyarakat Jombang" (Wawancara, Pak Edwin, Bappeda Jombang, 6 Oktober 2024).*

Adanya alokasi anggaran yang diberikan setiap tahunnya kurang lebih membutuhkan sepuluh miliar guna menunjang pendidikan keagamaan, pastinya tidak hanya untuk insentif guru melainkan juga guna operasional kegiatan-kegiatan perihal keagamaan, maupun lomba-lomba keagamaan guna memberikan apresiasi selame diajarkan dengan di implementasikan melalui lomba yang diadakan oleh dinas pendidikan dengan kepanitiaannya melalui guru-guru muatan lokal keagamaan.

2. Dampak Kurikulum Madrasah Diniyah

Pasca adanya kebijakan mengenai wajib kurikulum muatan lokal keagamaan, pastinya memberikan dampak secara signifikan baik dari siswa nya maupun lingkungan keluarga siswa tersebut. Dalam hal ini penguatan secara baca Al-qur'an anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah umum juga mendapatkan ilmu membaca Al-Qur'an dengan baik seperti anak-anak yang belajar pada pondok pesantren.

> *"yang Namanya memberikan pemahaman kepada anak-anak kecil ya mas apalagi notabennya wong desa bukan santri pasti awal agak kesulitan dalam memberikan pengajaran seperti membaca dan menulis pegon, menghafal juzz amma, bahkan dalam satu kelas yang cepet nyantol ya mungkin dari 29 anak hanya ada 5 tapi itu juga sudah cukup bagus lah karena penangkapan masing-masing anak berbeda ada yang cepat paham ada yang lambat*

harus diulang berkali-kali." (wawancara, Pak Nurrohman, guru mulok sekaligus ustad madin pondok denanyar, 24 September 2024).

"nggih kulo sebagai tiangsepah remen mas, onok e program mulok arek-arek pancen nek wes ng omah dulinan hp kon ngaji angel, tapi setelah adanya itu memberikan dampak yo aku sebagai wong tuo secara tidak langsung harus melu mengawasi, akhire mau ndak mau juga ikut ngaji neka anakku meh setoran kadang jaluk di simak aku ndisik." (wawancara, mba ina, nama samaran, orang tua siswa SD, 1 Oktober 2024).

Adanya program muatan lokal keagamaan memberikan efek yang begitu baik bagi masyarakat Jombang terutama bagi siswa yang tidak mengeyam pendidikan di Pesantren, dengan adanya progrman tersebut juga memberikan penguatan karakter islami, dimana guru mulok juga memberikan adabnya seorang murid, memberikan pemahaman secara dasar hukum-hukum fiqih guna menjadi landasan awal belajar perihal ibadah untuk menjadi yang lebih baik. Selain itu adanya pendidikan formal keagamaan dengan kurikulum yang telah di bentuk guna menyelaraskan dengan siswa yang tidak belajar di Pondok pesantren tetao mendapatkan pendidikan agama yang setara.

Pada tahun 2023 adanya program madrasah diniyah mulai dirasakan khalayak umum. Para siswa dan siswi memiliki peningkatan kapasitas secara pemahana keagamaannya, terutama yang bersumber dari kitab-kitab klasik (kitab kuning), serta dalam melakukan praktik ibadah sesuai dengan syariat agama. Dinas pendidikan dan kebudayaan telah memberikan surat kelulusan munaqosah juz 30 kepada 1.116 siswa SD melalui surat keputusan dinas pendidikan Nomor:800/2594/415.16/2023 Tanggal: 13 Mei 2023.

gambar 18 Munjidah bersama salah satu siswa yang diwisuda

Sumber: (Disdikbud Jombang)

Dengan dihadiri para ulama, yang pada saat itu dalam uji public secara acak untuk sambung ayat oleh Dr KH Mustain Syafi'I pengasuh Ponpes Madrasatul Qur'an Tebuireng. Selain dalam pemahaman Al-Qur'an, pemahana dasar-dasar fiqih juga terlihat secara nyata.yang pada saat itu dinas pendidikan bekerja sama dengan guru muatan lokal keagamaan mengadakan lomba baca kitab guna memberikan panggung pada siswa/I SD guna menunjukan keahliannya dalam membaca kitab *Mabadiul Fiqhiyyah juz Ats-tsani* adanya program tersebut juga tak lepas dari usaha guru mulok, pemerintah, serta ulama dalam memberikan support dan perhatian yang begitu besar terhadap menjalankan syariat keagamaan.

> *"kyai juga memikirkan bagaimana kedepannya masyarakat Jombang yang tidak diberikan kesempatan mondok, bisa merasakannya melalui sekolah-sekolah umum, karena salah satu perjuangan ulama ya melalui kebijakan agama karena pada dasarnya siyasat atau politik juga bagian dari agama Juz'un minaddin sehinggga keterlibatan ulama dalam memberikan masukan terhadap pemerintah melalui kebijakan muatan lokal keagamaan untuk memberikan pemahaman dasar-dasar fiqih dimulai dari siswa SD." (wawancara. Kyai Salam, pengasuh Pondok Denanyar, 29 September 2024).*

Pemahaman mengenai kitab kuning bukan hanya sekedar mengenai pemahaman tentang cara melakukan ibadah, termasuk dalam hal sesuci. Justru adanya metode pengajaran kitab kuning mendorong pemikiran anak-anak untuk berfikir tentang sebab-akibat, yang merupakan fondasi dari belajar fiqih. Hukum sebab-akibat atau logical thinking sangat penting diajarkan terhadap anak-anak termasuk dalam memberikan peahaman hukum fiqih agar anak-anak yang diluar pesantren mengetahui bahwa dalam beragama harus dilandasi dengan kesadaran berfikir dan tidak dilakukan dengan adanya taqlid buta atau mengikuti tanpa adanya alasan. Ulama berfikir secara jauh guna membentengi anak-anak yang diluar pesantren terkhusus masyarakat Jombang terhindar dari ajaran radikalisme. Karena dalam ushul fiqih sesungguhnya, *Al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa'adaman* (hukum terhadap sesuatu itu ada atau tidak ada, dipengaruhi oleh keberadaan alasannya).

Kurikulum madrasah diniyah ini menjadi contoh adanya kolaborasi yang dianggap memberikan hubungan timbal balik pasca pemilu antara ulama dan peerintah daerah. Hal tersebut tidak semata-mata memberikan keuntungan individu akan tetapi ulama juga memberikan kebermanfaatan terhadap santri nya, dan dampak yang dirasakan juga oleh masyarakat secara umum mendapatkan ilmu keagamaan meskipun tidak mondok. Hal ini juga semakin memperkuat identitas Jombang sebagai kota santri dan memberikan jangka Panjang bagi masyarakat. Bukti kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana ulama mampu memberikan manfaat yang di aspirasikan melalui pemerintah daerah.

BAB VII

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, relasi politik antara ulama dan elit lokal, mulai dari bentuk dukungan ulama pada saat pilkada melalui berbagai kegiatan keagamaan, hingga peran ulama terjalin pasca adanya pilkada terjadi dengan adanya kolaborasi melalui program pemerintah kabupaten Jombang, hingga distribusi public good pada sector pendidikan.

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dijelaskan dengan narasi panjang pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan menjadi tiga poin berikut. Pertama pada pilkada Kabupaten Jombang ada bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan oleh kyai Hasib, mulai dari proses endorse pasangan Munjidah melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, dimana pada saat momen perayaan maulid maupun sholawat yang dihadiri oleh para santri, alumni, bahkan masyarakat sekitar. Selain ulama memberikan ruang untuk Munjidah menyampaikan hajatnya, kyai Hasib juga dalam sambutannya memberikan gambaran terhadap para jamaah dalam memberikan dukungannya terhadap Munjidah, dengan alasan masih dalam lingkup saudara tambakberas, dan dengan pengalaman seblumnya di berbagai organisasi serta pernah menjabat menjadi legislatif. Tidak hanya itu proses dukungan yang dilakukan ulama juga melalui keluarga-keluarga Pondok pesantren guna mengajak untuk memberikan dukungan baik dari segi do'a maupun dukungan secara langsung. Bentuk dukungan-dukungan yang dilakukan oleh ulama juga melalui forum-forum dakwah maupun pada kegiatan pengajian. Selain itu, para ulama juga mengarahkan terhadap para alumni untuk memberikan dukungan terhadap Munjidah Wahab, adanya forum alumni dirasa memberikan dampak signifikan terhadap pemenangan Munjidah Wahab, karena bagaimana pun kebanyakan santri lebih melihat dan mengikuti dawuh para kyai. Karena begitu besar power ulama dalam mempengaruhi masyarakat, sehingga banyak banom dibawah naungan NU seperti Muslimat dan Fatayat juga ikut andil dalam dawuh para kyai dan bu nyai.

Kedua, pola relasi yang terjadi antara ulama dan elit lokal pasca adanya momentum pilkada juga terus terbangun. Dimulai dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Munjidah seringkali melibatkan ulama. Seperti kegiatan Sholawatan yang di agendakan

setiap tahun guna memberikan ajang silaturahmi antar ulama se-Kabupaten Jombang, serta guna tetap mempertahankan Jombang sebagai kota santri. Tidak hanya itu beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Munjidah juga seringkali merangkul ulama dalam memutuskan kebijakan seperti halnya aturan larangan miras yang disahkan oleh Bupati Jombang guna menghindari adanya ke mudharatan di kota santri. Adanya kebijakan tersebut juga tak lepas dari masukan para ulama-ulama guna menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu era kepemimpinan Munjidah juga memberikan program beasiswa kepada santri yang pada saat itu diberikan kepada siswa MAN Tambakberas, merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap kyai-kyai yang telah memberikan dukungan kepada Munjidah.

Ketiga, dampak pola relasi ulama dan elit lokal juga memberikan efek positif terhadap distribusi public good di bidang pendidikan pada kepemimpinan Munjidah waha, mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah, dan seragam gratis. Tidak hanya itu diera kepemimpinan Munjidah Wahab mencetuskan Kebijakan sekolah umum berbasis keagamaan, dimana kebijakan tersebut dengan inisiasi antara keresahan ulama dan keresahan Munjidah Wahab melihat masyarakat Jombang masih banyak yang belum lancer membaca al-qur'an, maka dari itu, dengan adanya kebijakan tersebut memberikan kebermanfaatan pada ustad-ustad maupun alumni pesantren guna bias mendaftarkan diri sebagai guru keagamaan. Adanya kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena banyak anak-anaknya yang bisa memahami ilmu agama meskipun tidak mengeyam di Pondok Pesantren. Adanya relasi klientelisme ini memberikan konteks yang secara positif karena beberapa relasi yang terbangun antara ulama dan elit lokal tidak hanya bersifat pragmatis akan tetapi juga membawa manfaat secara sosial, seperti peningkatan dalam kualitas pendidikan formal dan non-formal. Model relasi ini dapat menjadi contoh bagaimana relasi politik dapat diarahkan untuk memberikan dampak positif bukan hanya pada pengikutnya tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

B. Pelajaran Penting

Bahwa politik lokal di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya peran ulama dan politik. Ulama seringkali menjadi penghubung mengenai aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Dalam ranah politik lokal, ulama memiliki pengaruh untuk memastikan adanya kebijakan tidak hanya perihal kebutuhan duniawi akan tetapi juga sejalan dengan nila-nilai agama dan moral. Pelajaran penting yang dapat diambil dari relasi ulama dan elit politik ialah, bahwa politik tidaklah hanya sebatas perihal

kekuasaan, akan tetapi dengan berpolitik, bisa dijadikan sebagai alat perjuangan dalam merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hadirnya ulama dalam kancah politik lokal seringkali terlibat dalam kebijakan yang nantinya diterapkan tidak melupakan nilai secara kultural dan religious masyarakat Kabupaten Jombang. Contoh, dalam kebijakan yang diterapkan Munjidah berdasarkan kolaborasi Bersama ulama mampu merealisasikan pendidikan berbasis keagamaan bagi Sekolah Dasar (SD). Hal ini mengajarkan bahwa keterlibatan ulama dalam politik guna mempertahankan identitas Jombang sebagai Kota santri. dengan adanya relasi yang terbangun di Kabupaten antara ulama dan elit lokal, dimana keduanya saling mendukung kepentingan bersama. Ulama mendukung sebuah kebijakan yang berpihak pada santri dan masyarakat, sementara elit mendapatkan legitimasi dari para ulama untuk membangun basi dukungan masa di kalangan santri dan masyarakat.

Perbincangan mengenai agama dan politik menjadi bagian penting dalam sejarah, naik dalam konteks lokal, seperti yang terjadi di Kabupaten Jombang. Adanya hubungan agama dan politik melihatkan bagaimana nilai spiritual keagamaan mampu mempengaruhi, membentuk, atau bahkan menjadi bagian dari proses politik. Agama sendiri, menjadi landasan para ulama dalam memberikan solusi kebijakan agar selaras dengan kebutuhan warga Jombang. Ulama juga dalam berpolitik tidak lepas dari nilai-nilai agama, sehingga dalam memberikan masukan kebijakan terhadap pemerintah memastikan ada nilai-nilai religious yang nantinya dapat diterapkan dalam kebijakan public. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Jombang, dalam sector pendidikan kolaborasi antara ulama dan pemerintah daerah mampu mewujudkan Sekolah Dasar (SD) wajib disisipkan materi keagamaan guna memberikan kesempatan masyarakat Jombang yang tidak mengeyamn dunia pesantren tetap mendapatkan ilmu agama selayaknya di pesantren.

Agama dan politik merupakan dua hal saling keterkaitan. Hal ini, dibuktikan dengan fenomena politik di Kabupaten Jombang. Bagaimana dua hal ini dikelola secara bijak, agamam dapat menjadi pengingat moral dalam politik yang disampaikan melalui ulama Jombang, sementara adanya politik dapat menjadi wadah untuk mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan demi kebaikan bersama. Semua ini terjadi atas dasar pola relasi antara ulama dan elit lokal terjalin dengan baik, saling memberikan timbal balik. Sehingga dapat kebijakan yang tercipta mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Maulani, d. K. (2023). *NU, Politik dan Pesantren (Mandat, Titah, & Dawuh Para Masyayikh.* Yogyakarta: BILDUNG.

Barokah, F. (2023). Mistisme Politik : Eksistensi Magis dalam Perpolitikan Indonesia. *JIIP : JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 1-16.

Berenschot, E. A. (2019). *DEMOCRACY FOR SALE (Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

By Prof. Dr. Ir. Ali Kabul Mahi, M. d. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi.* Jakarta: KENCANA.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry And Research Design (Choosing Among Five Approaches).* Amerika: United States Of America : Sage Publications.

Fajri, A. (2014). *ULAMA & POLITIK, Analisis Fatwa dan Peran Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Era Reformasi.* Tangerang: Talenta Pustaka Indonesia.

Ghifari, M. A. (2022, Januari). Relasi Antara Agama dan Politik. *DEPARTEMEN POLITIK*.

Gunawan, A. (2023). PROFIL DAN PEMIKIRAN POLITIK AMIEN RAIS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI TAHUN 1998-SEKARANG. *Research Gate.net*, 16.

Harahap, M. I. (2020). POLITIK ISLAM;ULAMA;PEMIKIRAN POLITIK;Syekh M. Arsyad Thalib Lubis. *repository.uinjkt.ac.id*.

Haryanto. (2009). ELIT POLITIK LOKAL DALAM PERUBAHAN SISTEM POLITIK. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 131-148.

Ibnu Burdah, N. K. (2019). *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Iqbal, M. M. (2019). NAHDLATUL ULAMA DALAM PUSARAN POLITIK: SEBUAH OTOKRIKTIK ORIENTASI NU DALAM POLITIK PERSPEKTIF INSIDER. *JISOP : Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 181-187.

Istiyanto, S. B. (2020). Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan Daerah Wisata Pantai Pascabencana. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.

Jauhari. (2019). PENCITRAAN ULAMA DALAM AL-QUR'AN (Refleksi peran Ulama Dalam Kehidupan Sosial). *Jurnal Peurawi*, 21-36.

Jombang, D. (2022). *Website.Jombangkab.go.id*. Retrieved from https://website.jombangkab.go.id/beranda

Khaidir, S. (2021). PENGARUH ULAMA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. *Jurnal Fisip Ulm*.

Khamdan Safiuddin, I. M. (2024). Eksistensi Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Partisipasi Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *NAHNU:Journal of Nahdlatul Ulamaand Contemporary Islamic Studies*, 221-232.

Kholik, S. (2020). PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH. *Jurnal Hukum Mimbar JustitiaFakultas Hukum Universitas Suryakancana*, 56-70.

Marsh, D. &. (2011). *Teori dan metode dalam Ilmu politik.* Bandung: Nusa Media.

Maschab, M. (2013). *POLITIK PEMEINTAHAN DESA DI INDONESIA.* Yogyakarta: PolGoV.

Muljanto, M. A. (2021). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *JURNAL MANAGEMEN KEUANGAN PUBLIK*.

Muzakhi, A. (2022). Pembangunan Daerah 3t Melalui Implementasi Pendidikan Kejuruan Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Wilayah Kepulauan Mentawai. *Proceedings of Life and Applied Sciences*.

Nasution, N. H. (2017). Ulama dan Politik : Keterlibatan Ulama Sumatera Selatan dalam Politik praktis dan Community Empowerment Pada Abad XX. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 126-143.

Ni Ketut Sudianing, K. A. (2019). PERAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. *LOCUS Majalah Ilmiah FIA*.

Nurlina Goncing, M. A. (2022). Politik Elit Nahdlatul Ulama dalam Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014 dan 2019. *VOX POPULI*, 125-134.

Peters, G. (2019). *Institutional Theory In Political Science L The New Institutionalism.* Cheltenham: Edward lgar Publishing.

Rosi, F. (2019). KOMPETISI POLITIK ANTAR AKTOR LOKAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN. *Core.ac.uk*, 20.

Sab, J. (2024, May). *Medium Writing About Islam.* Retrieved from Medium.com: https://medium.com/@jabalsab/nahdlatul-ulama-di-era-reformasi-indonesia-e7c20f18dbc4

Said, E. W. (1998). *Peran Intelektua, Terj. Hasundungan Sirait dan Rin Hindaryati*. Jakarta: Obor.

Sandy Anugrah Tangkas, I. N. (2021). GERAKAN POLITIK GNPF-ULAMA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 114-127.

Sumarto, M. (2018). *PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KLIENTELISME.* Yogyakarta: UGM PRESS.

Umam, K. (2015). SIKAP ULAMA BETAWI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI DUKUNGAN TERHADAP FAUZI BOWO-NACHROWI RAMLI DALAM PILKADA DKI JAKARTA TAHUN2021. *UIN.SUKA.AC.ID*, 35.

Zarmaili. (2013). PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI. *Jurnal.kemendagri.go.id*, 13-16.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan kyai Hasib

Gambar 2. Wawancara Gus Salam

Gambar 3. Wawancara Gus Wafi

Gambar 4. Wawancara DPRD Jombang

Gambar 5. Wawancara DPRD Jombang

Gambar 6. Wawancara politisi Muda dan Tim Sukses

Gambar 7. Wawancara masyarakat sekaligus kader Ansor

Gambar 8. Wawancara TA Bupati sekaligus kader Muslimat

Gambar 9. Wawancara guru muatan lokal keagamaan

Gambar 10. Wawancara guru muatan lokal keagamaan

Gambar 11. Wawancara wali murid SD

Gambar 12. Wawancara pengurus Denanyar

Gambar 13. Wawancara kepala sekolah SD

Gambar 14. Wawancara dinas Pendidikan Jombang

Gambar 15. Wawancara penguru Tambakberas

Wilker Bandarkedungmulyo	Rp	12.960.000
Wilker Bareng	Rp	24.240.000
Wilker Diwek	Rp	24.960.000
Wilker Gudo	Rp	19.680.000
Wilker Jogoroto	Rp	12.240.000
Wilker Jombang	Rp	48.480.000
Wilker Kabuh	Rp	16.920.000
Wilker Kesamben	Rp	17.520.000
Wilker Kudu	Rp	9.720.000
Wilker Megaluh	Rp	14.520.000
Wilker Mojoagung	Rp	23.520.000
Wilker Mojowarno	Rp	28.200.000
Wilker Ngoro	Rp	30.000.000 ~~30.720.000~~
Wilker Ngusikan	Rp	8.640.000
Wilker Perak	Rp	16.800.000
Wilker Peterongan	Rp	18.000.000
Wilker Plandaan	Rp	16.560.000
Wilker Ploso	Rp	14.640.000
Wilker Sumobito	Rp	26.520.000
Wilker Tembelang	Rp	17.640.000
Wilker Wonosalam	Rp	16.440.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. Maret 2020)	Rp	720.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. April 2020)	Rp	720.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. Mei 2020)	Rp	720.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. Juni 2020)	Rp	720.000
Wilker Diwek (Diniyah SD bln. Juli 2020)	Rp	720.000
Total	**Rp**	421.800.000 ~~422.520.000~~

Gambar 16. Insentif guru muatan lokal keagamaan

NO	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU 2019	PAGU 2020	PAGU 2021	PAGU 2022	PAGU 2023	PAGU 2024
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Honorarium Pembimbing Mulok Keagamaan SD	NA	650,000,000.00	20,437,410,400.00	5,714,089,500.00	5,561,982,000.00	16,830,439,540.00
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Honorarium Pembimbing Mulok Keagamaan SMP	NA	599,996,600.00	5,975,293,400.00	17,493,856,053.00	17,493,856,053.00	4,856,333,950.00

Gambar 17. Alokasi anggaran muatan lokal keagamaan per tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Anfathoni Alama Jidan
TTL	: Pemalang, 01 Oktober 2002
Alamat	: Pegiringan RT 06/RW 02, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang
NIM	: 2006016027
Jurusan	: Ilmu Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama	: Islam
Email	: jidan.jiduut@gmail.com
No. Hp	: 082139329691
Riwayat Pendidikan	: 1. TK Nurul Ulum Pegiringan 1. MI Nurul Ulum Pegiringan 2. Mts Ma'hadut Tholabah 3. MAN 4 Denanyar Jombang
Pengalaman Organisasi	: 1. Ketua HMJ Ilmu Politik 2022 1. Ketua Dema Fisip 2023 2. Sema UIN Walisongo Semarang 3. PMII Rayon Fisip 4. PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang